QANUN ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH
TAHUN 2012-2032

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

Mengingat...

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH TAHUN 2012 – 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aceh...

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota;
5. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
7. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh;
8. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses pemilihan umum secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota;

10. Bupati/Walikota...

10. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yang selanjutnya disebut RPJM Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada RPJP Aceh serta memerhatikan RPJM Nasional;
17. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut RKP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
21. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan;

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Aceh periode 2012-2032 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Aceh.

(2) Rincian...

(2) Rincian dari program pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 3

RPJP Aceh mengacu kepada RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Aceh.

Pasal 4

RPJP Aceh sebagaimana di maksud dalam pasal 3 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Aceh dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode jabatan Gubernur.

Pasal 5

RPJP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH
BAB III	:	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	:	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2005-2025
BAB V	:	ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	:	PENUTUP

Pasal 6

(1) RPJP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) RPJP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Aceh yang memuat Visi, Misi dan Program Kerja Gubernur.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Aceh untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

(2) RKP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun berikutnya.

Pasal 8...

Pasal 8

(1) RPJP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota.

(2) RPJP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota.

(3) RPJM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Aceh.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Aceh melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh.

(2) Gubernur dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Aceh dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Aceh tentang RPJP Aceh.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) RPJP Kabupaten/Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun RPJP Aceh ini ditetapkan agar melakukan penyempurnaan kembali dan disesuaikan dengan RPJP Aceh paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

(2) RPJP Aceh dalam perjalanannya bila diperlukan dapat direvisi/peninjauan kembali harus ditetapkan dengan Qanun Aceh.

(3) Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB V...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 19 Nopember 2012 M
5 Muharram 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 November 2012 M
5 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH
TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Wilayah Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kota yaitu (1) Kabupaten Simeulue; (2) Kabupaten Aceh Singkil; (3) Kabupaten Aceh Selatan; (4) Kabupaten Aceh Tenggara; (5) Kabupaten Aceh Timur; (6) Kabupaten Aceh Tengah; (7) Kabupaten Aceh Barat; (8) Kabupaten Aceh Besar; (9) Kabupaten Pidie; (10) Kabupaten Bireuen; (11)Kabupaten Aceh Utara; (12) Kabupaten Aceh Barat Daya; (13) Kabupaten Gayo Lues; (14)Kabupaten Aceh Tamiang; (15) Kabupaten Nagan Raya; (16)Kabupaten Aceh Jaya; (17) Kabupaten Bener Meriah; (18) Kabupaten Pidie Jaya dan (1) Kota Banda Aceh; (2) Kota Sabang; (3) Kota Langsa; (4) Kota Lhokseumawe; serta (5)Kota Subulussalam.

Pembangunan Aceh yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping itu, banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Aceh 20 tahun ke depan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), RPJP Aceh memuat visi, misi dan arah pembangunan Aceh yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Aceh lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Pembangunan Aceh yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang

meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Aceh untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional. Mengacu kepada Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, periode RPJP Aceh sebagai dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.

Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJP Aceh untuk periode jangka menengah (lima tahunan) Pemerintah Aceh menyusun RPJM Aceh. Dalam hal ini tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dibagi dalam 4 (empat) tahapan (disesuaikan dengan masa jabatan Gubernur Aceh terpilih), yakni perencanaan pembangunan Aceh tahap I Tahun 2012-2017, tahap II Tahun 2018-2022, tahap III Tahun 2023-2027, dan tahap IV Tahun 2028-2032.

Pentahapan rencana pembangunan Aceh disusun dalam masing-masing periode RPJM Aceh sesuai dengan visi, misi dan program kerja Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat Aceh. RPJM Aceh memuat strategi pembangunan Aceh, kebijakan umum program dinas/instansi/lembaga dan lintas dinas/instansi/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Aceh, Gubernur yang sedang menjalankan roda pemerintahan pada waktu terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Aceh dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) pada tahun pertama Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2013, tahun 2018, tahun 2023 dan tahun 2008.

Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP Aceh dan APBA pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2013, tahun 2018, tahun 2023 dan tahun 2008 melalui mekanisme Perubahan APBA (APBA-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Perencanaan pembangunan jangka panjang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran yang bersifat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga, individu, serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki kompetensi pemikiran yang rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan. Oleh sebab itu, RPJP Aceh yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Aceh adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Mengingat RPJP Aceh menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh, diharapkan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota menyiapkan Rancangan Qanun Kabuapaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota yang disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Rancangan Qanun RPJP Kabupaten/Kota hasil Musrenbang dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur Aceh melalui Bappeda Aceh. Selanjutnya RPJP Kabupaten/Kota ini ditetapkan melalui Qanun Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Pasal 2...

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Maksud dari RPJP Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP Aceh, bukan untuk membatasi kewenangan Kabupaten/Kota, tetapi diharapkan adanya perencanaan yang sinergis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 9

LAMPIRAN

QANUN ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2012

tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ACEH

TAHUN 2012-2032

PEMERINTAH ACEH

2012

DAFTAR ISI

SINGKATAN DAN AKRONIM i
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 2
1.3 Landasan Penyusunan 3
1.4 Hubungan antar Dokumen RPJP Aceh dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi Perbatasan 5
1.5 Sistematika Penyusunan 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH 7
2.1.Geografis dan Demografis 7
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 7
2.1.1.1.Letak, Luas dan Batas Wilayah 7
2.1.1.2.Kondisi Topografi 7
2.1.1.3.Kondisi Klimatologi 8
2.1.1.4.Kondisi Hidrologi 8
2.1.1.5.Penggunaan Lahan 12
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 12
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana 14
2.1.4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 19
2.1.5. Demografi 21
2.2.Syariat Islam dan Sosial Budaya **22**
2.2.1.Syariat Islam 22
2.2.2.Sosial Budaya 25
2.3.Kesejahteraan Masyarakat **26**
2.3.1.Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 27
2.3.1.1.Pertumbuhan Ekonomi 27
2.3.1.2.Laju Inflasi 28
2.3.1.3.Pendapatan Perkapita 29
2.3.1.4.Ketimpangan Pendapatan 29
2.3.1.5.Pemerataan Pendapatan 29
2.3.1.6.Ketimpangan Regional 30
2.3.2.Kesejahteraan Sosial 31
2.3.2.1.Pendidikan 31
A. Angka Melek Huruf 31
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 32
C. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 32
D. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 33

2.3.2.2.Kesehatan 34
A.Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. 34
B.Angka Usia Harapan hidup 35
C.Persentase Balita Gizi Buruk 36
D.Angka Kesakitan..... 36
2.3.2.3.Tingkat Kemiskinan 38
2.3.2.4.Indeks Pembangunan Manusia 40
2.3.2.5.Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran..... 41
2.3.2.6.Kriminalitas 42
2.3.3.Seni Budaya dan Olahraga 43
2.3.3.1.Group Kesenian 43
2.3.3.2.Club Olah Raga dan Gedung OlahRaga 44
2.4.Pelayanan Umum.....45
2.4.1.Pelayanan Dasar 45
2.4.1.1.Pendidikan..... 45
2.4.1.2.Kesehatan 46
2.4.1.3.Lingkungan Hidup 48
2.4.1.4.Saranan dan Prasarana Umum 50
2.4.1.5.Penataan Ruang..... 54
2.4.1.6.Perhubungan 56
2.4.2.Pelayanan Penunjang 59
2.4.2.1.Penanaman Modal (Investasi) 59
2.4.2.2.Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 61
2.4.2.3.Kependudukan dan Catatan Sipil 63
2.4.2.4.Ketenagakerjaan 63
2.4.2.5.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak. 64
2.4.2.6.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 66
2.4.2.7.Komunikasi dan Informatika 67
2.4.2.8.Pertanahan 69
2.4.2.9.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 70
2.4.2.10.Perpustakaan 70
2.4.2.11.Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 72
2.4.2.12.Pemuda dan Olah Raga 73
2.5.Daya Saing Daerah.....74
2.5.1.Kemampuan Ekonomi Daerah 74
2.5.1.1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita .. 74
2.5.1.2.Nilai Tukar Petani 74
2.5.1.3.Produktivitas Total Tenaga Kerja Daerah 74
2.5.1.4.Produktivitas Pertanian 75
2.5.1.5.Perbankan..... 82
2.5.1.6.Industri, Perdagangan dan Ekspor 82
2.5.1.7.Sumber Pendanaan..... 87
2.5.2.Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 89
2.5.2.1.Aksesibilitas Daerah..... 89
2.5.2.2.Penataan Wilayah 91
2.5.2.3.Fasilitas Bank dan Non Bank 92

2.5.2.4.Ketersediaan Air Bersih 92
2.5.2.5.Fasilitas Listrik dan Telpon 93
2.5.2.6.Ketersediaan Restoran 95
2.5.2.7.Ketersediaan Penginapan 96
2.5.3.Iklim Berinvestasi 96
2.5.3.1.Keamanan 96
2.5.3.2.Kemudahan Perizinan 97
2.5.3.3.Pengenaan Pajak Daerah 97
2.5.3.4.Qanun (Peraturan Daerah) 99
2.5.4.Sumberdaya Manusia 100
2.5.4.1.Kualitas Tenaga Kerja 100
2.5.4.2.Rasio Ketergantungan Hidup 100
2.5.4.3.Aparatur Pemerintah 100
2.5.5.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 101
2.5.6.Sumberdaya Energi dan Mineral 102
2.5.6.1.Sumberdaya Energi 102
2.5.6.2.Sumberdaya Mineral 104
2.6.Perdamaian 106
2.6.1.Politik dan Reintegrasi 106
2.6.2.Hukum dan HAM 107

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....109
3.1. Permasalahan dan Tantangan Provinsi Aceh 109
3.2. Analisis Isu-isu Strategis 113
3.2.1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi 113
3.2.2. Kerentanan Perdamaian 114
3.2.3. Pemantapan Syariat Islam dan Ketahanan Budaya 114
3.2.3. Integrasi Dana Pembangunan Belum Optimal 114
3.2.5. Penurunan Sumber Penerimaan Daerah dari Migas 114
3.2.6. Alih Fungsi Lahan Semakin Meluas 115
3.2.7. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 115
3.2.8 Pemanasan Global dan Tingkat Pencemaran Lingkungan .. 115
3.2.9. Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana 115
3.2.10.Pertanian Menjadi Sektor Harapan 116
3.2.11.Peningkatan Nilai Tambah Daerah 116
3.2.12.Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belum Optimal 116
3.2.13.Tingginya Beban Tanggungan Hidup Penduduk 117
3.2.14.Pengembangan Wilayah Strategis 117
3.2.15.Rendahnya Daya Saing 117
3.2.16.Rendahnya Peran Dunia Usaha Dalam Pembiyaan Pembangunan 118
3.2.17.Pengembangan Sumberdaya Energi dan Mineral 118
3.2.18.Kemiskinan, Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Wilayah 119

3.2.19.Beban Ganda Kesehatan..... 119
3.3.20.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 120

BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012-2032.....121

BAB V ARAH KEBIJAKAN.....124
5.1. Sasaran Pokok Pembangunan.....124
5.1.1 Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Berakhlak Mulia sesuai dengan Nilai-nilai Islami 124
5.1.2 Terwujudnya Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kabutuhan Hidup dalam Aspek Ekonomi, dan Spiritual.... 124
5.1.3 Terwujudnya Aceh yang Demokratis dan Berlandaskan Hukum 125
5.1.4 Terwujudnya Rasa Aman dan Damai Bagi Seluruh Rakyat Serta Terjaganya Keutuhan Wilayah Aceh..... 126
5.1.5 Terwujudnya Pembangunan yang Berkualitas, Maju Adil dan Merata..... 126
5.1.6 Terwujudnya Aceh yang Lestari dan Tanggap Terhadap Bencana 127

5.2. Arah Kebijakan 128
5.2.1. Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Berakhlak Mulia sesuai dengan Nilai-nilai Islami 128
5.2.2. Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kehidupan Secara Ekonomi, Sosial dan Spiritual 130
5.2.3. Mawujudkan Aceh yang Domokratis Berlandaskan Hukum 137
5.2.4. Mewujudkan Aceh yang Aman, Damai dan Bersatu..... 139
5.2.5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas, Maju, Adil dan Merata..... 140
5.2.6. Mewujudkan Aceh yang Lestari dan Tanggap Terhadap Bencana 146

5.3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan 149
5.3.1. Tahapan Pembangunan Ke-1 (2012-2017)..... 149
5.3.2. Tahapan Pembangunan Ke-2 (2018-2022)..... 154
5.3.3. Tahapan Pembangunan Ke-3 (2023-2027) 158
5.3.4..Tahapan Pembangunan Ke-4 (2028-2032) 160

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN..... 163

6.1. Prinsip Kaidah Pelaksanaan..... 163
6.2. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi 164
6.2.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh..... 164
6.2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 164

BAB VII PENUTUP.....166

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Aceh 9

Tabel 2.2. Wilayah Sungai Strategis Nasional BWS Sumatera-I PBPS Provinsi Aceh 10

Tabel 2.3 Wilayah Sungai Lintas Provinsi BWS Sumatera- I PBPS Aceh 11

Tabel 2.4 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota BWS Sumatera- I PBPS Aceh 11

Tabel 2.5. Jenis Penggunaan Lahan Di Aceh Tahun 2005-2008 12

Tabel 2.6. Penempatan Wilayah Pengembangan (WP) 13

Tabel 2.7 Penempatan Kawasan Unggulan pada Kawasan Budidaya Lainnya dalam Kawasan Andalah Aceh-WP (KAA-WP)..... 14

Tabel 2.8. Capaian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 20

Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan Penduduk Aceh Tahun 2006-2009 22

Tabel 2.10.Angka Melek Huruf Dewasa Di Aceh Tahun 2005-2009 31

Tabel 2.11.Angka Rata-Rata Sekolah Di Aceh (dalam tahun) Tahun 2005-2009. 32

Tabel 2.12.Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2007-2009 33

Tabel 2.13.Angka Harapan Hidup Di Aceh Tahun 2005-2008 35

Tabel 2.14 Tingkat Kemiskinan Di Aceh Tahun 2005-2009 39

Tabel 2.15.Indeks Pembangunan Manusia Di Aceh 2005-2009 40

Tabel 2.16.Tingkat Pengangguran Terbuka Di Aceh Tahun 2007-2009 42

Tabel 2.17.Indek Tingkat Kejahatan Menonjol Di Aceh Tahun 2006-2008 43

Tabel 2.18.Organisasi Keolahragaan Di Aceh 44

Tabel 2.19.Jumlah Saran Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Tahun 2007-2009 47

Tabel 2.20.Sumber Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga (dalam persen) Tahun 2005-2009 49

Tabel 2.21.Kondisi Jalan Nasional/Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009 50

Tabel 2.22.Potensi Areal Lahan Pertanian Di Aceh Tahun 2009 51

Tabel 2.23.Uji Kir Kendaraan Tahun 2010 57

Tabel 2.24.Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2009 58

Tabel 2.25.Kondisi Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2009 59

Tabel 2.26. Perkembangan Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) Sampai dengan November 2010 61

Tabel 2.27.Persentase Koperasi Aktif Di Aceh Tahun 2004-2009..... 62

Tabel 2.28.Tren Ketenagakerjaan Di Aceh 2006-2010 64
Tabel 2.29.Jumlah Tower dan Operator Selular 68
Tabel 2.30. Jumlah Perpustakaan Di Aceh Tahun 2010..... 71
Tabel 2.31 Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi Tahun 2007
dan 2008 Berdasarkan Harga Konstan 2000..... 75
Tabel 2.32 Produktivitas Padi Di Aceh dan Nasional Tahun 2005-2009 76
Tabel 2.33 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Menurut Komoditi
Di Aceh Tahun 2007-2009 76
Tabel 2.34 Jumlah Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Di Aceh
Tahun 2009 77
Tabel 2.35 Produksi Tanaman Perkembunan Rakyat Menurut Komoditi
Di Aceh Tahun 2006-2009 78
Tabel 2.36 Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Tahun 2008-2009... 79
Tabel 2.37 Luas Usaha Budidaya Perikanan Tahun 2007-2009..... 81
Tabel 2.38 Jumlah Prasarana Perikanan Di Aceh Tahun 2005-2009 81
Tabel 2.39 Perkembangan Industri Tahun 2007-2009..... 83
Tabel 2.40 Realisasi Ekspor Provinsi Aceh per Negara Tujuan
Periode 2005-2009..... 86
Tabel 2.41 Realisasi Ekspor Aceh per Komoditi Periode 2005-2009 87
Tabel 2.42 Perkembangan Sumber Pendanaan Pembangunan Aceh
Tahun 2007-2009 88
Tabel 2.43 Rasio Rumah Tangga dan Desa Menggunakan Listrik Tahun 2010 .. 94
Tabel 2.44 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Tahun 2008-2009 95
Tabel 2.45 Jumlah Pajak dan Restribusi Aceh 98
Tabel 2.46 Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur yang Mendukung Investasi .. 99
Tabel 2.47 Potensi Sumberdaya Mineral di Provinsi Aceh Tahun 2010..... 105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJP Aceh Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Gambar 2.1 Grafik Tren Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.

Gambar 2.2 Grafik Tren Persentase Rumah Layah Huni/Rumah Sehat.

Gambar 2.3 Grafik Persentase Akseptor KB Aceh Tahun 2005-2009.

SINGKATAN DAN AKRONIM

ACFTA	:	ASEAN China Free Trade Agreement
AKAP	:	Antar Kota Antar Provinsi
AKAP	:	Antar Kota Antar Provinsi
AKB	:	Angka Kematian Bayi
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi
AKDP	:	Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
AKI	:	Angka Kematian Ibu
ANC	:	Ante Natal Care
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
ASEAN	:	Association of South East Asia Nation
ASI	:	Air Susu Ibu
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri
BABS	:	Buang Air Besar Sembarangan
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BB/TB	:	Berat Badan per Tinggi badan
BB/U	:	Berat Badan per Umur
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN-KB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BCG	:	Bacillus Calmette-Guerin
BI	:	Bank Indonesia
BKPG	:	Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong
BKRA	:	Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRA	:	Badan Reintegrasi Aceh
BRR	:	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BTA	:	Basil Tahan Asam
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CAR	:	*Capital Adequacy Ratio*
CDR	:	*Case Detection Rate*
CPR	:	*Contraceptive Prevalence Rate*
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DAU	:	Dana Alokasi Khusus

DBD	:	Demam Berdarah Dengue
Depkeu	:	Departemen Keuangan
DHS	:	Demographic Health Survey
DI	:	Daerah Irigasi
Disbudpar	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
DM	:	Diabetes Mellitus
DPRA	:	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPT	:	Difteri, Pertusis dan Tetanus
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAS	:	Hutan Suaka Alam
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HGS	:	Hak Guna Usaha
HIV/AIDS	:	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
HL	:	Hutan Lindung
HM	:	Hak Milik
HP	:	Hak Pakai
HP	:	Hand Phone
HPA	:	Hutan Pelestarian Alam
HPL	:	Hak Pengelolaan Lahan
ICOR	:	Incremental Capital Output Ratio
IKK	:	Ibukota Kecamatan
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	:	Ilmu pengetahuan dan Teknologi
ISPA	:	Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IW	:	*Indeks Williamson*
IW	:	*Indeks Williamson*
JTM	:	Jaringan Tegangan Menengah
JTM	:	Jaringan tegangan menengah
KANPEL	:	Kantor Pelabuhan
KAT	:	Komunitas Adat Terpencil
KB	:	Keluarga Berencana
KDRT	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KK	:	Kepala Keluarga
KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

KKR	:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KLB	:	Kejadian Luar Biasa
KLDK	:	Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan
KNPI	:	Komite Nasional Pemuda Indonesia
KP	:	Kuasa Pertambangan
KPI	:	*Key Performance Indicators*
l/dtk	:	Liter per detik
LH	:	Lahir Hidup
Linmas	:	Perlindungan Masyarakat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MB	:	Multi Basiler
MBS	:	Manajemen Berbasis Sekolah
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MDG's	:	Millenium Development Goals
MoU	:	Memorandum of Understanding
MPU	:	Majelis Permusyawaratan Ulama
MSR	:	Multi Stakeholder Review
MSR	:	*Multi Stakeholder Review*
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	Non Performing Loan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
ODHA	:	Orang Dengan HIV-AIDS
OTSUS	:	Otonomi Khusus
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PB	:	Pausi Basiler
PD PGSI	:	Pengurus Daerah Persatuan Gulat Seluruh Indonesia
PDRB	:	*Product Domestic Regional Bruto*
Pengda Forki	:	Pengurus Daerah Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia
Pengda FPTI	:	Pengurus Daerah Federasi Panjat Tebing Indonesia
Pengda Kodrat	:	Pengurus Daerah Keluarga Olah Raga Tarung Derajat
PER	:	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKL	:	Pusat Kegiatan Lokal
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional

PKPN	:	Program Kredit Peumakmue Nanggroe
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PKW	:	Pusat Kegiatan Wilayah
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLN	:	Perusahaan Litrik Negara
PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal DaLam Negeri
PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PNPM	:	Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pol WH	:	Polisi Wilayatul Hisbah
PON	:	Pekan Olah Raga Nasional
POPDA	:	Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
POPNAS	:	Pekan Olah Raga Pelajar Nasional
PORDA	:	Pekan Olah Raga Aceh
POSPENAS	:	Pekan Olah Raga Siswa Pesantren Nasional
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PPT	:	Pusat Pelayanan Terpadu
PT	:	Perguruan Tinggi
Pusdalop	:	Pusat Pengendalian Operasi
Riskesdas	:	Riset Kesehatan Dasar
RISTEK	:	Riset dan Teknologi
RPJMA	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPA	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RR	:	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SD/MI/SDLB:		Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa

SDKI	:	Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA/MA/SMK	:	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan
SMP/MTs	:	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
SOP	:	*Standard Operational Procedure*
SPM	:	Standar Pelayanan Minimum
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
SUTM	:	Saluran Udara Tegangan Menengah
TB	:	Taman Buru
TB	:	Tuberkulosis
TB/U	:	Tinggi Badan per Umur
TBS	:	Tandan Buah Segar
TDBH Migas	:	Tambahan Dana bagi Hasil Minyak dan Gas
TK/RA	:	Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal
TK-PPA	:	Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh
TPS	:	Tempat Pembuangan Sampah
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	:	Usia Harapan Hidup
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
UMR	:	Upah Minimum Regional
UNHCR	:	*United Nations High Commissioner for Refugees*
UNICEF	:	*United Nations Children's Fund*
UU	:	Undang-undang
UUPA	:	Undang-undang Pemerintahan Aceh
VCT	:	*Voluntary Councelling and Testing*
VSAT	:	*Very Small Aperture Terminal*
WHO	:	World Health Organization
WP	:	Wilayah Pengembangan
WRSE	:	Wanita Rawan Sosial Ekonomi
ZEE	:	Zona Ekonomi Eksklusif

LAMPIRAN
QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 20012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG ACEH TAHUN 2012-2032

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjalanan sejarah Aceh menggambarkan sebuah mosaik tersendiri. Pada abad ke 17, Aceh merupakan kawasan yang maju dan menjadi pusat perdagangan regional. Aceh pada saat itu bercirikan perkotaan dimana kekuatan ekonominya dikuasai oleh saudagar setempat dan ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan efektif.

Setelah mencapai masa keemasannya, Aceh kemudian memasuki periode konflik dimana negara-negara imperialis dan kolonialis berkeinginan menjajah Aceh. Periode ini membawa Aceh dalam posisi defensif sehingga selama periode ini kemegahan dan keunggulan budaya, ekonomi perdagangan menjadi suram karena semua energi difokuskan pada perlawanan.

Setelah perang kemerdekaan, rakyat Aceh kembali mengalami konflik berkepanjangan. Kondisi konflik tersebut dirasakan seperti tidak akan berhenti sampai terjadinya Bencana Gempa dan Tsunami pada 26 Desember 2004 di Samudera Hindia 150 Km dari pesisir Barat Aceh. Bencana ini menghancurkan beberapa negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan menelan korban di Aceh sebesar 170.000 jiwa. Dibalik masifnya kerusakan akibat bencana ini terbit sebuah harapan baru untuk membangun kembali Aceh yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dukungan masyarakat dunia yang luar biasa dalam membangun Aceh dan berakhirnya konflik melalui sebuah penandatangan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 sehingga terwujudnya perdamaian Aceh.

Berdasarkan kenyataan di atas, Aceh mengalami sebuah mosaik siklis yang diawali dengan masa kejayaan kemudian diikuti masa kesuraman dan sekarang ini memulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Seluruh komponen rakyat Aceh memiliki kesempatan besar untuk meraih harapan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Atas pemahaman tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh disusun. Dalam penyusunannya, Firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim Ayat 24-25, "*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik; akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya*" menjadi filosofi dasar. Oleh sebab itu, RPJP Aceh diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan realita, mempunyai arah yang jelas dan visioner, memiliki tahapan dan target hasil pada setiap tahapan pelaksanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan makro dan berwawasan dua puluh tahun yang memuat maksud dan tujuan, gambaran kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Aceh, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Dokumen RPJP Aceh ini merupakan lanjutan dari rangkaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya selama hampir tiga dekade proses pembangunan Aceh. Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah Aceh (sebelumnya disebut Daerah Istimewa Aceh dan Nanggroe Aceh Darussalam), telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Aceh, baik untuk jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut memuat tahapan-tahapan dan sekaligus dasar-dasar bagi proses pembangunan melalui implementasi program/kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh. Kendati demikian, proses pembangunan Aceh berlangsung dalam situasi dan kondisi yang terus berubah secara dinamis.

RPJP Aceh merupakan dasar-dasar pembangunan dan lanjutan dari upaya pembaruan untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh menuju masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Syari'at Islam. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia melalui pemanfaatan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, berwibawa serta didasari oleh kerjasama yang sinergis dan harmonis dari seluruh komponen yang ada di Provinsi Aceh.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1.Maksud

RPJP Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPRA, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan program prioritas dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh;

2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPRA, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang; dan
3. Menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota di Aceh.

1.2.2.Tujuan

RPJP Aceh ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Aceh, analisis isu-isu strategis, visi dan misi Aceh, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Aceh;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian masyarakat Aceh yang Islami, Damai, Maju dan Sejahtera sesuai dengan visi dan misi Nasional.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan tercapainya target tujuan pembangunan milenium, pengembangan agroindustri dan industri manufaktur serta peletakan dasar-dasar ekonomi berbasis pengetahuan.

1.3. Landasan Penyusunan

Penyusunan RPJP Aceh berlandaskan kepada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan ;

20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan Aceh;
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

1.4. Hubungan antara Dokumen RPJP Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJP Aceh dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, RPJP dan RTRW Nasional serta RPJP dan RTRW Provinsi perbatasan.

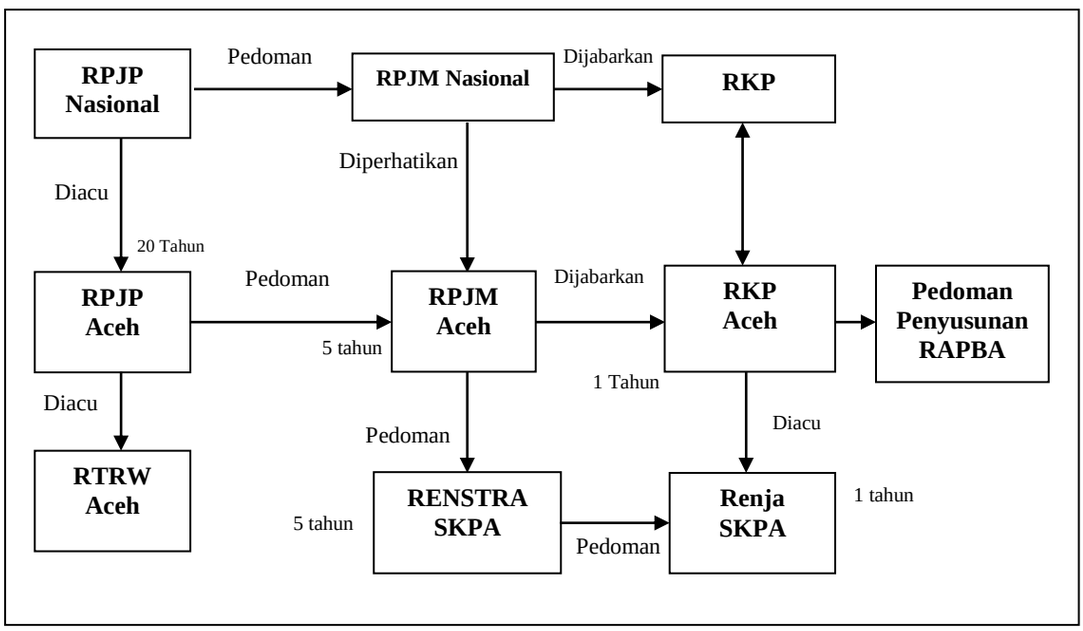

Gambar 1.1Hubungan Antara Dokumen RPJP Aceh Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Penelaahan RPJP Nasional dilakukan untuk menjamin keselarasan kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh dan Nasional. Demikian juga dengan Penelaahan RTRW Nasional dan RTRW Aceh bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang

berikut asumsi-asumsinya. Penelaahan RTRW Aceh untuk menjamin agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJP Aceh selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Aceh. RPJP Aceh harus memperhatikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (seperti lokasi Pusat Kegiatan Nasional pengembangan Kawasan Bebas Sabang).

Penelaahan RTRW Aceh perbatasan bertujuan untuk tercipta sinkronisasi pembangunan jangka panjang antar provinsi, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi perbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelaahan RPJP Aceh perbatasan dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang Aceh dengan daerah Provinsi perbatasan. Hasil telaahan RPJP Aceh perbatasan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau tantangan bagi Aceh selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan regional yang berkualitas, merata dan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.5. Sistematika Penyusunan

RPJP Aceh disusun berdasarkan parameter, indikator dan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH
BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012-2032
BAB V : ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH

2.1. Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2°00'00"- 6°04'30" Lintang Utara dan 94°58'34"-98°15'03" Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 56.758,85 km^2 atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km^2. Secara administratif pada tahun 2009, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa.

Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah, Aceh yang memiliki topografi datar (0 - 2%) tersebar di sepanjang pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 24.83 persen dari total wilayah; landai (2 – 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 11,29 persen dari total wilayah; agak curam (15 -40%) sebesar 25,82 persen dan sangat curam (> 40%) yang merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Leuser, dan bahu dari sungai-sungai yang ada sebesar 38,06 persen dari total wilayah.

Aceh memiliki ketinggian rata-rata 125 m diatas permukaan laut. Persentase wilayah berdasarkan ketinggiannya yaitu: (1) Daerah berketinggian 0-25 m dpl merupakan 22,62 persen luas wilayah (1,283,877.27 ha), (2) Daerah berketinggian

25-1.000 m dpl sebesar 54,22 persen luas wilayah (3,077,445.87 ha), dan (3) Daerah berketinggian di atas 1.000 m dpl sebesar 23,16 persen luas wilayah (1,314,526.86 ha).

2.1.1.3. Kondisi Klimatologi

Aceh memiliki Persentase lamanya penyinaran matahari tercatat jumlah penyinaran matahari maksimum terjadi antara pukul 10.00 – 11.00 WIB yaitu sebesar 8,6 persen dan jumlah penyinaran matahari terendah terjadi antara pukul 15.00 – 16.00 Wib sebesar 4.5 persen, suhu tertinggi terjadi pada tanggal 04 September 2010 sebesar 28,4 °C, dan rata-rata suhu terendah tercatat tanggal 29 September 2010 sebesar 25,4 persen sedangkan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada tanggal 29 September 2010 sebesar 91 persen dan terendah terjadi pada tanggal 04 September 2010 sebesar 69 persen.

Sedangkan rata-rata tekanan udara terendah terjadi pada tanggal 18 September 2010 yang bernilai 1011,0 mb sedangkan rata-rata tekanan udara tertinggi tercatat 06,27 mb dan 28 September sebesar 1012,9 mb. Untuk jumlah penguapan di stasiun klimitologi indrapuri, September 2010 tercatat jumlah penguapan terendah terjadi pada tanggal 29 September 2010 dengan nilai penguapan sebesar 0.3 mm,sedangkan jumlah penguapan tertinggi terjadi pada tanggal 10 September 2010 dengan jumlah penguapan 7,0 mm. Sementara persentase kecepatan angin terbanyak pada kecepatan Calm (0 Knot) sebesar 57,4 persen dan persentase kecepatan angin terendah yaitu pada kecepatan 11-17 Knot sebesar 1,3 persen. Sedangkan persentase arah angina terbanyak pada bulan Agustus 2010 didominasi arah dari Barat Laut sebanyak 8% dan arah angin terendah dari Timur Laut dengan persentase sebesar < 1.4%.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Di wilayah Aceh terdapat 408 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar sampai kecil. Aceh memiliki beberapa danau seperti Danau Laut Tawar di Aceh Tengah dan Danau Aneuk Laot di Sabang, juga memiliki rawa seluas 444.755 ha, yang terdiri dari rawa lebak seluas 366.055 ha dan rawa pantai seluas 78.700 ha.

Untuk pengelolaan sungai sebagai sumberdaya air ditetapkan 11 Wilayah Sungai (WS) yang terdapat di Aceh, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.11A/PRT/M/2006 ada empat kalisifikasi Wilayah Sungai (WS) yang ada di Aceh yaiut WS Strategis Nasional (WS Meureudu-Baro, WS Jambo Aye, WS Woyla-Seunagan, WS Tripa-Bateue) yang dikelola Pemerintah Pusat, WS Lintas Provinsi (WS Lawe Alas-Singkil) yang dikelola Pemerintah Aceh, WS Lintas Kabupaten/Kota (WS Krueng Aceh, WS Pase-Peusangan, WS Tamiang-Langsa,

WS Teunom-Lambesoi, WS Krueng Baru-Kluet) yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, WS Dalam Kabupaten/Kota (WS Pulau Simeulue) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. (Tabel 2.1)

Tabel 2.1
Wilayah Sungai (WS) Aceh

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	DAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	**Alas Singkil**	Lae Pardomuan, Lae Silabuhan, Lae Saragian, Lae Singki, L.Kuala Baru	Lintas Provinsi; Aceh-Sumatera Utara
2	**Meureudu-Baro**	Meureudu, Baro, Tiro, Pante Raja, Utue, Putu, Trienggadeng, Pangwa,Beuracan,Batee	Strategis Nasional; Aceh
3	**Jamboe Aye**	Jambo Aye, Geuruntang, Reungget, Lueng, Simpang Ulim, Malehan, Julok Rayeuk, Keumuning, Ganding Idi Rayeuk, Lancang, Jeungki, Peundawa Rayeuk, Peureulak, Peundawa Puntong, Leugo Rayeuk.	Strategis Nasional; Aceh
4	**Woyla-Seunagan**	Woyla-seunagan	Strategis Nasional; Aceh
5	**Tripa-Bateutue**	Tripa-Bateutue	Strategis Nasional; Aceh
6	**Krueng Aceh**	Aceh, Raya, Teungku, Batee	Lintas Kabupaten/Kota
7	**Pase-Peusangan**	Pase, Peusangan, Peudada, Keureuto, Mane, Geukeuh	Lintas Kabupaten/Kota
8	**Tamiang-Langsa**	Tamiang, Langsa, Raya, Telaga Muku, Bayeuen	Lintas Kabupaten/Kota
9	**Teunom-Lambeusoi**	Teunom, Lambeusoi,Bubon, Sabe, Masen, Inong	Lintas Kabupaten/Kota
10	**Krueng Baru-Kluet**	Krueng Baru-Kluet	Lintas Kabupaten/Kota
11	**Pulau Simeulue**	Sungai-sungai di Pulau Simeulue	Dalam Satu Kabupaten

Sumber: Permen PU No.11A/PRT/M/2006 dan Renstra SDA Prov Aceh 2007-2012

Arah dan pola aliran sungai yang terdapat dan melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: (1) Sungai-sungai yang mengalir ke Samudera India atau ke arah barat dan (2) Sungai-sungai yang mengalir ke Selat Malaka atau ke arah timur. Beberapa daerah aliran sungai dikelompokkan menjadi satu wilayah sungai berdasarkan wilayah strategis nasional dan lintas kabupaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut seperti yang disajikan pada Tabel 2.2, 2.3 dan 2.4.

Tabel tersebut memberikan informasi bahwa beberapa daerah aliran sungai yang memiliki luas dan rata-rata debit yang cukup besar antara lain: DAS Kr. Aceh dengan debit rata-rata 19,10 m^3/detik dengan luas 1.780 km^2, DAS Kr. Pase dengan debit rata-rata 91,12 m^3/detik dengan luas 2.272 km^2, DAS Kr. Peusangan dengan debit rata-rata 88,90 m^3/detik dengan luas 1.907,95 km^2, DAS Kr. Peudada dengan debit rata-rata 21,98 m^3/detik dengan luas 1.560 km^2, DAS Kr. Tamiang dengan debit rata-rata 296,64 m^3/detik dengan luas 4.683,60 km^2, DAS Kr. Teunom dengan debit rata-rata 192,91 m^3/detik dengan luas 2.413

km² dan DAS Kr. Kluet dengan debit rata-rata 248,25 m3/detik dengan luas 2.326 km2.

Tabel 2.2
Wilayah Sungai Strategis Nasional
BWS Sumatera – I PBPS Prov. Aceh

No Kode SWS	Nama SWS Sungai	Nama - Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	LEBAR				DEBIT			Luas DPS (km²)	Luas Genangan (km²)	Keterangan
			Panjang (km)	Hilir (m)	Tengah (m)	Hulu (m)	Max m3/Det	Min m3/Det	Rata-rata m3/Det			
A3 - 1	Meureudu - Baro	Kr. Meurudu	33.00	58.00	51.04	47.56	136.66	10.79	19.61	406.80	250.00	
		Kr. Baro	51.00	85.00	74.80	69.70	138.20	6.56	8.38	426.00	440.00	
		Kr. Pante Raja	30.00	60.00	52.80	49.20	85.44	1.64	8.54	201.50	216.00	
		Kr. Utue	23.10	13.00	11.44	10.66	20.00	1.74	2.00	277.20	235.00	
		Kr. Putu	22.90	11.50	10.12	9.43	45.44	0.85	8.54	201.50	114.00	
		Kr. Trienggadeng	7.00	28.00	24.64	22.96	12.21	0.26	1.22	28.80	120.00	
		Kr. Pangwa	10.20	35.00	30.80	28.70	6.66	0.07	0.67	15.70	124.00	
		Kr. Beuracan	25.10	50.00	44.00	41.00	68.00	0.70	4.59	100.20	200.00	
		Kr. Batee	9.00	15.00	13.20	12.30	2.64	0.03	0.26	6.22	71.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**211.30**									
A3 - 2	Jambo Aye	Kr. Jambo Aye	103.00	64.00	56.32	52.48	427.60	60.42	115.12	5,405.00	2,176.00	
		Kr. Geuruntang	8.00	60.00	52.80	49.20	11.32	0.11	4.46	26.70	48.00	
		Kr.Reungget	12.50	64.00	56.32	52.48	4.12	0.04	0.17	12.73	102.00	
		Kr. Leung	13.50	48.00	42.24	39.36	11.07	0.11	1.08	26.10	281.00	
		Kr. Simpang Ulim	128.00	109.00	95.92	89.38	23.32	0.23	2.33	55.00	1,931.00	
		Kr. Malehan	7.00	50.00	44.00	41.00	2.76	0.03	0.31	17.25	124.00	
		Kr. Julok	17.00	50.00	44.00	41.00	56.00	27.00	2.74	64.70	131.00	
		Kr.Rayeu	13.76	100.00	88.00	82.00	51.12	0.81	4.28	112.36	76.00	
		Kr.Keumuning	9.00	20.00	17.60	16.40	8.95	0.09	2.61	21.10	131.00	
		Kr. Gading	12.00	8.00	7.04	6.56	23.02	0.23	2.30	54.30	1,581.00	
		Kr. Idi Rayeuk	42.00	40.00	35.20	32.80	142.00	0.59	10.46	246.70	960.00	
		Kr. Lancang	8.30	31.00	27.28	25.42	5.41	0.05	0.12	18.20	61.00	
		Kr.Jeungki	13.60	55.00	48.40	45.10	53.13	0.78	5.31	125.30	46.00	
		Kr.Peundawa Reyeuk	10.00	15.00	13.20	12.30	21.58	0.46	2.16	50.90	88.00	
		Kr. Peureulak	165.50	62.00	54.56	50.84	338.94	6.32	43.89	1,035.20	1,700.00	
		Kr.Pendawa Puntong	82.00	16.00	14.08	13.12	21.62	0.41	2.16	51.00	126.00	
		Kr. Leugo Rayeuk	15.00	10.00	8.80	8.20	16.54	0.31	1.65	80.00	87.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**660.16**									
A3 - 3	Woyla - Seunagan	Kr. Woyla	125.00	18.00	15.20	14.94	968.54	3.98	3.98	2,284.20	1,121.00	
		Kr. Seunagan	97.00	210.00	178.50	172.20	27.70	17.40	33.68	669.00	450.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**222.00**									
A3 - 4	Tripa - Bateue	Kr. Tripa	214.20	55.00	46.75	45.10	327.20	399.00	203.00	3,163.00	1,576.00	
		Kr. Bateue	111.20	50.00	42.50	41.00	246.00	13.31	37.00	887.00	980.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**325.40**									
	Total Panjang Sungai Keseluruhan		**1,418.86**									

Tabel 2.3
Wilayah Sungai Lintas Provinsi
BWS Sumatera – I PBPS Aceh

No Kode SWS	Nama SWS Sungai	Nama - Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Panjang (km)	LEBAR Hilir (m)	LEBAR Tengah (m)	LEBAR Hulu (m)	DEBIT Max m3/Det	DEBIT Min m3/Det	DEBIT Rata-rata m3/Det	Luas DPS (km²)	Luas Genangan (km²)	Keterangan
A2 - 1	Alas - Singkil	Lae Pardomuan										
		Lae Silabuhan	34.00	28.00	25.82	24.39	75.00	2.54	17.55	414.00	56.00	
		Lae Siragian	43.00	45.00	41.49	39.20	92.01	9.91	9.20	217.00	78.00	
		Lae Singkil	120.00	38.00	35.04	33.10	146.00	0.31	51.12	178.12	306.00	
		L. Kuala Baru										
	Total Panjang Sungai		**197.00**									
	Total Panjang Sungai Keseluruhan		**197.00**									

Tabel 2.4
Wilayah Sungai Lintas
Kabupaten/Kota
BWS Sumatera – I PBPS Aceh

No Kode SWS	Nama SWS Sungai	Nama - Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Panjang (Km)	LEBAR Hilir (M)	LEBAR Tengah (M)	LEBAR Hulu (M)	DEBIT Max M3/Det	DEBIT Min M3/Det	DEBIT Rata-rata M3/Det	Luas DPS (KM²)	Luas Genangan (KM²)	Keterangan
B - 1	Krueng Aceh	Kr. Aceh	113.00	60.00	57.00	51.00	85.20	10.38	19.10	1,780.00	2,100.00	
		Kr. Raya	20.80	0.30	19.00	17.00	13.00	0.30	8.20	85.50	124.00	
		Kr. Teungku	25.00	51.00	48.45	43.35	7.95	0.58	5.80	136.70	62.00	
		Kr. Bate										
	Sub Total Panjang Sungai		**158.80**									
B - 2	Pasee - Peusangan	Kr.Pasee	75.00	54.00	51.79	48.55	280.95	42.50	91.12	2,272.00	1,214.00	
		Kr. Peusangan	88.00	58.00	55.62	52.14	809.00	8.09	88.90	1,907.95	1,021.00	
		Kr. Peudada	33.00	60.00	57.54	53.94	116.00	7.34	21.98	1,560.00	512.00	
		Kr. Keureuteu	77.50	68.00	65.21	61.13	408.69	31.00	39.48	931.00	3,741.00	
		Kr. Mane	20.00	78.00	74.80	70.12	119.30	11.90	18.60	486.20	123.00	
		Kr. Geukeuh	31.00	15.00	14.39	13.49	175.25	3.28	17.52	413.80	116.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**324.50**									
B - 3	Tamiang - Langsa	Kr. Tamiang	208.00	150.00	138.00	124.50	671.80	61.00	298.84	4,683.60	3,892.00	
		Kr. Langsa	65.00	54.00	49.68	44.82	33.60	6.41	8.28	210.20	3,654.00	
		Kr. Raya	7.00	110.00	101.20	91.30	56.82	1.07	5.68	134.00	86.00	
		Kr. Telaga Muku	21.00	50.00	46.00	41.50	25.02	0.47	2.50	59.00	51.00	
		Kr. Bayeuen	50.00	250.00	230.00	207.50	154.68	4.12	15.47	364.00	1,425.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**351.00**									
B - 4	Teunom - Lambesoi	Kr. Teunom	130.00	45.00	38.25	37.35	674.60	42.91	192.91	2,413.00	3,860.00	
		Kr. Lambesoi	17.00	62.00	52.70	51.46	117.87	22.40	47.20	320.00	81.00	
		Kr. Bubon	39.00	31.00	26.36	25.73	108.76	4.68	4.68	256.50	206.00	
		Kr. Woyla	125.00	18.00	15.20	14.94	968.54	3.98	3.98	2,284.20	1,121.00	
		Kr. Sabe	25.50	120.00	102.00	99.60	115.70	41.25	49.85	500.70	76.00	
		Kr. Masen	55.00	7.20	6.12	5.98	968.00	16.94	169.45	3,996.20	214.00	
		Kr. Inong	22.30	44.00	37.40	36.52	99.26	0.99	9.93	234.10	131.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**413.80**									
B - 5	Krueng Baru - Kluet	Kr. Baru	23.00	71.00	60.35	58.22	335.00	5.84	16.49	389.00	620.00	
		Kr. Kluet	80.00	85.00	72.25	69.70	448.60	47.90	248.25	2,326.00	3,600.00	
	Sub Total Panjang Sungai		**103.00**									
	Total Panjang Sungai Keseluruhan		**1,351.10**									

2.1.1.5. Penggunaan Lahan

Aceh memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar dan 2 buah danau. Karakteristik lahan di Aceh pada tahun 2009, sebagian besar didominasi oleh hutan, dengan luas 3.523.817 Ha atau 61,42 persen. Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai 691.102 Ha atau 12,06 persen dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah seluas 311.872 Ha atau 5,43 persen dan pertanian tanah kering semusim mencapai 137.672 Ha atau 2.4 persen dan selebihnya lahan pertambangan, industri, perkampungan, perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam lainnya dibawah 5,99 persen.

Tabel 2.5
Jenis Penggunaan Lahan Di Aceh
Tahun 2005 - 2008

No	Penggunaan Lahan	Luas/Area (Ha)			
		2005	2006	2007	2008
1	Perkampungan	112.657	117.545	117.560	117.582
2	Industri	3.869	3.868	3.928	3.928
3	Pertambangan	443	549	115.009	115.049
4	Persawahan	314.141	311.825	311.825	311.849
5	Pertanian tanah kering semusim	117.161	137.617	137.616	137.665
6	Kebun	294.934	305.592	305.577	305.591
7	Perkebunan				
	- Perkebunan Besar	205.551	346.777	627.000	691.050
	- Perkebunan Kecil	367.502	181.632	51.450	51.461
8	Padang (Padang rumput, alang-alang, semak)	223.985	229.762	229.726	229.726
9	Hutan (Lebat, belukar, sejenis)	3.929.420	3.852.599	3.588.135	3.523.925
10	Perairan Darat (kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau, rawa)	132.168	204.352	204.292	204.292
11	Tanah terbuka (tandus, rusak, land clearing)	18.574	44.439	44.439	44.439
12	Lainnya/others	163.152			101.006
Jumlah/Total		**5.883.557**	**5.736.557**	**5.736.557**	**5.837.563**

Sumber : Bappeda Aceh, 2009 (Data diolah)

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Aceh mempunyai beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Secara umum, penetapan Wilayah Pengembangan (WP) di Aceh dikelompokkan berdasarkan posisi geografis, yaitu: (1) Banda Aceh dan sekitar, (2) Pesisir Timur, (3) Pegunungan Tengah, dan (4) Pesisir Barat. Wilayah Pengembangan yang dimaksud memiliki beberapa pusat kegiatan di

wilayah tersebut yang dapat merupakan: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Penetapan PKN dan PKW merupakan kewenangan pemerintah, dan telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sementara PKL ditetapkan dalam RTRW Provinsi, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2008 tentang RTRWN. Penetapan wilayah pengembangan berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)

NO	Wilayah Pengembangan (WP)	Pusat Kegiatan	Kabupaten/Kota yang Tercakup	Luas WP (Ha)
1	2	3	4	5
1	**Banda Aceh dan sekitarnya**			
	WP Basajan *(Banda Aceh-Sabang_Jantho)*	PKNp Banda Aceh PKW/PKSN Sabang PKL Jantho	Kota Banda Aceh Kota Sabang Kab. Aceh Besar	-
2	**Pesisir Timur**			
	WP Timur 1 *(Langsa-Kuala Simpang-Idi Rayeuk)*	PKW Langsa PKL Ka. Simpang-Kr Baru PKL Idi Reyeuk	Kota Langsa Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen	-
	WP Timur 2 *(Lhokseumawe-Bireuen-Lhok Sukon)*	PKN Lhokseumawe PKL Bireuen PKL Lhok Sukon	Kota Lhokseumawe Kab. Bireuen Kab. Aceh Utara	146,900.00
	WP Timur 3 *(Sigli-Meureudu)*	Kab. Pidie Kab. Pidie jaya	Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya	157,050.00
3	**Pegunungan Tengah**			
	WP Tengah 1 *(Takengon-Sp. Tiga Redelong*	PKW Takengon PKL Sp. Tiga Redelong	Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah	140,800.00
	WP Tengah 2 *(Kutacane-Blangkejeren)*	PKL Kutacane PKL Blangkejeren	Kab. Aceh Tengah Kab. Gayo Lues	290,701.32
4	**Pesisir Barat**			
	WP Barat 1 *(Meulaboh-Calang_Suka Mak-mue)*	PKW Meulaboh PKL Calang PKWp Jeuram-Suka Mamue	Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya	351,832.53
	WP Barat 2 *(Tapaktuan-Blangpidie)*	PKL Tapaktuan PKWp Blangpidie	Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Daya	291,650.00
	WP Barat 3 *(Subulussalam-Singkil)*	PKWp Subulussalam PKL Singkil	Kota Subulussalam Kab. Aceh Singkil	84,862.90
	WP Barat 4 *(Sinabang)*	Sinabang	Kab. Simeulue	11.37

Sumber : Bappeda Aceh (RTRWA,), 2010

Demikian juga dengan rencana penetapan kegiatan unggulan pada kawasan budidya lainnya sebagaimana Tabel 2.7

Tabel 2.7
Penetapan Kawasan Unggulan pada Kawasan Budidaya Lainnya
Dalam kawasan andalan Aceh – WP (KAA-WP)

No.	Kawasan Andalan Aceh-WP (KAA-WP)	Kabupaten/Kota Yang Tercakup	Luas KAA-WP (Ha)	Luas Kaw. Lindung (Ha)	Luas Kaw. Bud. Strat.Aceh (Ha)	Luas Kaw. Bud. Lain (Ha)	Kegiatan Unggulan Pada Kaw. Budidaya Lainnya
1.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Basajan** (Banda Aceh-Sabang-Jantho)	Kota Banda Aceh Kota Sabang Kab. Aceh Besar	**308.087,76**	**159.166,60**	**50.919,40**	**62.953,60**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Pertanian - Pariwisata - Industri - Perikanan
2.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Timur 1** (Langsa-Kuala Simpang-Idi Rayeuk)	Kota Langsa Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Timur	**775.022,60**	**432.431,90**	**31.934,04**	**298.155,96**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan
3.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Timur 2** (Lhokseumawe-Bireuen-Lhok Sukon)	Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen	**464.440,37**	**137.762,70**	**52.327,13**	**269.612,87**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Pertanian - Perkebunan - Industri - Perikanan - Pertambangan
4.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Timur 3** (Sigli-Meureudu)	Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya	**411.718,18**	**267.670,09**	**51.376,97**	**65.513,03**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Pertanian - Perkebunan - Industri - Perikanan - Pertambangan
5.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Tengah 1** (Takengon-SpTRedelong)	Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah	**635.804,69**	**459.753,21**	**5.200,00**	**59.930,00**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan
6.	**Kawasan Andalan Provinsi - WP Tengah 2** (Kutacane-Blangkejeren)	Kab. Aceh Tenggara Kab. Gayo Lues	**971.953,52**	**873.350,00**	**35.657,54**	**29.472,46**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Perkebunan - Pariwisata - Pertanian
7.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Barat 1** (Meulaboh-Calang-Suka Mak-mue)	Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya	**1.018.069,37**	**702.493,32**	**31.868,36**	**276.981,64**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Perikanan - Pariwisata - Pertambangan
8.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Barat 2** (Tapaktuan-Blangpidie)	Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Daya	**605.863,89**	**535.690,00**	**21.896,35**	**38.243,65**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Perikanan - Pariwisata
9.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Barat 3** (Subulussalam-Singkil)	Kota Subulussalam Kab. Aceh Singkil	**302.158,51**	**390.073,00**	**7.867,86**	**107.542,14**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Perkebunan - Perikanan - Pariwisata
10.	**Kawasan Andalan Aceh - WP Barat 4** (Sinabang)	Kab. Simeulue	**182.721,93**	**121.752,10**	**3.085,00**	**50.685,00**	- Permukiman Perkotaan - Permumiman Perdesaan - Perkebunan - Perikanan - Pariwisata

Sumber: Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Potensi ancaman bencana di Aceh tidak akan berkurang secara signifikan dalam tahun-tahun ke depan. Mengingat kondisi geografis, geologis, hidrologis dan

demografis Aceh maka diperlukan suatu upaya menyeluruh dalam upaya penanggulangan bencana, baik ketika bencana itu terjadi, sudah terjadi, maupun potensi bencana di masa yang akan datang. Konsekuensi dari kondisi geomorfologis dan klimatologis serta demografis, maka ancaman bahaya (*hazard*) di Aceh mencakup ancaman *geologis, hidro-meteorologis*, serta sosial dan kesehatan.

Secara *geologis*, Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera (*sumatera fault/transform*) yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda yang dikenal dengan Patahan Semangko. Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh adalah wilayah bagian tengah, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Hal ini dapat menyebabkan Aceh mengalami bencana *geologis* yang cukup panjang.

Berdasarkan catatan bencana *geologis, tsunami* pernah terjadi pada tahun 1797, 1891, 1907 dan tanggal 26 Desember tahun 2004 adalah catatan kejadian ekstrim terakhir yang menimbulkan begitu banyak korban jiwa dan harta. Kawasan dengan potensi rawan tsunami yaitu di sepanjang pesisir pantai wilayah Aceh yang berhadapan dengan perairan laut yang potensial mengalami tsunami seperti Samudera Hindia di sebelah barat (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue), perairan Laut Andaman di sebelah utara (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang), dan perairan Selat Malaka di sebelah utara dan timur (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang).

Gempa bumi yang terjadi selama kurun waktu 2007-2010 di Aceh sebanyak 97 kali dengan kekuatan >5 sampai dengan 7,5 Skala Richter. Kejadian diprediksi akan berulang karena Aceh berada diatas tumbukan lempeng dan patahan. Dampak yang ditimbulkan selama kurun waktu tersebut yaitu korban jiwa sebanyak 62 orang, kerusakan harta benda diperkirakan mencapai 25–50 Milyar rupiah, kerusakan sarana dan prasarana 20–40 persen, sedangkan cakupan wilayah yang terkena gempa sekitar 60–80 persen, dan 5 persen berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (terganggunya mata pencaharian). Kabupaten/Kota yang diperkirakan akan terkena dampak adalah: Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Sabang, Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Disamping persoalan pergerakan lempeng tektonik, Aceh juga memiliki sejumlah gunung api aktif yang berpotensi menimbulkan bencana. Khususnya gunung api yang tergolong tipe A (yang pernah mengalami erupsi magmatik sesudah tahun 1600). Di Aceh terdapat 3 gunung api tipe A, yaitu gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah , gunung Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar dan Cot. Simeuregun Jaboi di Sabang.

Potensi bencana gas beracun diindikasikan pada kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi aktif. Dengan demikian kawasan dengan potensi rawan bahaya gas beracun adalah relatif sama dengan kawasan rawan letusan gunung berapi. Kawasan potensi rawan bahatya gas beracun tersebut adalah di Bener Meriah (G. Geureudong dan Bur Ni Telong), Pidie dan Pidie Jaya (G. Peut Sagoe), Aceh Besar (G. Seulawah Agam), dan Sabang (Cot. Simeuregun Jaboi).

Potensi bencana tanah longsor biasa terjadi di sekitar kawasan pegunungan atau bukit dimana dipengaruhi oleh kemiringan lereng yang curam pada tanah yang basah dan bebatuan yang lapuk, curah hujan yang tinggi, gempa bumi atau letusan gunung berapi yang menyebabkan lapisan bumi paling atas dan bebatuan berlapis terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Tanda tanda terjadinya longsor dapat ditandai dengan beberapa parameter antara lain keretakan pada tanah, runtuhnya bagian bagian tanah dalam jumlah besar, perubahan cuaca secara ekstrim dan adanya penurunan kualitas landskap dan ekosistem.

Tanah longsor yang terjadi selama kurun waktu 2007-2009 di Aceh sebanyak 26 kali. Dampak kerusakan harta benda yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 50 – 100 Miliar rupiah, kerusakan sarana dan prasarana 20 – 40 persen, sedangkan cakupan wilayah yang terkena longsor sangat luas 20 – 40 persen, serta berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (terganggunya mata pencarian) sebesar 5 – 10 persen. Bencana tanah longsor yang berdampak pada masyarakat secara langsung adalah pada jalur jalan lintas tengah, yaitu yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, sekitar Takengon di Kabupaten Aceh Tengah, dan di sekitar Tangse – Geumpang Kabupaten Pidie.

Aceh memiliki tingkat kompleksitas *hidro-meteorologis* yang cukup tinggi. Dimensi alam menyebabkan Aceh mengalami hampir semua jenis bencana *hidro-meteorologis* seperti puting beliung, banjir, abrasi dan sedimentasi, badai siklon

tropis serta kekeringan. Puting beliung terjadi di Aceh hampir merata di berbagai daerah terutama terjadi di pesisir yang berhadapan dengan perairan laut yang mengalami angin badai. Berdasarkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya adalah di Aceh Timur, Aceh Utara di pesisir timur dan Aceh Barat di pesisir barat. Namun, dari data kejadian 3 tahun terakhir (2006-2009) terjadi 30 kali bencana puting beliung di 14 kabupaten/kota. Kabupaten Aceh Utara terdata mengalami kejadian tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Banjir hampir merata terjadi di berbagai wilayah Aceh. Namun, dari data kejadian 3 tahun banjir (2006-2009) terjadi 106 kali bencana banjir di 22 dari 23 kabupaten/kota. Elemen berisiko yang rentan ketika terjadi banjir adalah lahan pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa di 22 kabupaten/kota di Aceh, kecuali Kabupaten Simeulue. Kawasan rawan banjir yang peluangnya tinggi dengan hamparan yang relatif luas terdapat di pesisir timur dan utara yang dilalui sungai-sungai yang relatif besar, yaitu di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Selain itu kawasan rawan banjir yang peluangnya tinggi adalah pada hamparan yang merupakan *flood plain* atau limpasan banjir sungai-sungai di pesisir barat, yang terletak di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam, Aceh Singkil, dan juga di tepi Lawe Alas di Aceh Tenggara.

Sumber kerentanan bencana banjir ini berasal dari pembalakan liar (*illegal logging*) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), pendangkalan sungai, rusak atau tersumbatnya saluran drainase, dan terjadinya perubahan fungsi lahan tanpa sistem tatakelola yang baik yang memperhatikan kapasitas DAS dalam menampung air. Kabupaten Aceh Utara mencatat kejadian tertinggi dibandingkan Kabupaten Kota lainnya.

Selain bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, bencana juga dapat disebabkan oleh perilaku manusia antara lain karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat atau disebut bencana sosial. Bencana sosial dapat terjadi dalam bentuk kebakaran, pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri) dan kerusuhan/konflik sosial. Potensi rawan kebakaran seperti kebakaran hutan terjadi pada hutan-hutan yang dilalui jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia, terutama pada kawasan hutan pinus dan lahan gambut yang cenderung mudah mengalami kebakaran pada musim kemarau. Indikasi potensi rawan kebakaran

hutan tersebut adalah di Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, dan Aceh Tengah.

Bencana sosial dapat juga muncul sebagai akibat bencana alam, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia dalam memandang dan memanfaatkan sumberdaya alam (faktor *antropogenik*). Kejadian bencana sosial yang menonjol di Aceh adalah konflik yang berlatar belakang ideologi dan ekonomi, serta Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti penyakit menular dan atau tidak menular yang dipicu oleh perilaku manusia itu sendiri.

Isu bencana yang diuraikan di atas masih belum diantisipasi secara baik. Lokasi-lokasi rawan bencana yang disajikan dalam bentuk peta risiko bencana Aceh seperti peta risiko gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, angin puting beliung dan kekeringan dengan skala 1:50.000 masih dalam tahap proses penyelesaian yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2011. Peta risiko bencana tersebut dibuat dengan skala 1:50.000 sehingga masih perlu didetilkan lagi dengan skala 1: 5000 dan disosialisasikan ke masyarakat, khususnya yang berdomisili pada daerah risiko bencana. Sementara itu, beberapa peta risiko bencana lainnya seperti peta risiko banjir, longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan masih belum ada. Demikian juga dengan *building code* untuk daerah risiko gempa masih belum sempurna sehingga belum dapat disosialisasikan ke seluruh kabupaten/kota.

Bencana yang muncul dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur publik dan aset masyarakat. Merehabilitasi dan merekonstruksi infrastruktur yang rusak memerlukan dukungan rekayasa industri yang berbasis komoditas dan kemampuan lokal. Beberapa lokasi yang berada pada zonasi aman direncanakan sebagai kawasan pengembangan seperti kawasan agro-industri yang tidak hanya menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah, tetapi juga dapat mendukung proses penanganan pasca bencana.

Bencana lain dapat juga diakibatkan oleh kelalaian manusia (*man-made disaster*) akibat dari tidak sesuainya perencanaan dan implementasi suatu industri pengolahan sumberdaya alam, sehingga diperlukan suatu penelitian yang berkesinambungan dengan melibatkan multi-displin dan multi-sektoral untuk mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap dampak bencana.

2.1.4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Konflik berkepanjangan dan bencana gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 telah menempatkan Aceh pada jurang ketertinggalan yang jauh dan Aceh kembali ketitik nol. Akibat konflik ekonomi Aceh menjadi tersendat, Aceh menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang terus-menerus mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah atau negatif. Bencana alam melengkapi penderitaan dengan banyaknya korban nyawa selain kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial pada skala masif. Wilayah pesisir sepanjang tidak kurang dari 800 km, dari Kabupaten Singkil ke selatan, memutar ke Banda Aceh di utara hingga ke Aceh Timur terkena dampak bencana.

Pemerintah segera menanggapi dengan mengambil langkah-langkah yang konkrit dan dipandang perlu untuk menangani dampak bencana dan meringankan beban persoalan. Diantaranya, ditetapkan Bencana ini sebagai bencana Nasional dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi bantuan Internasional, secara paralel mendorong tercapainya perjanjian damai dan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan butir-butir kesepakatan, termasuk penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah koordinasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) secara penuh, dan mendorong pembentukan Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA).

Setelah 4 tahun BRR NAD-Nias melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005. BRR NAD-Niasa menyelesaikan tugasnya secara resmi pada 16 April 2009. Secara keseluruhan capaian BRR NAD-Nias hingga akhir masa tugasnya adalah 94,7 persen dari *Key Performance Indicator*s (KPI) yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, agar kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pascabencana dilakukan secara terkoordinasi, dibentuklah Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;

Dalam rangka menindaklanjuti amanah Perpres tersebut pada tanggal 8 April 2009 Gubernur Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Kesinambungan dan Rekonstruksi Aceh dan berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2009. Tugas utama BKRA adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh yang dilaksanakan oleh kementrian/lembaga, Pemerintah Aceh, Lembaga/Perorangan Nasional dan/atau Asing di wilayah Aceh. Secara umum capaian selama 4 tahun dari kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Capaian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Dampak Bencana	Capaian 4 Tahun RR
1	2	3
1	635.384 orang kehilangan tempat tinggal	
2	127.720 orang meninggal dan 93.285 orang hilang	
3	104.500 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lumpuh	155.182 tenaga kerja terlatih, 195.726 UKM menerima bantuan
4	139.195 rumah rusak atau hancur	140.304 rumah permanen dibangun
5	73.869 hektare lahan pertanian hancur	69.979 hektare lahan pertanian direhabilitasi
6	1.927 guru meninggal	39.663 guru dilatih
7	13.828 kapal nelayan hancur	7.109 kapal nelayan dibangun atau dibagikan
8	1.089 sarana ibadah rusak	3.781 sarana ibadah dibangun atau diperbaiki
9	2.618 kilometer jalan rusak	3.696 kilometer jalan dibangun
10	3.415 sekolah rusak	1.759 sekolah dibangun
11	517 sarana kesehatan rusak	1.115 sarana kesehatan dibangun
12	669 bangunan pemerintah rusak	996 bangunan pemerintah dibangun
13	119 jembatan rusak	363 jembatan dibangun
14	22 pelabuhan rusak	23 pelabuhan dibangun
15	8 bandara atau *airstrip* rusak	13 bandara atau *airstrip* dibangun

Sumber: Buku 1 Rencana Aksi Kesinambungan Rekontruksi 2010/2012, (2010)

Meskipun capaian RR dan efek pengganda kegiatan-kegiatannya telah mengantarkan perekonomian Aceh lebih maju dari situasi pasca bencana, beberapa indikasi ketertinggalan masih terlihat, yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dua indikator ekonomi makro tersebut memberikan sinyal yang kuat bahwa meskipun sejumlah perbaikan dirasakan akibat kegiatan RR, namun kemajuan dimaksud belumlah mampu menutupi ketertinggalan selama masa konflik 3 dekade. Hal lain yang juga penting adalah kemajuan yang kini diraih dinilai tidaklah berkelanjutan. Sektor-sektor pendorong pertumbuhan, yaitu sektor konstruksi, transportasi dan jasa, yang berjaya selama masa RR, menurun tajam kegiatannya pasca 2008 (*World Bank*, 2008).

2.1.5. Demografi

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2009 adalah 4.363.477 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala keluarga/rumah tangga. Laju pertumbuhan penduduk Aceh selama 5 tahun (2006-2009) terakhir sebesar 1,66 persen. Kota Sabang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh yakni sebesar 0,10 persen, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Aceh Jaya yakni sebesar 7,90 persen. Sebaran penduduk di wilayah aceh masih belum merata. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara (532.535 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (29.184 jiwa) seperti yang disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Aceh
Tahun 2006 - 2009

No	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	Rata-rata Pertumbuhan Penduduk pertahun
1	Simeulue	80,380	81,127	81,790	82,344	0.81
2	Aceh Singkil	92,605	94,961	100,265	102,505	3.44
3	Aceh Selatan	202,080	209,853	210,111	215,315	2.14
4	Aceh Tenggara	173,056	174,371	175,501	177,024	0.76
5	Aceh Timur	311,413	313,333	332,915	340,728	3.04
6	Aceh Tengah	166,895	170,766	182,533	189,298	4.29
7	Aceh Barat	151,552	152,557	153,398	158,499	1.51
8	Aceh Besar	304,303	307,362	310,107	312,762	0.92
9	Pidie	365,813	373,234	380,382	386,053	1.81
10	Bireuen	354,027	355,989	357,564	359,032	0.47
11	Aceh Utara	506,002	510,494	517,741	532,537	1.72
12	Aceh Barat Daya	119,397	121,302	123,101	124,813	1.49
13	Gayo Lues	73,752	74,312	74,794	75,165	0.63
14	Aceh Tamiang	239,260	239,451	239,899	241,734	0.34
15	Nagan Raya	123,984	124,141	124,340	125,425	0.39
16	Aceh Jaya	65,996	70,673	75,597	82,904	7.90
17	Bener Meriah	109,429	111,040	112,549	114,464	1.51
18	Pidie Jaya	125,892	128,446	130,906	135,345	2.44
19	Banda Aceh	199,241	219,659	217,918	212,241	2.13
20	Sabang	29,098	29,144	29,221	29,184	0.10
21	Langsa	139,893	140,005	140,267	140,415	0.12
22	Lhokseumawe	157,635	158,169	158,760	159,239	0.34
23	Subulussalam	61,870	63,444	64,256	66,451	2.41
Total		**4,153,573**	**4,223,833**	**4,293,915**	**4,363,477**	1.66

2.2. Syariat Islam dan Sosial Budaya

2.2.1. Syariat Islam

Sejak tahun 2001, Aceh telah mendeklarasikan pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak pemberlakuan syariat Islam secara legal formal, beberapa instrumen pelaksanaan telah dilengkapi seperti pendirian beberapa lembaga/dinas/badan dan pemberlakuan Qanun Aceh. Dalam rangka penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh telah dibentuk antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Mahkamah Syar'iyah, Baitul Maal, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Dari sisi peraturan pada tahun 2002 telah disahkan Qanun Provinsi Nangroe

Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Pada tahun 2003 Pemerintah Aceh juga telah mengesahkan 4 Qanun Aceh berkaitan dengan penyelenggaraan syariat Islam, yakni Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya; Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Dalam pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama di Aceh, mulanya dilaksanakan secara tradisional, yaitu zakat hanya dipahami terbatas pada zakat fitrah, zakat maal terbatas pada zakat hasil tanaman makanan pokok (zakat padi) dan sedikit zakat perniagaan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang zakat, maka pada tahun 1973 pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Penertiban Harta Agama, pada tahun 1975 pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Harta Agama, tahun 1993 pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadakah. Sejak tahun 2003 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Maal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Baitul Maal dalam pengelolaan zakat, maka Pemerintah Aceh pada awalnya telah menetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat, selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab serta sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Maal yang diatur dengan Qanun Aceh, Qanun tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Maal. Lembaga ini mempunyai fungsi dan kewenangan mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama; melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan

harta agama lainnya; menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum; menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dengan hadirnya lembaga Baitul Maal ini, penerimaan zakat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,87 persen dalam 3 tahun terakhir. Walaupun terjadi peningkatan, namun nominal zakat yang diterima atau dipercayakan kepada Baitul Mal Aceh masih relatif kecil dari potensi zakat di Aceh. Hal ini disebabkan karena hanya segmen Pegawai Negeri Sipil (zakat profesi) yang tergarap, sedangkan dari jenis zakat dan sumber profesi lainnya belum optimal penerimaannya.

Kedudukan Ulama dalam Pemerintahan Aceh menempati posisi yang penting dan strategis. MPU yang merupakan representasi dari alim ulama dan cendikiawan muslim Aceh disejajarkan kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). MPU merupakan badan yang bersifat independen berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami. Fatwa yang ditetapkan oleh lembaga ulama ini menjadi rujukan pengambilan kebijakan Pemerintah Aceh.

Beberapa kendala masih dirasakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah dan madrasah) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum. Pada sisi lain derasnya arus globalisasi memungkinkan terjadinya infiltrasi budaya asing yang negatif dan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan Syariat Islam, sehingga mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah negatif.

2.2.2. Sosial Budaya

Aceh memiliki tiga belas suku, yaitu Aceh (mayoritas), Tamiang (Aceh Timur Bagian Timur), Alas (Aceh Tenggara), Aneuk Jamee (Aceh Selatan), Naeuk Laot, Semeulu dan Sinabang (Semeulue), Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues), Pakpak, Lekon, Haloban dan Singkil (Aceh Singkil), Kluet (Aceh Selatan), Masing-masing suku mempunyai budaya, bahasa dan pola pikir masing-masing.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), "*Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut*", yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu "*Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana*". Dalam kontek kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prisip otorianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan

atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, perempuan dan lanjut usia, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, serta bencana sosial. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin yang tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan.

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Aceh, akan tetapi sudah menjadi persoalan Bangsa Indonesia dan negara-negara lain. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Aceh, selain disebabkan oleh ekses negatif pembangunan dan konflik sosial yang berkepanjangan, juga disebabkan oleh faktor bencana alam yang sering terjadi di Aceh.

Masalah kesejahteraan sosial juga meliputi Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Di Aceh, populasi komunitas adat terpencil yang belum ditangani berjumlah 9.705 KK, yang sedang diberdayakan 254 KK dan yang sudah diberdayakan sebanyak 2.493 KK. Lokasi populasi KAT tersebar di 14 kabupaten, yaitu: Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil dan Simelue. Populasi terbesar terdapat di Singkil (2.818 KK), Aceh Selatan (1.263 KK) dan Simelue (1.044 KK). Selain itu, populasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Aceh berjumlah 42.767 jiwa dan yang telah ditangani sejak tahun 2006 berjumlah 7.200 jiwa.

Populasi penyandang cacat di Aceh mencapai 27.710 jiwa, dan diantaranya sebanyak 4.289 jiwa adalah para penyandang cacat eks kusta. Penyebaran populasi penyandang cacat terdapat diseluruh wilayah kabupaten/ kota, baik cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu-wicara dan cacat ganda. Dari seluruh populasi penyandang cacat hanya 1.106 orang yang mendapatkan pelayanan atau santunan.

Populasi penyandang masalah ketunaan (tuna sosial) yang meliputi: gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana dan penderita HIV/AIDS di Aceh. Menurut data populasi PMKS yang terdapat pada Dinas Sosial Aceh

sampai dengan akhir tahun 2009, terdapat 1.884 jiwa gelandangan dan pengemis, 1.156 jiwa bekas narapidana dan 320 jiwa tuna susila. Selain itu, sampai akhir tahun 2009 tercatat lebih dari 100 ribu jiwa anak mengalami permasalahan sosial, diantaranya terdapat 83.114 jiwa anak terlantar, 1.823 jiwa anak nakal, anak jalanan sebanyak 590 jiwa dan selebihnya mengalami kekerasan, eksploitasi dan *trafficking*. Begitu juga dengan populasi para lanjut usia terlantar yang mencapai 13.649 jiwa dan kondisi ini mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Dinas Sosial Aceh tahun 2008 juga mencatat 7.160 anak yang berada di panti.

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir (2005-2009), nilai Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Aceh yang dihitung atas harga konstan mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Pasca tsunami, ekonomi Aceh sempat terpuruk sampai ke tingkat yang sangat memprihatinkan. PDRB Aceh pada tahun 2005 hanya mencapai Rp 36,29 triliun atau turun 10,12 persen dari tahun sebelumnya. Lima dari sembilan sektor ekonomi yang membentuk struktur PDRB mengalami kontraksi yang besar yaitu pertanian turun 3,89 persen, pertambangan dan penggalian turun tajam sampai 22,62 persen, demikian juga industri pengolahan jatuh 22,30 persen, konstruksi turun 16,14 persen, serta sektor jasa turun 9,53 persen. Perkembangan nilai PDRB Aceh dalam lima tahun terakhir secara berturut-turut adalah sebesar 36.29 triliun rupiah (2005), 36.85 triliun rupiah (2006), 35.98 triliun rupiah (2007), 34.09 triliun rupiah (2008) dan 32.18 triliun rupiah (2009).

Berdasarkan persentase pertumbuhan PDRB, secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi Aceh (dengan Migas) adalah -10,12 persen (2005), 1,56 persen (2006), -2,36 persen (2007), -5,27 persen (2008) dan -5,58 persen (2009). Sedangkan nasional secara berturut-turut adalah 6,60 persen (2005); 6,10 persen (2006); 6,90 persen (2007); 6,50 persen (2008); dan 4,20 persen (2009). Semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh selama kurun waktu tersebut terutama akibat semakin menurunnya kontribusi sub sektor migas. Sebagaimana diketahui bahwa selama hampir 30 tahun terakhir struktur ekonomi Aceh didominasi oleh sub sektor migas sehingga perubahan sumbangan

sektor ini memberi pengaruh signifikan terhadap nilai PDRB Aceh secara keseluruhan.

Tanpa memperhitungkan sumbangan sub sektor migas, PDRB Aceh terus mengalami peningkatan namun besaran pertumbuhannya sangat fluktuatif. Pada tahun 2005 PDRB Non Migas Aceh tumbuh hanya sebesar 1,22 persen, selanjutnya secara berturut-turut 7,72 persen (2006), 7,02 persen (2007), 1,89 persen (2008) dan 3,92 persen (2009). Sejak tahun 2006, seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif setelah sempat terpuruk di tahun 2005 akibat bencana Tsunami. Dalam kurun waktu tersebut, sektor Pertanian yang merupakan sektor dominan (kontribusi rata-rata 33 persen) setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 3,60 persen, pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada sub sektor perkebunan yang diikuti oleh tanaman pangan dan perikanan. Sedangkan sektor lainnya seperti Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi disamping mengalami pertumbuhan yang signifikan, kontribusinya juga mengalami peningkatan. Akan tetapi sektor-sektor tersebut kontribusinya masih relatif kecil terhadap PDRB yaitu masih dibawah 15 persen.

Pertumbuhan ekonomi non migas terutama didorong oleh aktifitas rehabilitasi dan rekonstruksi dan kondisi keamanan yang semakin kondusif pasca MoU Helsinki. Selama periode tersebut tingginya anggaran pembangunan di Aceh dari berbagai sumber ikut memberi peran positif terhadap pertumbuhan ekonomi non migas.

2.3.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi yang terjadi di Aceh selama periode 2005-2009 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, setelah mengalami lonjakan yang tinggi pada tahun 2005 akibat bencana tsunami. Pada tahun 2005 laju inflasi yang terjadi di Aceh yang diamati di dua kota yaitu Banda Aceh dan Lhokseumawe. Laju inflasi di Banda Aceh sebesar 41,11 persen sedangkan di Lhokseumawe sebesar 17,57 persen. Selanjutnya secara berturut-turut laju inflasi di Banda Aceh sebesar 9,54 persen (2006), 11,00 persen (2007), 10,27 persen (2008) dan 3,50 persen (2009). Sedangkan di Kota Lhokseumawe secara berturut-turut sebesar 11,47 persen (2006), 4,18 persen (2007), 13,78 persen (2008) dan 3,96 persen (2009). Sejak 2007 perbedaan laju inflasi antara Aceh dan nasional semakin mengecil, kondisi

nasional secara berturut-turut sebesar 17,11 persen (2005), 6,60 persen (2006), 6,59 persen (2007), 11,06 persen (2008) dan 2,78 persen (2009).

2.3.1.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk dihitung berdasarkan PDRB dibagi dengan jumlah total penduduk. PDRB perkapita 2005-2008 dengan Migas atas dasar harga konstan menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2005 PDRB perkapita 9.000.897,66 rupiah per jiwa, 8.872.811,43 rupiah per jiwa (2006), 8.519.060,77 rupiah per jiwa (2007) dan 7.938.091,46 rupiah per jiwa (2008) sedangkan PDRB perkapita atas harga konstan tanpa migas (non-migas) pada tahun 2005 sebesar 5.588.811,26 rupiah per jiwa, 5.842.632,36 rupiah per jiwa (2006), 6.160.802,29 rupiah per jiwa (2007) dan 6.173.990,40 rupiah per jiwa (2008). Terjadinya penurunan PDRB dengan migas disebabkan menurunnya pendapatan dari migas Aceh sebagai akibat menurunnya cadangan deposit migas. Pendapatan perkapita non-migas cenderung meningkat disebabkan oleh besarnya kontribusi sektor-sektor non-migas terutama sektor pertanian, pada tahun 2005 sebesar 21,37 persen, 21,36 persen (2006), 22,67 persen (2007) dan 24,13 persen (2008).

2.3.1.4. Ketimpangan Pendapatan

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan mengevaluasi Rasio Gini yang memiliki kisaran nilai 0 - 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan sempurna dan sebaliknya jika bernilai satu berarti ketimpangan sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Rasio gini Aceh pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 0,27, meningkat menjadi 0,29 tahun 2009. Meskipun terjadi peningkatan nilai ketimpangan pendapatan masyarakat, namun nilai tersebut masih dalam kelompok tingkat ketimpangan rendah.

2.3.1.5. Pemerataan Pendapatan

Berdasarkan kriteria *World Bank,* menyebutkan bahwa proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk katagori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikatagorikan ketimpangan

pendapatan rendah. Sementara itu, distribusi pendapatan penduduk Aceh untuk tahun 2007 pada kelas 40% terendah sebesar 22,63 persen, kelas 40% menengah sebesar 39,38 persen dan kelas 20% tinggi sebesar 37,99 persen. Sedangkan pada tahun 2008 distribusi pendapatan penduduk pada kelas 40% terendah sebesar 22,64 persen, kelas 40% menengah sebesar 38,68 persen dan kelas 20% tinggi sebesar 38,68 persen (BPS, 2009). Dengan demikian maka Aceh termasuk ke dalam katagori ketimpangan Pendapatan Rendah.

2.3.1.6. Ketimpangan Regional

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dalam pemerataan antar daerah maka dapat digunakan indicator pemerataan yaitu *Indeks Williamson* (IW). Nilai *IW* lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah, semakin besar indeks yang dihasilkan semakin besar tingkat kesenjangan antar wilayah.

Hasil evaluasi nilai PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Aceh menunjukkan bahwa nilai *IW* Aceh yang dievaluasi dengan PDRB perkapita migas pada tahun 2007 sebesar 2,27 yang menurun menjadi 2,20 pada tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan indeks disparitas antar wilayah masih relatif kecil. Selanjutnya *IW* provinsi Aceh yang dievaluasi dengan PDRB perkapita non-migas pada tahun 2007 sebesar 1,29 menurun menjadi 1,20 pada tahun 2008. *Indeks Williamson* yang dihitung dengan PDRB perkapita migas menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari nilai *IW* PDRB perkapita non migas. Hal ini menggambarkan bahwa beberapa kabupaten/kota (seperti Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur) memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan nilai *IW*.

Sementara itu, Depkeu (2010) melaporkan bahwa *IW* Indonesia pada tahun 2007 sebesar 0,49 dan sebesar 0,48 pada tahun 2008. Data di atas menunjukkan bahwa nilai *IW* Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan nilai *IW* Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan antar kabupaten/kota di Aceh menurut ukuran PDRB perkapita penduduk.

2.3.2. Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1. Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Menurut BPS (2009) angka melek huruf di Aceh (2005-2009) mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 93,98 persen dan meningkat menjadi 96,39 persen pada tahun 2009. Jika dibandingkan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan terlihat bahwa masih ada ketimpangan pendidikan yaitu sebesar 98,93 persen di daerah perkotaan dan 95,33 persen di daerah perdesaan pada tahun 2009.

Tabel 2.10
Angka Melek Huruf Dewasa Di Aceh
Tahun 2005 dan 2009

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Simeulue	95.08	98.30	97.44	98.17	99.18
2	Aceh Singkil	89.66	88.86	85.88	90.71	93.91
3	Aceh Selatan	92.10	90.84	89.82	93.67	95.02
4	Aceh Tenggara	92.68	95.32	95.89	97.27	96.63
5	Aceh Timur	93.93	97.00	95.69	97.35	97.51
6	Aceh Tengah	96.74	96.84	96.97	98.08	97.48
7	Aceh Barat	91.57	86.82	94.06	93.60	93.05
8	Aceh Besar	96.15	93.10	94.63	96.44	93.98
9	Pidie	93.46	91.93	93.55	95.51	94.29
10	Bireuen	97.54	98.34	95.87	98.09	97.59
11	Aceh Utara	93.74	96.04	94.72	95.12	97.69
12	Aceh Barat Daya	90.40	91.47	93.14	96.22	94.43
13	Gayo Lues	82.12	83.65	77.65	84.41	94.04
14	Aceh Tamiang	93.41	95.46	97.04	97.87	98.25
15	Nagan Raya	85.76	83.45	89.60	88.59	93.58
16	Aceh Jaya	89.36	91.06	91.78	93.73	93.31
17	Bener Meriah	96.24	95.56	97.19	97.06	98.61
18	Pidie Jaya			92.56	93.83	92.93
19	Banda Aceh	99.05	98.56	98.09	98.95	99.10
20	Sabang	97.45	97.82	98.26	98.78	98.26
21	Langsa	97.01	98.47	98.75	98.57	99.10
22	Lhokseumawe	96.11	98.82	98.06	98.42	99.63
23	Subulussalam			89.41	91.36	96.13
Total		**93.98**	**94.27**	**94.51**	**95.94**	**96.39**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Menurut jenis kelamin angka melek huruf penduduk laki-laki masih tetap lebih tinggi dari pada peduduk perempuan masing-masing sebesar 97,95 persen dan 94,99 persen. Di daerah perkotaan kesenjangan angka melek huruf antara

penduduk laki-laki dan perempuan lebih kecil yaitu sebesar 0,79 persen, sedangkan di daerah perdesaan lebih besar yaitu sebesar 3,83 persen.

B. Angka Rata-rata Lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Aceh (2005-2009) mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 8,4 tahun menjadi 8,63 tahun pada tahun 2009. Pada tahun 2009 Kabupaten/Kota yang memiliki angka rata-rata lama sekolah terendah adalah Aceh Singkil sebesar 7,74 tahun dan yang tertinggi Kota Banda Aceh sebesar 11,91 tahun (Tabel 2.11).

Tabel 2.11
Angka Rata-rata Lama Sekolah Di Aceh (dalam tahun)
Tahun 2005 - 2009

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Simeulue	6.10	6.20	7.60	8.00	8.30
2	Aceh Singkil	7.70	7.70	7.70	7.70	7.74
3	Aceh Selatan	8.20	8.20	8.20	8.20	8.28
4	Aceh Tenggara	9.30	9.30	9.30	9.30	9.34
5	Aceh Timur	8.30	8.40	8.40	8.40	8.49
6	Aceh Tengah	9.00	9.00	9.27	9.29	9.44
7	Aceh Barat	8.20	8.20	8.20	8.20	8.23
8	Aceh Besar	9.40	9.40	9.48	9.48	9.51
9	Pidie	8.50	8.60	8.60	8.60	8.65
10	Bireuen	9.10	9.20	9.20	9.20	9.23
11	Aceh Utara	9.00	9.10	9.10	9.10	9.12
12	Aceh Barat Daya	7.40	7.50	7.50	7.50	7.63
13	Gayo Lues	8.60	8.70	8.70	8.70	8.71
14	Aceh Tamiang	8.30	8.40	8.40	8.40	8.77
15	Nagan Raya	6.40	6.70	7.32	7.32	7.34
16	Aceh Jaya	8.70	8.70	8.70	8.70	8.71
17	Bener Meriah	8.00	8.10	8.49	8.49	8.53
18	Pidie Jaya		8.00	8.00	8.00	8.38
19	Banda Aceh	11.20	11.20	11.86	11.86	11.91
20	Sabang	9.50	9.60	10.13	10.23	10.36
21	Langsa	9.30	9.40	9.70	9.88	10.04
22	Lhokseumawe	9.70	9.70	9.70	9.70	9.91
23	Subulussalam		7.50	7.50	7.50	7.58
Total		**8.40**	**8.50**	**8.50**	**8.50**	**8.63**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

C. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Pembangunan pendidikan Aceh telah menghasilkan beberapa kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan dasar, hal ini terlihat dari beberapa indikator-indikator, seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM dan APK secara umum mengalami peningkatan untuk periode 2007 sampai 2009.

Angka Partisipasi Murni (APM) Aceh untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2007 sebesar 94,66 persen meningkat menjadi 95,50 persen pada tahun

2009. Untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B, pada tahun 2007 sebesar 86,62 persen meningkat menjadi 92,59 persen pada tahun 2009. Demikian juga untuk tingkat SMA/MA/SMK/SMALB/Paket mengalami peningkatan, pada tahun 2007 sebesar 65,92 persen menjadi 70,26 pada tahun 2009 (Tabel 2.12). Selain itu, diperkirakan terdapat 2,85 persen siswa kelompok usia sekolah dasar yang belajar pada pendidikan non formal dan Dayah tradisional.

Tabel 2.12
Angka Partisipasi Murini dan Angka Partisipasi Kasar
Tahun 2007 – 2009

Indikator Akses		Capaian 2007-2009 (%)		
		2007	2008	2009
A. Angka Partisipasi Murni (APM) :				
1	SD/MI/Paket A	94,66	95,06	95,50
2	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	86,52	89,49	92,59
3	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	65,92	68,50	70,26
B. Angka Partisipasi Kasar (APK) :				
1	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	96,59	97,16	101,28
2	SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	72,06	73,60	74,75
3	Perguruan Tinggi	19,00	19,15	19,40

Sumber: Dinas Pendidikan, 2010

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2007 untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 96,59 persen meningkat menjadi 101,28 persen pada tahun 2009. APK untuk tingkat SMA/MA/SMK/SMALB/Paket mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebesar 72,06 persen menjadi 74,75 pada tahun 2009. Demikian juga APK untuk tingkat Perguruan Tinggi pada tahun 2007 sebesar 19,00 persen meningkat menjadi 19,40 persen pada tahun 2009.

D. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data statistik kependudukan tahun 2008, komposisi penduduk Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut 24,20 persen tidak/belum tamat SD/sederajat, sebesar 26,84 persen menamatkan SD/sederajat, 21,05 persen tamat SLTP/sederajat, 21,65 persen telah menamatkan SLTA/sederajat, 2,82 persen telah menamatkan D-I/II/III, 3,27 persen menamatkan D-IV/S1 dan 0,17 persen menamatkan S2/S3.

Berdasarkan tempat tinggal, penduduk perdesaan yang menamatkan SD/sederajat sebesar 29,71 persen, SLTP/sederajat 22,28 persen,

SLTA/sederajat 17,33 persen, D-I/II/III 2,42 persen, D-IV/S1 1,74 persen dan S2/S3 0,05 persen. Sementara itu, penduduk perkotaan yang menamatkan SD/sederajat sebesar 18,28 persen, SLTP/sederajat 20,11 persen, SLTA/sederajat 35,90 persen, D-I/II/III 4,97 persen, D-IV/S1 7,48 persen dan S2/S3 0,49 persen.

2.3.2.2. Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi (AKB) Aceh mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 35/1.000 Kelahiran Hidup (KH) menjadi 16/1.000 KH pada tahun 2009 (BPS, 2010). Penyebab utama kematian bayi adalah *asfiksia*, berat badan lahir rendah, infeksi dan lainnya. Kematian bayi diduga lebih banyak terjadi di pedesaan, pada ibu yang berpendidikan rendah, dan masyarakat miskin. Tantangan utama dalam penurunan kematian bayi adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pusat pelayanan kesehatan, ketersediaan sumberdaya kesehatan yang memadai dan kualitas pelayanan.

Kematian bayi berhubungan juga dengan cakupan imunisasi. Secara umum cakupan imunisasi yang telah dicapai Aceh menurut Riskesdas adalah BCG 75,2 persen, Polio 66,2 persen, DPT 58,3 persen, HB3 54,3 persen dan campak 71,4 persen. Cakupan imunisasi BCG, Polio 3, DPT 3, Hepatitis B 3 dan Campak pada anak usia 12-59 bulan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan, antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang menyolok walaupun sedikit lebih tinggi pada perempuan (Riskesdas, 2007).

Secara umum persentase cakupan imunisasi dasar yang telah dicapai secara lengkap di Aceh sebesar 32,9 persen, tidak lengkap 53,2 persen dan tidak sama sekali 13,9 persen. Cakupan imunisasi lengkap di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, dan antara laki-laki dan perempuan mempunyai persentase yang hampir sama. Perbedaan cakupan imunisasi antara kabupaten/kota dikarenakan perbedaan kemampuan dari tiap daerah seperti SDM kesehatan, kurangnya kegiatan untuk menjangkau masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya anggaran operasional, persediaan vaksin yang kurang tepat waktu, keterbatasan vaksin tiap daerah, *cold chain* yang sudah tua, dan masih rendahnya peran serta masyarakat.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Aceh pada tahun 2008 sebesar 238/100.000 dan AKI Nasional 228/100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Penyebab utama kematian ibu adalah pendarahan, eklamsia, infeksi, abortus, partus lama, dan lainnya.

B. Angka Usia Harapan Hidup

Salah satu indikator utama untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang juga merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2008 UHH Aceh adalah 68,5 tahun. Secara nasional, UHH Aceh menempati urutan ke-19 (RPJP Kesehatan 2005-2025, 2009). Sedangkan secara internal Aceh, masih terdapat disparitas pencapaian UHH yaitu yang tertinggi di Kabupaten Bireuen mencapai 72,28 tahun dan yang terendah di Kabupaten Simeulue mencapai 62,84 tahun (Profil Kesehatan Aceh, 2009).

Selama periode 2007-2009 angka harapan hidup di Aceh mengalami peningkatan yaitu dari 68,4 menjadi 68,6. Hal ini menggamba bahwa anak yang lahir pada tahun 2008 diperkirakan akan mampu bertahan hidup rata-rata sampai berumur 68,4 tahun dan tahun 2009 terjadi peningkatan menjadi 68,6 tahun, berarti derajat kesehatan masyarakat di Aceh mengalami peningkatan (Tabel 2.13).

Tabel 2.13
Angka Harapan Hidup Di Aceh
Tahun 2005 - 2008

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Simeulue	62.50	62.70	62.75	62.84	62.91
2	Aceh Singkil	63.20	64.00	64.27	64.46	64.69
3	Aceh Selatan	65.70	66.50	66.61	66.71	66.82
4	Aceh Tenggara	68.90	69.10	69.11	69.16	69.19
5	Aceh Timur	69.10	69.30	69.41	69.52	69.63
6	Aceh Tengah	69.10	69.20	69.31	69.42	69.53
7	Aceh Barat	68.90	69.60	69.69	69.78	69.87
8	Aceh Besar	70.00	70.30	70.42	70.52	70.64
9	Pidie	68.40	68.70	68.94	69.11	69.32
10	Bireuen	72.20	72.20	72.22	72.28	72.32
11	Aceh Utara	69.10	69.30	69.41	69.52	69.63
12	Aceh Barat Daya	65.40	66.00	66.30	66.49	66.74
13	Gayo Lues	66.20	66.60	66.73	66.84	66.96
14	Aceh Tamiang	67.80	68.00	68.09	68.18	68.27
15	Nagan Raya	69.10	69.20	69.31	69.42	69.53
16	Aceh Jaya	67.00	67.80	67.84	67.91	67.97
17	Bener Meriah	66.40	67.20	67.31	67.41	67.52
18	Pidie Jaya		68.80	68.91	69.02	69.13
19	Banda Aceh	68.70	69.60	69.99	70.24	70.56
20	Sabang	69.60	69.70	70.10	70.36	70.69
21	Langsa	68.90	69.70	69.96	70.14	70.36
22	Lhokseumawe	68.40	69.20	69.70	70.00	70.41
23	Subulussalam		65.20	65.40	65.54	65.71
Total		**68.00**	**68.30**	**68.40**	**68.50**	**68.60**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Angka prevalensi balita menurut status gizi didasarkan pada indikator Tinggi Badan per Usia (TB/U). Prevalensi masalah balita yang pendek secara provinsi masih tinggi yaitu sebesar 44,6 persen. Selanjutnya, indikator lainnya untuk menentukan anak harus dirawat dalam manajemen gizi buruk adalah indikator sangat kurus. Prevalensi balita sangat kurus menurut provinsi masih cukup tinggi yaitu 9,2 persen. Secara umum, prevalensi balita kurus+sangat kurus di Aceh adalah 18,3 persen, dan sudah berada di bawah batas kondisi yang dianggap serius menurut indikator status gizi Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB) yaitu 10 persen. Sedangkan prevalensi kegemukan di Aceh menurut indikator BB/TB adalah sebesar 15,2 persen. Status gizi BB/U balita ditinjau dari kelompok usia, maka terlihat bahwa prevalensi balita gizi kurang+buruk di Aceh sudah tinggi pada semua kelompok usia dan meningkat menjadi lebih tinggi mulai usia 24 bulan, kemudian menurun kembali pada kelompok usia di atas 36 bulan.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif juga memberikan pengaruh bagi tumbuh kembang anak. Sebesar 35,7 persen bayi baru lahir diberikan Inisiasi Menyusu Dini setelah melahirkan dan 28,3 persen diberikan ASI dalam jam pertama kelahiran. Namun, terdapat 60,4 persen bayi baru lahir yang diberikan selain ASI (DHS, 2008). Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebesar 10.39 persen (Profil kesehatan Aceh, 2009).

D. Angka Kesakitan

Di sisi status kesakitan di Aceh, penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan diare merupakan penyebab kesakitan tertinggi anak balita di Aceh. Beerdasrkan data dari Demographic Health Survey (DHS) tahun 2008, sekitar 35,4 persen anak menderita batuk dalam dua minggu terakhir dan 39,1 persen tersebut mengalami demam. Estimasi DHS (2008) terhadap anak pneumonia ada sekitar 40-43 persen. Namun, kebanyakan orang tua tidak memperhatikan anak yang pernapasan cepat sebagai pneumonia. Penumonia biasanya merupakan akibat pengobatan ISPA yang kurang adekuat.

Kasus HIV-AIDS di Aceh ada sekitar 29 orang yang tersebar di 13 kabupaten/kota dan 13 diantaranya sudah meninggal dunia. Pengobatan ODHA dengan anti retroviral dilakukan sebanyak 9 penderita (75 persen) dari 12 kasus yang ditemukan (Profil Kesehatan Aceh, 2009).

Berdasarkan survei DHS (2008), pengetahuan masyarakat Aceh tentang HIV-AIDS masih rendah. Sebesar 66 persen pria dan 49,5 persen wanita yang

pernah mendengar AIDS, dan baru 26 persen perempuan yang mengetahui bahwa AIDS dapat ditularkan kepada anak mereka melalui ASI, persalinan dan kehamilan. Selain itu, baru sekitar 5 persen penduduk yang mengerti tentang *Voluntary Councelling and Testing* (VCT).

Penderita baru Tuberkulosis (TB) positif yang ditemukan pada periode Januari – Desember 2008 berjumlah 2.793 kasus dengan *Case Detection Rate* 40 persen, meningkat bila dibandingkan pencapaian tahun 2007 (38 persen). Pencapaian ini masih jauh dari target nasional yaitu 70 persen. Sedangkan hasil akhir pengobatan terhadap perderita yang terdaftar pada tahun 2007 menunjukkan 90,6 persen penderita baru Basil Tahan Asam (BTA) positif yang diobati dinyatakan sembuh, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 89,6 persen. Angka ini sudah mencapai target nasional, yaitu minimal 85 persen (Profil Kesehatan Aceh, 2009).

Selain itu, malaria masih merupakan penyakit endemis hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh. Pada tahun 2008 kasus malaria klinis sebanyak 23.303 kasus dan yang positif 3.528 kasus. Tingginya kasus malaria di Aceh disebabkan oleh beberapa hal yaitu penggunaan kelambu yang mengandung insektisida (*Insecticide treated net*) yang masih rendah yaitu sekitar 35 persen, pengobatan malaria yang tidak standar dan sanitasi lingkungan yang kurang baik.

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) juga menjadi permasalahan kesehatan utama di Aceh. Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe merupakan daerah dengan kasus DBD tertinggi di Aceh. Kasus DBD terjadi peningkatan sampai delapan kali setelah tsunami sampai tahun 2008 (Profil Kesehatan Aceh 2009). Peningkatan ini kemungkinan besar karena mobilitas penduduk yang sangat cepat antar daerah terutama dari luar Aceh yang endemis DBD seperti DKI Jakarta dan lainnya.

Penyakit lainnya yang masih menjadi permasalahan di Aceh adalah penyakit kusta. Pada tahun 2008, penderita baru ditemukan sejumlah 437 kasus dengan tipe PB (Pausi Basiler/Kusta Kering) sebanyak 111 kasus dan tipe MB (Multi Basiler/Kusta Basah) sebanyak 326 kasus. Tingkat kecacatan penderita baru sebesar 10,8 persen karena penemuan kasus baru yang terlambat yang disebabkan oleh belum maksimalnya sistem pendataan dan rendahnya pengetahuan dan keterbukaan masyarakat terhadap penyakit kusta.

Riskesdas 2007 menemukan beberapa penyakit infeksi lain yang menjadi masalah kesehatan masyarakat antara lain tifoid, hepatitis dan diare. Dalam 12 bulan terakhir, tifoid klinis dapat dideteksi di Aceh dengan prevalensi 3,0 persen, dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan rentang 0,6-7,0 persen. Tifoid, hepatitis dan diare ditemukan pada semua kelompok umur. Tifoid terutama ditemukan pada kelompok umur usia-sekolah, sedangkan diare pada kelompok balita.

Selain permasalahan penyakit menular, Aceh juga menghadapi permasalahan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti stroke, hipertensi, dan Diabetes Mellitus (DM) yang manjadi salah satu penyebab kematian utama di Aceh.

Prevalensi hipertensi di Aceh termasuk yang paling tinggi di Indonesia (30,2 persen), hampir setara dengan angka prevalensi nasional yaitu 31,7 persen (Riskesdas, 2007). Berdasarkan diagnosis gejala yang menyerupai stroke, prevalensi stroke di Aceh adalah 1,7 per 1.000 penduduk. Angka prevalensi stroke di Aceh adalah 17 persen, di atas angka nasional (8,3 persen). Penyakit jantung di Aceh juga merupakan kasus tertinggi di Indonesia (13 persen). Angka ini jauh melebihi angka nasional yaitu 7,2 persen (Riskesdas, 2007).

2.3.2.3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2005-2009 terus menunjukkan penurunan, dimana secara berurutan adalah sebesar 28,69 persen (2005), 28,28 persen (2006), 26,65 persen (2007), 23,53 persen (2008) dan 21,80 persen (2009). Namun demikian tingkat kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata nasional dimana (dalam rentang waktu yang sama) pada tahun 2005 sebesar 16,00 persen meningkat menjadi 17,80 persen pada tahun 2006 dan seterusnya mengalami penurunan berturut-turut menjadi 16,60 persen (2007); 15,40 persen (2008); dan 14,20 persen (2009). Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan di Aceh berada pada urutan ketujuh tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan keputusan Kementerian PDT nomor 001/KEP/M-PDT/02/2005 tentang penetapan Kabupaten tertinggal sebagai lokasi program P2DTK. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Aceh memiliki 17 dari 23 Kabupaten/Kota yang masih tergolong daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan. Daerah tertinggal tersebut merupakan wilayah konsentrasi

penduduk miskin di Aceh. Selanjutnya tingkat kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.14

Tabel 2.14
Tingkat Kemiskinan Di Aceh
Tahun 2005 dan 2009

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Simeulue	34.09	33.80	32.26	26.45	24.72
2	Aceh Singkil	29.20	28.41	28.54	23.27	21.06
3	Aceh Selatan	26.98	24.58	24.72	19.40	17.50
4	Aceh Tenggara	24.63	23.56	21.60	18.51	16.77
5	Aceh Timur	30.02	29.85	28.15	24.05	21.33
6	Aceh Tengah	27.68	26.68	24.41	23.36	21.43
7	Aceh Barat	35.50	34.54	32.63	29.96	27.09
8	Aceh Besar	29.40	28.66	26.69	21.52	20.09
9	Pidie	36.01	35.32	33.31	28.11	25.87
10	Bireuen	29.70	29.05	27.18	23.27	21.65
11	Aceh Utara	35.87	34.98	33.16	27.56	25.29
12	Aceh Barat Daya	28.29	28.30	28.63	23.42	21.33
13	Gayo Lues	33.97	33.51	32.31	26.57	24.22
14	Aceh Tamiang	24.50	23.89	22.19	22.29	19.96
15	Nagan Raya	36.18	35.25	33.61	28.11	26.22
16	Aceh Jaya	31.28	30.42	29.28	23.86	21.86
17	Bener Meriah	28.76	27.98	26.55	29.21	26.58
18	Pidie Jaya		-	35.00	30.26	27.97
19	Banda Aceh	8.37	8.25	6.61	9.56	8.64
20	Sabang	29.78	28.56	27.13	25.72	23.89
21	Langsa	14.98	13.95	14.25	17.97	16.20
22	Lhokseumawe	15.90	14.25	12.75	15.87	15.08
23	Subulussalam		-	30.16	28.99	26.80
Total		**28.69**	**28.28**	**26.65**	**23.53**	**21.80**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Tingginya tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2005 diperkirakan merupakan dampak dari konflik yang panjang dan bencana tsunami pada tahun 2004. Akan tetapi dengan berakhirnya konflik keamanan pada tahun 2005 yang disertai dengan adanya aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi maka tingkat kemiskinan di Aceh terus menurun secara signifikan.

Ditinjau dari sebaran penduduk miskin di Aceh selama kurun waktu 2005 – 2009, telah terjadi perubahan komposisi antara jumlah penduduk miskin di kota dan penduduk miskin di desa. Pada tahun 2005, penduduk miskin di perdesaan sebesar 32,60 persen sedangkan di perkotaan hanya 19,00 persen. Namun pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di perdesaan turun menjadi 25,30 persen (berkurang sebesar 7,30 persen) sedangkan di perkotaan adalah 15,40 persen (berkurang 3,60 persen). Hal ini menggambarkan bahwa aktifitas

pembangunan yang semakin pesat di desa telah memberi dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan.

2.3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh untuk periode 2005-2009 mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 IPM sebesar 69,00 mengalami peningkatan menjadi 71,31 pada tahun 2009. Disamping itu, disparitas IPM antar kabupaten/kota pada tahun 2009 masih tinggi, angka yang tertinggi di kota Banda Aceh sebesar 77,00 dan terendah di kabupaten Gayo Lues sebesar 67,59. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar masih rendah dan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Umumnya IPM yang tinggi di wilayah perkotaan dibanding dengan IPM di Perdesaan (Tabel 2.15). Pada saat ini IPM Aceh memiliki peringkat ke 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) Provinsi di Sumatera.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Di Aceh
Tahun 2005 - 2009

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Simeulue	65.20	66.38	67.97	68.60	68.92
2	Aceh Singkil	66.50	67.17	67.97	68.12	68.29
3	Aceh Selatan	67.70	68.41	68.87	69.18	69.64
4	Aceh Tenggara	70.20	70.58	70.96	70.99	71.23
5	Aceh Timur	68.40	68.84	69.40	69.55	70.19
6	Aceh Tengah	70.80	71.16	72.11	72.81	73.22
7	Aceh Barat	67.40	68.08	69.28	69.66	70.32
8	Aceh Besar	71.40	71.87	72.71	72.84	73.10
9	Pidie	69.50	69.99	70.76	71.21	71.60
10	Bireuen	71.50	72.20	72.45	72.60	72.86
11	Aceh Utara	69.70	70.44	71.39	71.47	71.90
12	Aceh Barat Daya	66.90	67.52	68.37	69.38	69.81
13	Gayo Lues	66.10	66.61	67.08	67.17	67.59
14	Aceh Tamiang	68.30	68.73	69.17	69.81	70.50
15	Nagan Raya	66.30	66.88	67.64	68.47	68.74
16	Aceh Jaya	66.80	67.77	68.23	68.94	69.39
17	Bener Meriah	67.40	68.12	68.88	69.77	70.38
18	Pidie Jaya		69.40	69.96	71.23	71.71
19	Banda Aceh	74.70	75.44	76.31	76.74	77.00
20	Sabang	73.30	73.66	74.48	75.00	75.49
21	Langsa	70.40	71.51	72.22	72.79	73.20
22	Lhokseumawe	73.10	73.80	74.65	75.00	75.54
23	Subulussalam		67.80	68.28	68.42	68.85
Total		**69.00**	**69.41**	**70.35**	**70.76**	**71.31**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

2.3.2.5. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan di Aceh menunjukkan perubahan beberapa indikator yang cukup signifikan kearah yang lebih baik. Pada Februari 2009 jumlah penduduk yang bekerja sebesar 1,692 juta orang dan memasuki Agustus 2009 bertambah sebesar 1,733 juta orang. Dalam rentang waktu tersebut terjadi peningkatan sebanyak 41 ribu orang. Bila dibandingkan terhadap tahun sebelumnya yaitu periode Agustus 2008 jumlah penduduk yang berkerja adalah 1,618 juta orang, berarti mengalami peningkatan sebesar 115 ribu orang.

Selama tahun 2009 terjadi peningkatan terhadap jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan yang bekerja. Peningkatan terbanyak terjadi pada penduduk laki-laki sebesar 1,075 juta orang menjadi 1,104 juta orang atau meningkat sebanyak 29 ribu orang. Penduduk perempuan meningkat menjadi 11.354 orang.

Kondisi angkatan kerja pada bulan agustus 2008 sebesar 1,793 juta orang, pada februari 2009 meningkat sebesar 33 ribu orang sehingga jumlah angkatan kerja bertambah menjadi 1,865 juta orang. Pada bulan agustus 2009 total angkatan kerja menjadi 1,898 juta orang dikarenakan terjadinya penambahan sebesar 105 ribu orang. Selanjutnya, jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) menurun pada penduduk laki-laki dari 0,314 juta orang menjadi 0,302 juta orang. Sedangkan pada penduduk perempuan meningkat dari 0,833 juta orang menjadi 0,836 juta orang.

Sementara itu, untuk perkembangan tingkat pengangguran di Aceh selama periode 2007-2009 cenderung menurun (Tabel 2.16). Pada tahun 2007 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh sebesar 9,84 persen dan selanjutnya terus menurun secara berturut-turut menjadi 9,56 persen (2008) dan 8,71 (2009). Walaupun TPT di Aceh terus mengalami penurunan, namun kondisi tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan dengan TPT Nasional dalam kurun waktu yang sama. TPT Nasional sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 secara berturut-turut adalah 9,75 persen (2007), 8,46 persen (2008) dan 8,14 persen (2009).

Tabel 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh
Tahun 2007 – 2009

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2007	2008	2009
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Simeulue	8,45	8.63	12.42
2	Aceh Singkil	9,72	10.22	7.81
3	Aceh Selatan	8,00	8.83	9.83
4	Aceh Tenggara	9,45	9.59	11.53
5	Aceh Timur	12,90	11.73	6.70
6	Aceh Tengah	3,87	4.91	4.31
7	Aceh Barat	8,39	7.23	4.63
8	Aceh Besar	12,99	12.05	13.54
9	Pidie	9,40	7.87	6.78
10	Bireuen	7,70	7.53	9.05
11	Aceh Utara	13,35	14.02	11.00
12	Aceh Barat Daya	5,24	5.54	7.21
13	Gayo Lues	5,63	4.33	6.56
14	Aceh Tamiang	12,15	11.17	9.90
15	Nagan Raya	6,85	5.03	4.84
16	Aceh Jaya	13,58	10.39	6.39
17	Bener Meriah	4,83	3.40	2.57
18	Pidie Jaya	4,89	8.48	5.16
19	Banda Aceh	7,91	11.43	9.78
20	Sabang	9,68	11.38	11.66
21	Langsa	12,12	11.28	14.74
22	Lhokseumawe	18,71	14.35	13.26
23	Subulussalam	12,02	12.22	4.34
Total		**9,84**	**9.56**	**8.71**

Sumber : BPS, 2010

2.3.2.6. Kriminalitas

Menurut BPS (2009) terdapat dua jenis kriminalitas yaitu kejahatan terhadap anak dan kejahatan terhadap perempuan. Pada tahun 2007 terjadi 7 kasus kejahatan terhadap anak yang dilaporkan, 7 kasus dalam proses dan 4 kasus telah diselesaikan. Sementara itu kejahatan terhadap perempuan terjadi 18 kasus yang dilaporkan, 6 kasus dalam proses dan 3 kasus telah

diselesaikan. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kasus kriminalitas terhadap anak, yang dilaporkan menjadi 91 kasus, 11 kasus dalam proses dan 78 kasus telah diselesaikan. Kejahatan terhadap perempuan juga meningkat, yang dilaporkan 134 kasus, 16 kasus dalam proses dan 119 kasus telah diselesaikan.

Tindak kejahatan yang terjadi di Aceh secara umum mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 tercatat 1.095 kasus, tahun 2007 tercatat 2.748 kasus dan 2008 tercatat 2.667 kasus. Pada umumnya tindak kejahatan tersebut berupa pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan narkotika (Tabel 2.17).

Tabel 2.17
Indeks Tindak Kejahatan Menonjol
Di Aceh Tahun 2006-2008

No.	KASUS	TAHUN		
		2006	2007	2008
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pencurian dengan pemberatan	218	513	510
2	Pencurian Kendaraan Bermotor	430	1113	1061
3	Pencurian dengan kekerasan	56	175	130
4	Penganiayaan Berat	115	360	364
5	Kebakaran	38	86	14
6	Pembunuhan	11	43	42
7	Perkosaan	30	48	60
8	Kenakalan Remaja	0	0	0
9	Uang Palsu	1	18	9
10	Narkotika	196	392	477
Provinsi		**1095**	**2748**	**2667**

Sumber : Polda NAD, 2009

2.3.3. Seni Budaya dan Olahraga

2.3.3.1. Group Kesenian

Aceh memiliki 1.133 sanggar (group) kesenian yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa Aceh memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian seperti tarian (debus, seudati, saman, ranup

lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong dan prang sabilillah), sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi).

Berbagai jenis kesenian tersebut mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratif yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat.

2.3.3.2. Club Olah Raga dan Gedung Olah Raga

Aceh memiliki berbagai club olah raga sesuai dengan jenis olah raga yang digemari oleh masyarakat seperti club sepak bola, badminton, tenis meja, footsal, voly, renang, sepeda, tinju, panjat tebing, lari dan senam sehat. Club olah raga tersebut pada umumnya bernaung di bawah organisasi keolahragaan seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.18

Untuk mendukung kegiatan berbagai jenis olah raga ini maka dibangun gedung olah raga terdiri dari gedung olah raga milik Pemerintah sebanyak 11 unit, milik swasta 1 unit. Lapangan olah raga terbuka menurut cabang olah raga sebayak 48 unit, gedung kepemudaan 1 unit, stadion olah raga 2 unit, stadion mini olah raga 2 unit dan publik spase olah raga sebayak 2 unit (Dispora, 2009).

Tabel 2.18
Organisasi Keolahragaan Di Aceh

No	NAMA PENGDA	No	NAMA PENGDA
1	Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (**PENGDA PGSI**)	23	Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia **(PENGDA PABBSI)**
2	Persatuan Judo Seluruh Indonesia (**PENGDA PJSI**)	24	Persatuan Bola Volly Seluruh Indonesia **(PENGDA PBVSI)**
3	Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (**PENGDA FORKI**)	25	Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia **(PENGDA PBSI)**
4	Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (**PENGDA PERKEMI**)	26	Persatuan Olahraga Tenis Lapangan Seluruh Indonesia **(PENGDA PELTI)**
5	Ikatan Pencak Silat Indonesia (**PENGDA IPSI)**	27	Persatuan Catur Seluruh Indonesia **(PENGDA PERCASI)**
6	Taekwondo Indonesia (**PENGDA TI**)	28	Persatuan Panahan Seluruh Indonesia **(PENGDA PERPANI)**
7	Keluarga Olahraga Tarung Derajat (**PENGDA KODRAT**)	29	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia **(PENGDA PERBASI)**
8	Persatuan Tinju Amatir Indonesia (**PENGDA PERTINA**)	30	Persatuan Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia **(PENGDA ISSI)**
9	Wushu Indonesia **(PENGDA WI**)	31	(PENGDA PERSEROSI)
10	Persatuan Renang Seluruh Indonesia (**PENGDA PRSI)**	32	(PENGDA PDBI)
11	Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (**PENGDA PODSI)**	33	Gabungan Brigade Seluruh Indonesia **(PENGDA GABSI)**
12	Persatuan Olahrag Layar Seluruh Indonesia (**PENGDA PORLASI**)	34	Persatuan Senam Seluruh Indonesia **(PENGDA PERSANI)**
13	Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (**PENGDA POSSI**)	35	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia **(PENGDA PTMSI)**
14	Persatuan Ski Air Seluruh Indonesia (**PENGDA PSASI)**	36	(PENGDA PSTI)
15	Federasi Aero Sport Indonesia **(PENGDA FASI)**		NAMA ORGANISASI DILUAR PENGDA
16	Federasi Panjat Tebing Indonesia **(PENGDA FPTI)**	37	Badan Pengurus Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia **(BAPOPSI)**
17	Ikatan Motor Indonesia (**PENGDA IMI**)	38	Forum Olahraga Mahasiswa Indonesia **(FOMI)**
18	(**PENGDA PASI**)	39	Persatuan Wartawan Olahraga Seluruh Indonesia **(PERWOSI)**
19	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia **(PENGDA PSSI**)	40	Badan Pengurus Olahraga Cacat **(BPOC)**
20	Persatuan Penembak Indonesia **(PENGDA PERBAKIN)**	41	Badan Forum Olahraga Mahasiswa Indonesia **(BAFOMI)**
21	(PENGDA PERBASASI)	42	SIWOPWI
22	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia **(PENGDA IKASI)**	43	KOPNI (Komite Paralempik Nasional Indonesia)

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, 2009

2.4. Pelayanan Umum

2.4.1. Pelayanan Dasar

2.4.1.1. Pendidikan

A. Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar terus mengalami kenaikan. Selama periode 2008-2009 untuk tingkat pendidikan dasar, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun mengalami kenaikan meskipun kecil, yaitu dari 99,06 persen menjadi 99,07 persen dan pada kelompok umur 16-15 tahun dari 94,12 persen menjadi 94,31 persen.

Menurut perbandingan daerah tempat tinggal, APS di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan baik menurut kelompok umur, jenis kelamin maupun tingkat perkembangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan (kelompok umur), maka semakin besar kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Tingkat kesenjangan pada kelompok 7-12 tahun sebesar 0,55 persen dan pada kelompok 13-15 tahun sebesar 3,95 persen.

Menurut perbandingan jenis kelamin, APS pada tahun 2009 penduduk perempuan usia 7-18 tahun selalu lebih tinggi dari pada laki-laki. Perhitungan kesenjangan menunjukkan bahwa kecenderungan yang sama dengan di atas, yaitu semakin tinggi usia jenjang pendidikan maka semakin tinggi kesenjangan laki-laki dan perempuan. Jika kesenjangan ditinjau menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, data menunjukkan kesenjangan anak laki-laki dan perempuan lebih besar terdapat di daerah perdesaan dari pada perkotaan.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mengukur daya tampung setiap sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Pada tahun 2009, secara rata-rata di setiap SD dan MI negeri, berturut-turut terdapat 160 dan 233 siswa dan di SMP dan MTs negeri terdapat 266 dan 371 siswa. Sementara itu, rata-rata jumlah siswa tiap satu SD/MI dan SMP/MTs swasta adalah SD: 115 siswa, MI: 115 siswa, SMP: 118, MTs: 131 siswa.

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Secara keseluruhan rasio siswa-guru saat ini sangat rendah. Di tingkat SD/MI satu guru melayani 10,83 siswa; di tingkat di SMP/MTS satu guru per 9,82 siswa dan di tingkat di SMA/MA/SMK satu guru melayani 10,23 siswa. Ini berarti bahwa lebih banyak guru dari yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan

pendidikan yang berkualitas dan efisien. Angka ini di bawah rata-rata Indonesia, khusus untuk sekolah dasar satu guru melayani 20,1 siswa.

B. Pendidikan Menengah

1. Angka Partisipasi Sekolah

Selama periode 2008-2009, Angka Pertisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat pendidikan menengah mengalami peningkatan. APS Kelompok umur 16 - 18 tahun pada tahun 2008 sebesar 72,32 persen meningkat menjadi 72,72 persen, namun peningkatan ini masih belum signifikan.

Menurut perbandingan daerah tempat tinggal, APS di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan baik menurut kelompok umur, jenis kelamin maupun tingkat perkembangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan (kelompok umur), maka semakin besar kesenjangan antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Tingkat kesenjangan pada kelompok 16-18 tahun mencapai 9,97 persen.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Di sekolah/madrasah lanjutan atas; secara rata-rata jumlah siswa per sekolah/madrasah negeri adalah sebagai berikut; SMA memiliki 452 siswa, MA menampung 367 siswa, dan SMK terdapat 353 siswa. Sementara itu untuk sekolah/madrasah swasta adalah; SMA memiliki 127 siswa, MA menampung 120 siswa, dan SMK terdapat 130 siswa.

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru menengah terhadap murid pada tahun 2009, untuk tingkat SMP/MTs sebesar 9,82 dan pada tingkat SMA/MA/SMK sebesar 10,23. Angka ini sudah melebihi rata-rata Nasional sebesar 20,1. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah guru menengah di Aceh sudah berlebih.

Dari sisi kualifikasi, pada tingkat sekolah menengah pertama, persentase guru SMP berkualifikasi S1/DIV sebesar 64,58 persen dan MTs mencapai 71,31 persen. Sedangkan pada tingkat sekolah menengah atas, persentase guru SMA berkualifikasi S1/DIV adalah sebesar 87,39 persen, MA sebesar 81,08 persen dan SMK sebesar 83,45 persen. Untuk kepala sekolah menengah persentase yang memiliki kualifikasi S1/DIV atau lebih sebesar 65,11 persen (TKPPA, 2009).

2.4.1.2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (dokter dan paramedis) di Aceh ditampilkan pada Tabel 2.19. Selanjutnya rasio masing indikator sarana kesehatan dan tenaga medis diuraikan berikut ini.

Tabel 2.19
Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Tahun 2007 - 2009

NO	URAIAN	2007	2008	2009
1	**Rasio Posyandu dengan Balita**	11.81	15.51	17.39
	a. Jumlah Balita	483,012 Orang	460,871 Orang	429,811 Orang
	b. Jumlah Posyandu	5,706 Unit	7,150 Unit	7,474 Unit
2	**Jumlah Sarana kesehatan**			
	a. Rumah Sakit	47 Unit	49 Unit	49 Unit
	b. Puskesmas	288 Unit	292 Unit	307 Unit
	c. Polindes / Poskesdes	1,885 Unit	1,969 Unit	2,089 Unit
	d. Pustu	886 Unit	903 Unit	903 Unit
3	**Jumlah Dokter**			
	a. Dokter Umum	756 Orang	776 Orang	776 Orang
	b. Dokter Spesialis	139 Orang	205 Orang	205 Orang
	c. Dokter Gigi	154 Orang	153 Orang	153 Orang
4	**Jumlah Tenaga Paramedis**			
	a. Perawat	5,529 Orang	1,346 Orang	2,923 Orang
	b. Bidan	2,568 Orang	2,603 Orang	5,132 Orang

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, 2010

A. Rasio Posyandu Per satuan Balita

Jumlah balita yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh tahun 2009 sebanyak 429.811 dan jumlah posyandu yang tercatat 7.474 unit sehingga rasio posyandu per 1.000 balita adalah 17,39. Hal ini bermakna bahwa 18 posyandu melayani 1.000 balita (1 posyandu berbanding 56 balita).

B. Rasio Puskesmas Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Jumlah puskesmas, polindes dan pustu yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh tahun 2009 sebanyak 3.299 unit dengan total penduduk di Aceh sebesar 4.293.915 sehingga rasio Puskesmas, polindes dan pustu per 1.000 penduduk adalah 0,77. Hal ini bermakna bahwa 1 (satu) puskesmas, polindes dan pustu melayani 1.000 penduduk (1 Puskesma, polindes dan pustu berbanding 1.302 penduduk).

C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh tahun 2009 sebanyak 49 unit dengan total penduduk di Aceh sebesar 4.293.915 sehingga rasio rumah sakit per 10.000 penduduk adalah 0,11. Hal ini bermakna bahwa 0,11 rumah sakit melayani 10.000 penduduk (1 rumah sakit berbanding 8.763 penduduk).

D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh tahun 2009 sebanyak 1.134 orang dengan total penduduk di Aceh sebesar 4.293.915 sehingga rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,26. Hal ini bermakna bahwa 0,26 dokter melayani 1.000 penduduk (1 dokter berbanding 3.787 penduduk).

E. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh tahun 2009 sebanyak 8.055 orang dengan total penduduk di Aceh sebesar 4.293.915 sehingga rasio tenaga medis per 1.000 penduduk adalah 1,88. Hal ini bermakna bahwa 2 (dua) tenaga medis melayani 1.000 penduduk (1 tenaga medis berbanding 500 penduduk).

2.4.1.3. Lingkungan Hidup

A. Persentase Penanganan Sampah

Penanganan persampahan masih terbatas dalam kawasan komersil, tingkat pelayanan di tempat fasilitas umum di perkotaan masih 25 persen. Sesuai dengan target MDG's untuk Aceh pada sektor persampahan ditargetkan akses pelayanan persampahan perkotaan sebesar 80 persen dan pedesaan 75 persen.

B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Penduduk Aceh secara umum memperoleh air dari berbagai sumber antara lain air ledeng, air kemasan, sumur bor/pompa, mata air, air sungai dan air hujan. Rumah tangga yang memanfaatkan air kemasan sebagai sumber air minum mengalami peningkatan untuk periode 2005-2009. Pada tahun 2005 rumah tangga yang memanfaatkan air kemasan sebesar 3,11 persen meningkat menjadi 18,83 persen pada tahun 2009. Namun, penduduk Aceh yang memanfaatkan sumur sebagai sumber air minum masih tergolong besar. Pada tahun 2005 rumah tangga yang memanfaatkan sumur (tak terlindung) sebagai sumber air minum sebesar 25,29 persen menurun menjadi 12,94 persen pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2005 rumah tangga yang memanfaatkan sumur (terlindung) sebagai sumber air minum sebesar 42,32 persen dan pada tahun 2009 sebesar 40,69 persen (Tabel 2.20).

Tabel 2.20
Sumber Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga (dalam persen) Tahun 2005 - 2009

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
1	Air Kemasan	3.11	4.42	6.73	14.43	18.93
2	Leding Meteran	11.54	10.93	8.76	7.04	8.55
3	Leding Eceran			3.42	1.85	1.32
4	Sumur Bor/Pompa	3.23	3.17	4.92	5.25	4.75
5	Mata Air Terlindung	3.02	4.68	3.55	4.15	5.81
6	Mata Air Tak Terlindung	2.95	3.07	3.16	3.2	1.95
7	Air Sungai	4.81	5.55	4.76	3.31	4.09
8	Air Hujan	2.27	1.61	1.14	1.22	0.78
9	Sumur Tak Terlindung	25.49	22.74	21.41	17.99	12.94
10	Sumur Terlindung	42.32	43.24	41.58	41.19	40.69
11	Lainnya	1.25	0.58	0.58	0.33	0.18

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Dari konteks pemanfaatan sumber air minum untuk daerah perkotaan dan perdesaan, pada tahun 2009 rumah tangga yang menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai sumber air minum di perkotaan sebesar 545.328 rumah tangga, sedangkan di perdesaan 131.179 rumah tangga. Penduduk Aceh yang menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai sumber air minum mengalami peningkatan sekitar 28,80, naik dari tahun sebelumnya 23,33 persen terdapat perbedaan yang cukup nyata antara rumah tangga di perkotaan dan perdesaan, dimana pada tahun 2009 rumah tangga perkotaan yang menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai sumber air minumnya mencapai 63,24 persen sedangkan hanya 15,60 persen dari seluruh rumah tangga di perdesaan menggunakan ari ledeng dan air kemasan sebagai sumber air minum. Dengan kata lain sebagian penduduk Aceh masih mengkonsumsi air minum yang bersumber dari air tanah (sumur) dan air permukaan yang mungkin belum memenuhi standar kesehatan air minum, khususnya sumur-sumur penduduk di wilayah pesisir yang terdampak tsunami dan yang berdekatan dengan kawasan industri yang menghasilkan limbah.

C. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Mulai pesatnya perkembangan di wilayah perkotaan atau permukiman di Aceh cenderung menyebabkan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi tidak sehat. Keadaan ini semakin diperburuk bila belum tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan primer maupun sekunder. Kondisi sanitasi saat ini sebagian besar tidak memenuhi syarat dengan utilitas yang buruk sehingga mengakibatkan tata kehidupan kurang sehat dan tidak nyaman.

Kondisi fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Aceh adalah milik sendiri 48,41 persen, milik bersama 12,55 persen, umum 14,12 persen, dan lainnya 24,93 persen, selanjutnya pada akhir 2015 Aceh akan terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

2.4.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Secara keseluruhan panjang jalan di Aceh yaitu 17,066.19 km yang terdiri dari jalan nasional (1.782,78 km), provinsi (1.701,82 km) dan kabupaten/kota (13.581,89 km). Kondisi masing-masing jalan tersebut dikatagorikan kedalam kondisi baik, sedang dan rusak berat yang secara rinci disajikan pada Tabel 2.21

Tabel 2.21
Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
Tahun 2005 - 2009

No	Tahun		Panjang Jalan (km)	Kondisi Jalan (km)			Kondisi Mantap (%)
				Baik	Sedang	Rusak	
1	2005	Nasional	1,782.78	721.45	603.75	450.58	74.33
		Provinsi	1,532.32	445.44	698.44	368.44	74.65
		Kabupaten	13,581.59	2,408.60	7,043.28	4,129.71	69.59
2	2006	Nasional	1,782.78	1,074.19	362.43	339.16	80.58
		Provinsi	1,701.82	391.43	606.16	684.23	58.62
		Kabupaten	13,581.59	2,408.60	7,043.28	4,129.71	69.59
3	2007	Nasional	1,782.78	1,163.26	299.01	313.51	82.02
		Provinsi	1,701.82	442.47	621.08	618.27	62.49
		Kabupaten	13,581.59	2,408.60	7,043.28	4,129.71	69.59
4	2008	Nasional	1,782.78	1,251.33	230.39	294.06	83.11
		Provinsi	1,701.82	510.51	576.33	594.98	63.86
		Kabupaten	13,581.59	2,408.60	7,043.28	4,129.71	69.59
5	2009	Nasional	1,782.78	1,345.24	191.24	239.30	86.18
		Provinsi	1,701.82	637.39	484.13	560.30	65.90
		Kabupaten	13,581.59	2,408.60	7,043.28	4,129.71	69.59

Sumber : Dinas Bina Marga dan Cipta Karya 2010

B. Daerah Irigasi

Potensi lahan pertanian yang dimiliki oleh Aceh seluas 730.000 ha yang terdiri dari sawah beririgasi teknis, semi teknis, sederhana, sawah tadah hujan, dan daerah rawa. Luas total areal sawah yang sudah beririgasi adalah 384.171 ha tersebar di 1.176 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 99.676 ha yang sudah berigasi teknis, 60.866 ha beririgasi semi teknis, dan 250.098 ha beririgasi sederhana termasuk didalamnya irigasi desa. Luas sawah tadah hujan adalah 57.746 ha. Luas daerah rawa adalah 444.755 ha, yang terdiri dari rawa lebak seluas 366.055 ha dan rawa pantai seluas 78.700 ha (Dinas Pengairan, 2009).

Berdasarkan kewenangan daerah pengelolaannya terbagi atas kewenangan pusat (>3.000 ha) seluas 120.921 ha, kewenangan provinsi (1.000-3.000 ha) seluas 76.647 ha dan kewenangan kabupaten/kota (<1.000 ha) seluas 186.603 ha.

Selanjutnya, jaringan irigasi di Aceh sepanjang 8.448,34 km yang terdiri dari jaringan primer 725,23 km, jaringan sekunder 1.463,67 km dan jaringan tersier 6.259,44 km. Rasio jaringan irigasi tersebut dengan luas lahan budidaya (384.171,00 ha) adalah 0,02 km per hektar (Tabel 2.22).

Tabel 2.22
Potensi Areal Lahan Pertanian di Aceh
Tahun 2009

No	Uraian	Luas Ha
1	**Irigasi**	**410,640**
	Irigasi Teknis	99,676
	Irigasi Semi Teknis	60,866
	Irigasi Sederhana	132,092
	Irigasi Desa	118,006
2	**Rawa**	**444,755**
	Rawa Lebak	366,055
	Rawa Pantai	78,700
3	**Sawah Tadah Hujan**	**57,746**

Sumber : Dinas Pengairan, 2009

C. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Pemeluk agama Islam di Aceh 3.905.326 orang (90.95% dari total penduduk Aceh) dengan jumlah Masjid sebanyak 3.512 unit , pemeluk agama Kristen (Protestan + Khatolik) 34.665 orang (0.81% dari total penduduk Aceh) dengan jumlah Gereja 26 unit dan pemeluk agama Budha 6.232 orang (0.14% dari total penduduk Aceh) dengan jumlah Kuil sebanyak 1 unit. Data ini menunjukkan bahwa penduduk Aceh manyoritas beragama Islam.

Rasio tempat ibadah per satuan pemeluk dihitung berdasarkan jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah pemeluk. Sehingga berdasarkan data di atas maka rasio jumlah tempat ibadah persatuan pemeluk : Islam (1 : 1.112), Kristen (1:1.333)dan Budha (1:6.232).

D. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan, baik di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Pada tahun 2008 tercatat sekita 56,05 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 56,62 persen. Rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebahagian besar adalah rumah tangga di daerah perkotaan yaitu sekitar 79,02 persen, sedangkan di perdesaan 48,03 persen.

Penggunaan jenis kloset angsa di Aceh mengalami penigkatan dari 65,72 di tahun 2008 menjadi 66,01 pada tahun 2009 dari total rumah tangga. Jenis kloset angsa adalah jenis kloset yang baik dari sisi kesehatan lingkungan (Gambar 2.1).

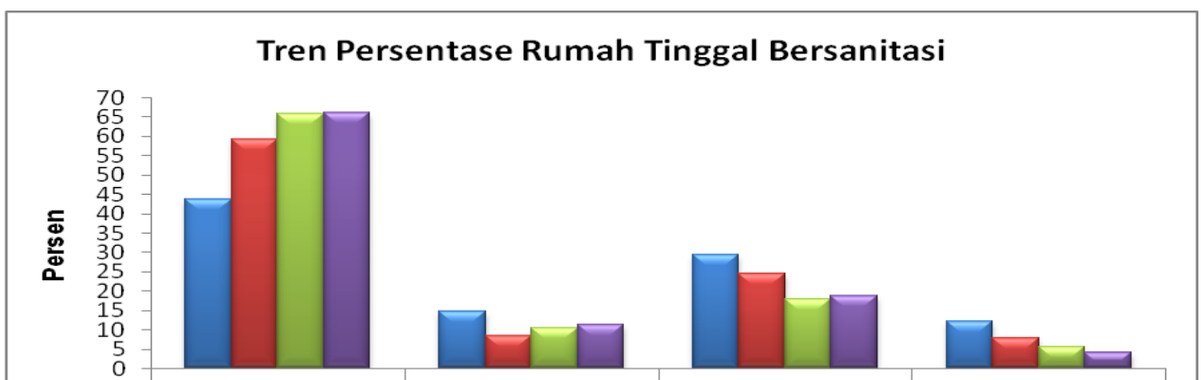

	Jenis Kloset Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung/Cubluk	Tidak Pakai Jamban
2006	43.82	14.66	29.43	12.1
2007	59.33	8.41	24.4	7.86
2008	65.72	10.61	18	5.67
2009	66.01	11.24	18.66	4.1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Gambar 2.1. Grafik Tren Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

E. Rasio Tempat Pembuangan Sampah TPS Per Satuan Penduduk

Menurut final MDGs Aceh, Bina Marga dan Cipta Karya (2010) jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di Aceh sebanyak 2,115 unit dan memiliki daya tampung sebanyak 3,095.2 m^3/hari. Rasio daya tampung TPS terhadap total penduduk (4,293,915 jiwa) sebesar 0,72 m^3/hari per 1,000 penduduk. Jakarta pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 10.931.207 jiwa, jumlah sampah 29.624 m3/hari sehingga 2,7 m^3/hari per 1.000 penduduk.

F. Persentase Rumah Layak Huni/Rumah Sehat

Menurut Badan Kesehatan Dunia *(WHO)* salah satu parameter rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m^2. Luas lantai rumah/tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga menunjukkan kondisi sistem kesehatan lingkungan keluarga atau rumah/tempat tinggal. Luas lantai juga menggambarkan tingkat kepadatan hunian atau luas ruang untuk tiap anggota keluarga. Pada tahun 2005 persentase rumah tangga yang menempati rumah/tempat tinggal kurang dari 19 m^2 per rumah tangga sebesar 8,75 persen. Pada tahun 2009 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi menjadi 2,85 persen. Sedangkan untuk rumah tangga dengan luas lantai 20-40 m^2 pada tahun 2005 sebesar 51,36 persen, meningkat menjadi 53,43 persen pada tahun 2009 (BPS, 2009). Hal ini mengindikasikan bahwa persentase rumah tangga layak huni di Aceh semakin meningkat. Numun, jumlah rumah yang belum layak huni di Aceh masih cukup banyak. Pemerintah Aceh pada tahun 2009 telah membangun rumah dhuafa untuk masyarakat yang tergolong fakir dan miskin sebanyak 11.205 unit dan rumah korban konflik sebanyak 15.670 unit (Gambar 2.2).

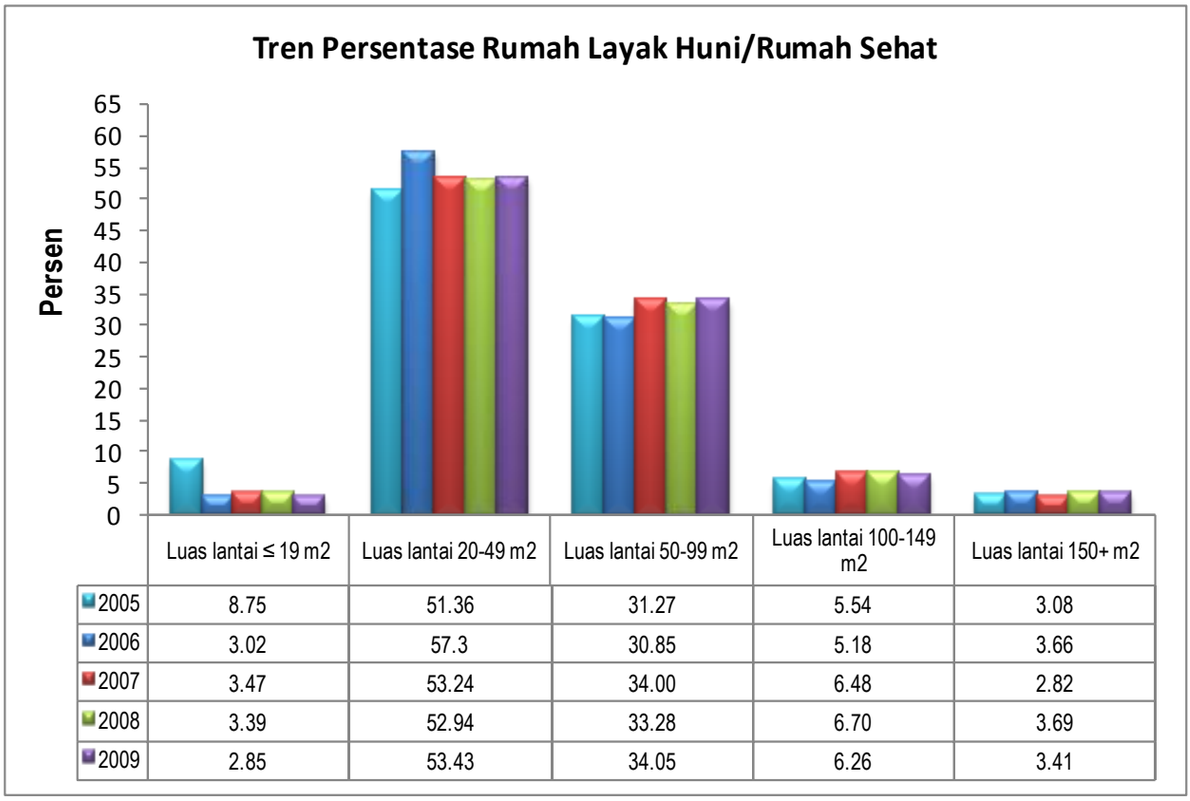

	Luas lantai ≤ 19 m2	Luas lantai 20-49 m2	Luas lantai 50-99 m2	Luas lantai 100-149 m2	Luas lantai 150+ m2
2005	8.75	51.36	31.27	5.54	3.08
2006	3.02	57.3	30.85	5.18	3.66
2007	3.47	53.24	34.00	6.48	2.82
2008	3.39	52.94	33.28	6.70	3.69
2009	2.85	53.43	34.05	6.26	3.41

Gambar 2.2. Grafik Tren Persentase Rumah Layak Huni/Rumah Sehat

2.4.1.5. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruangan nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Beberapa permasalahan dalam penataan ruang di Aceh antara lain: terjadinya alih fungsi lahan dan kesenjangan antar wilayah.

A. Alih Fungsi Lahan

Lahan merupakan sumberdaya strategis yang memiliki nilai secara ekonomis. Saat ini, jumlah luas lahan pertanian dan kehutanan Aceh setiap tahun mengalami pengurangan. Berkurangnya jumlah lahan pertanian dan kehutanan adalah akibat adanya peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk serta aktivitas pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan permintaan terhadap lahan semakin meningkat yang pada akhirnya terjadi alih fungsi lahan ke lahan non pertanian seperti perumahan, industri, dan lain sebagainya untuk memenuhi permintaan yang ada. Alih fungsi lahan yang terjadi tidak terlepas dari kepentingan

berbagai pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan dan jaminan pangan Aceh, mengingat alih fungsi lahan tersebut sulit dihindari sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif.

Untuk daerah perkotaan, alih fungsi lahan dapat dilihat dari persentase ruang terbuka hijau. Meskipun secara proporsional masih memenuhi rasio yang ditetapkan (30%), namun beberapa kota di Aceh antara lain Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa menunjukkan kecenderungan pengurangan persentase ruang terbuka hijau sebagai akibat kegiatan pembangunan khususnya bidang infrastruktur dan pemukiman yang belum sepenuhnya mengikuti rencana tata ruang yang ditetapkan.

Alih fungsi lahan juga menyebabkan terjadinya lahan kritis di Aceh, terutama disebabkan antara lain oleh illegal loging, pembakaran hutan dan pemanfaatan lahan untuk pertanian yang tidak mengikuti teknik konservasi tanah yang benar. Pembukaan lahan untuk perkebunan yang dilakukan dengan alat berat dan pembakaran dapat menimbulkan erosi yang menyebabkan lahan menjadi kritis. Total lahan kritis di Aceh seluas 1.668.264,59 ha yang terdiri dari agak kritis 1.205.241,12 ha, kritis 395.680,28 ha dan sangat kritis 67.343,19 ha.

B. Kesenjangan Antar Wilayah

Aceh masih mengalami kesenjangan antar wilayah. Beberapa indikator pembangunan di wilayah pesisir timur Aceh menunjukan nilai yang lebih tinggi dibanding wilayah tengah dan pesisir barat. Pusat-pusat perkotaan juga lebih banyak terdapat di pesisir timur. Kabupaten/Kota di kawasan pesisir timur terletak di sepanjang jalan nasional dengan kualitas relatif baik yang menghubungkan dua kota besar yaitu Banda Aceh dan Medan dan mempunyai jumlah penduduk setara dua pertiga populasi Aceh. Keuntungan lokasi dengan akses yang lebih baik terhadap pasar dan fasilitas publik membuat kawasan pesisir timur memiliki biaya transportasi lebih rendah sehingga kesempatan ekonomi lebih besar di kawasan tersebut.

2.4.1.6. Perhubungan

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Menurut Dishubkomintel Aceh (2009), jumlah arus penumpang masuk dan keluar angkutan umum di Aceh tahun 2009 meliputi angkutan umum darat (452.878 orang), angkutan umum udara (653.113 orang) dan angkutan umum penyeberangan (757.046 orang).

Jumlah penumpang angkutan umum darat yang tiba dan yang berangkat masing-masing 239.563 orang (78,40%) dan 298.669 orang (71,62%). Sementara itu, angkutan umum udara sebesar 318.916 orang (48.83%) dan 334.197 orang (51,20%). Sedangkan jumlah penumpang angkutan umum penyeberangan yang tiba dan berangkat yaitu 379.527 orang (50,13%) dan 377.519 orang (49,87%).

B. Rasio Izin Trayek

Berdasarkan Dishubkomintel (2009) menunjukan bahwa izin trayek diberikan terhadap sarana angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin yang dikeluarkan terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan jumlah izin yang dikeluarkan untuk AKAP sejumlah 548 maka rasio izin trayek AKAP adalah 0,00013. Sementara izin AKDP sejumlah 3.072 sebesar 0,00072. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Aceh yang memanfaatkan sarana angkutan umum sebagai alat transportasi masih tergolong kecil, karena ketersediaan angkutan umum yang sangat terbatas.

C. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Provinsi Aceh pada tahun 2009 terdata 46.183 taman kendaraan (kendaraan wajib uji kir) dan 28.084 jumlah kendaraan yang telah diuji kir dengan rasio 0,61. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lainnya belum memiliki data taman kendaraan dan jumlah kendaraan yang diuji kir karena tidak tersedianya prasarana untuk uji kir kendaraan tersebut (Tabel 2.23).

Tabel 2.23
Uji Kir Kendaraan Tahun 2010

No	UPT/UPTD	Taman Kenderaan	Kendaraan Yang diuji	Rasio Uji Kendaraan
1	Banda Aceh	11.404	8.978	0,787
2	Aceh Besar, Jantho	2.490	-	-
3	Sabang	1.252	316	0,252
4	Aceh Pidie, Sigli	2.704	2.377	0,879
5	Bireun	1.783	2.256	1,265
6	Lhokseumawe	4.113	1.975	0,480
7	Aceh Utara, Lhoksukon	2.292	2.907	1,268
8	Langsa	3.683	-	-
9	Aceh Timur, Idi Rayeuk	-	413	-
10	Aceh Tamiang, Kuala Simpang	1.733	3.182	1,836
11	Aceh Tenggara, Kuta Cane	1.331	-	-
12	Aceh Tengah, Takengon	2.879	-	-
13	Aceh Jaya, Calang	-	-	-
14	Nagan Raya, Jeuram	1.045	-	-
15	Abdya, Blang Pidie	1.230	5.237	4,258
16	Aceh Barat, Meulaboh	2.868	-	-
17	Simelue, Sinabang	884	-	-
18	Aceh Selatan, Tapak Tuan	2.250	96	0,043
19	Aceh Singkil	997	-	-
20	Bener Meriah	1.245	-	-
21	Gayo Lues, Blang Kejeren	-	-	-
22	Pidie Jaya, Meureudu	-	347	-
23	Subulussalam	-	-	-
TOTAL		**46.183**	**28.084**	**0,608**

Sumber : Dishubkomintel Aceh, 2010

D. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Aceh memiliki 19 pelabuhan, 12 unit bandara dan 33 unit terminal bis yang tersebar di kabupaten/kota. Pelabuhan laut yang terbesar adalah Malahayati, Krueng Geukueh, Meulaboh dan Ulee Lheu sebagai pelabuhan penyebarangan dan angkutan. Bandara Sultan Iskandar Muda adalah bandara internasional yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan terminal bis berlokasi di seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2009

No	Kab/Kota	Transportasi Laut		Bandara	Terminal Bis		
		Pelabuhan Angkutan	Pelabuhan Penyeberanga		Tipe A	Tipe B	Tipe C
1	Sabang	1	1	1	-	-	-
2	Banda Aceh	-	1		1	-	-
3	Aceh Besar	1	1	1	-	-	1
4	Pidie	-	-	-	-	-	1
5	Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-
6	Bireuen	-	-	-	-	1	2
7	Aceh Utara	-	-	1	-	2	1
8	Lhokseumawe	1	-	1	1	-	-
9	Aceh Timur	1	-	-	-	-	1
10	Langsa	1	-	-	1	-	-
11	Aceh Tamiang	-	-	-	-	1	2
12	Aceh Tengah	-	-	1	-	1	4
13	Bener Meriah	-	-	-	-	-	1
14	Gayo Lues	-	-	1	-	-	1
15	Aceh Tenggara	-	-	1	-	-	1
16	Aceh Jaya	1	-	-	-	1	-
17	Aceh Barat	1	-	-	1	-	-
18	Aceh Barat Daya	1	1	1	-	-	1
19	Nagan Raya	-	-	1	-	1	-
20	Aceh Selatan	1	1	1	-	-	2
21	Subulssalam	-	-	-	-	1	-
22	Aceh Singkil	1	2	1	-	-	1
23	Simeulue	1	1	1	-	-	1
Jumlah		**11**	**8**	**12**	**4**	**8**	**20**

Sumber : Data Dishubkomintel, 2009

Kondisi pelabuhan laut dan udara ditinjau dari kelengkapan prasaran fasilitas pokok, fasilitas keselamatan dan fasilitas penunjang, memiliki persentase yang bervariasi. menunjukkan bahwa Pelabuhan laut Malahayati dan Lhokseumawe memiliki persentase perlengkapan sarana dan prasarana yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelabuhan laut lainnya. Sementara itu Bandar udara internasional Sultan Iskandar Muda merupakan bandara bertaraf internasional dan memiliki persentase kelengkapan sarana dan prasarana yang terlengkap dibandingkan seluruh bandara lainnya. Untuk lebih jelasnya kondisi masing-masing pelabuhan laut dan bandara yang terdapat di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Kondisi Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2009

	Jenis Pelabuhan/ bandara	Kondisi Sarana dan Prasarana (%)
1	3	4
Pelabuhan Angkutan		
1	Pelabuhan Malahayati	73.91
2	Pelabuhan Krueng Geukeuh Lhokseumawe	65.00
3	Pelabuhan Kuala Langsa	49.35
4	Pelabuhuan Meulaboh	38.40
5	Pelabuhan Sabang	39.78
6	Pelabuhan Calang	10.87
7	Pelabuhan Susoh	39.35
8	Pelabuhan Tapak Tuan	36.52
9	Pelabuhan Singkil	27.39
10	Pelabuhan Sinabang	30.22
11	Pelabuhan Idi	14.13
Pelabuhan Penyeberangan		
1	Pelabuhan Ulee Lheue	97.00
2	Pelabuhan Balohan Sabang	59.38
3	Pelabuhan Lamteng Pulau Aceh	17.71
4	Pelabuhan Sinabang	42.71
5	Pelabuhan Singkil	40.63
6	Pelabuhan Pulau Banyak	52.08
7	Pelabuhan Labuhanhaji	51.13
8	Pelabuhan Meulaboh	0.00
Bandar Udara		
1	Bandara Sultan Iskandar Muda	87.07
2	Bandara Poin A Lhoksukon	35.61
3	Bandara Malikulsaleh Lhokseumawe	28.9
4	Bandara Lasikin Sinabang	31.34
5	Bandara Teuku Cut Ali Tapak Tuan	31.34
6	Bandara Kuala Batee Blang Pidie	29.88
7	Bandara Rembele Takengon	28.9
8	Bandara Alas Leuser Kutacane	31.34
9	Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya	38.05
10	Bandara Maimun Saleh Sabang	54.15
11	Bandara Hamzah Fansuri Singkil	31.71
12	Bandara Blang Keujeuren	2.44

Catatan : Pelabuhan Meulaboh belum dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami
Sumber : Data Dishubkomintel, 2009

2.4.2. Pelayanan Penunjang

2.4.2.1. Penanaman Modal (Investasi)

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah perusahaan yang mengajukan proposal permohonan izin investasi baik jenis PMA maupun PMDN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009

jumlah perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin sejumlah 289 perusahaan yang terdiri dari PMA 121 buah dan PMDN 168 buah dan pada tahun 2010 menjadi 302 perusahaan yang terdiri dari PMA 134 buah dan PMDN 168 buah. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di Aceh sangat tinggi. Namun realisasi investasi masih rendah akibat terkendala oleh beberapa faktor diantaranya masih minimnya infrastruktur seperti ketersediaan sumber daya energi listrik, tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) serta permasalahan pertanahan.

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan investasi di Aceh yang menggunakan fasilitas impor barang modal selama tiga tahun terahir (2007-2009) belum menggembirakan. Selama periode 2007-2009 investasi yang terjadi relatif kecil. sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dari rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai USD 143.32 juta yang dapat terealisasi adalah hanya USD 122.3 juta. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari rencana investasi senilai Rp.6.303.047.045.730 yang terealisasi adalah Rp.6.254.047.045.730. Sedangkan pada tahun 2010, rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai USD13.562.166.556 sedangkan yang terealisasi hanya USD 2.304.311.771. Sementara itu, rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp12.738.088.841.569 tetapi yang terealisasi hanya Rp.6.303.047.045.730. Rendahnya investasi yang terjadi di Aceh juga tercermin dari perkembangan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang cenderung masih sangat tinggi yaitu sebesar 1,02 (2005); 0,82 (2006); 5,55 (2007) dan 4,8 (2008).

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN berupa tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (Indonesia). Dari sejumlah nilai investasi PMA yang direncanakan di Aceh, direncanakan akan mampu menyerap 745 orang tenaga kerja asing dan 43.280 orang tenaga kerja lokal (Indonesia), sedangkan realisasinya hanya 26 orang tenaga kerja asing dan 17.307 orang tenaga kerja lokal (Indonesia). Sedangkan investasi PMDN direncanakan akan mampu menyerap tenaga kerja asing 2.082 orang dan

131.454 orang tenaga kerja lokal (Indonesia), sementara itu yang terealisasi hanya 10 orang tenaga kerja asing dan 53.942 orang tenaga kerja lokal (Indonesia).

Rasio daya serap tenaga kerja yaitu perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Di Aceh rasio daya serap tenaga kerja pada PMA yaitu 129 orang per PMA dan pada PMDN 321 orang per PMDN.

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA), Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Perkembangan Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) Sampai dengan November 2010

No	Jenis Investasi	Jumlah Investasi	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Rencana Tenaga Kerja		Realisasi Tenaga Kerja	
					Asing (orang)	Indonesia (Lokal) (orang)	Asing (orang)	Indonesia (Lokal) (orang)
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	134	USD 13,562,166,556	USD 2,304,311,771	745	43,280	26	17,307
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	168	Rp 12,738,088,841,569	Rp 6,306,047,045,730	2,082	131,454	10	53,942

Sumber : Badan Investasi dan Promosi Aceh

2.4.2.2. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam menyerap tenaga kerja. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapi UMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan yang pasar tinggi, terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku permodalan, sarana prasarana serta informasi pasar. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, tantangan utama ke depan adalah masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar dan regional bahkan internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan

ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis *agro industry*, industri kreatif, dan inovasi.

A. Persentase Koperasi Aktif

Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh (2009) jumlah koperasi yang ada di Aceh 6.592 unit, sejumlah 3.663 (55,6%) unit merupakan koperasi aktif dan 2.929 (44,4%) unit tidak aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi di Aceh masih belum beraktivitas seperti yang diharapkan (Tabel 2.27).

Tabel 2.27
Persentase Koperasi Aktif di Aceh
Tahun 2004 - 2009

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Persentase Koperasi Tidak Aktif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*4*	*5*
1	2004	4,836	3,751	77.56	1,085	22.44
2	2005	5,011	3,004	59.95	2,007	40.05
3	2006	5,522	3,341	60.50	2,181	39.50
4	2007	5,800	3,910	67.41	1,890	32.59
5	2008	6,570	4,246	64.63	2,324	35.37
6	2009	6,592	3,663	55.57	2,929	44.43

Sumber : Disperindagkop dan UKM, 2010

B. Jumlah UMKM Aktif dan BPR

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh yang tersebar di 23 kabupaten/kota sejumlah 49.714 unit. UMKM tersebut bergerak pada berbagai sektor seperti perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan dan transportasi. Sektor perdagangan/jasa memiliki usaha mikro 21.599 unit, usaha kecil 12.223 unit, usaha menengah 2.202 unit; sektor pertanian memiliki usaha mikro 3.984 unit, usaha kecil 307 unit, usaha menengah 29 unit; sektor pertambangan memiliki usaha mikro 152 unit, usaha kecil 22 unit dan usaha menengah 5 unit; sektor industri memiliki usaha mikro 5.601 unit, usaha kecil 443 unit dan usaha menengah 185 unit; sektor perikanan dan kelautan memiliki usaha mikro 1.911 unit, usaha kecil 223 unit, usaha menengah 1 unit; sektor transportasi memiliki usaha mikro 595 unit, usaha kecil 226 unit dan 6 unit usaha menengah (Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh, 2009). Sedangkan BPR yang aktif di Aceh sebanyak 15 unit terdiri dari 8 unit BPR Syriah dan 7 unit BPR konvensional.

2.4.2.3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Perolehan akte kelahiran masih terbatas, hanya 15,34 persen anak Aceh yang memiliki akte kelahiran (UNICEF, 2008). Penyebab utama adalah ketidaktahuan orang tua bahwa kelahiran anak wajib tercatat dan ketidaktahuan tempat untuk melakukan pencatatan. Sedangkan di sekolah, masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik, verbal dan psikologis (UNICEF, 2007).

2.4.2.4. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Aceh setiap tahun terus bertambah. Pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.814.000 orang dan pada tahun 2009 menjadi 1.898.000 orang atau mengalami kenaikan sebesar 8,40 persen. Sebaliknya jumlah pengangguran di Aceh mengalami penurunan yang signifikan yaitu 189.000 orang pada tahun 2006 dan menjadi 166.000 orang pada tahun 2009, atau mengalami penurunan sebesar 12,17 persen. Lebih besarnya persentase penurunan jumlah orang yang menganggur jika dibandingkan dengan persentase kenaikan jumlah angkatan kerja mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus dapat ditekan setiap tahunnya. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari semakin luasnya lapangan kerja yang tercipta dan semakin meningkatnya peluang kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Berdasarkan komposisi umur, angkatan kerja di Aceh didominasi oleh angkatan kerja muda yang berumur antara 20-39 tahun. Dengan demikian, sampai 20 tahun kedepan angkatan kerja ini diperkirakan masih berada dalam umur produktif sehingga menjadi aset yang sangat berharga dalam pembangunan ekonomi kedepan.

Sektor pertanian adalah lapangan usaha yang paling besar dalam penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi persentase penyerapannya terus mengalami penurunan akibat meningkatnya daya serap di sektor ekonomi lainnya (Tabel 2.28).

Tabel 2.28
Tren Ketenagakerjaan Di Aceh
2006 - 2010

No	KEGIATAN UTAMA	Tahun (Juta Jiwa)				
		2006	2007	2008	2009	2010
LAKI-LAKI						
1	Penduduk 15+	1.355	1.383	1.463	1.497	1.516
2	Angkatan Kerja					
	- Bekerja	1.048	1.04	1.072	1.104	1.102
	- Pengangguran	0.078	0.081	0.082	0.090	0.089
3	Bukan Angkatan Kerja	0.229	0.262	0.310	0.302	0.326
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK (%)	83.08	81.05	78.82	79.79	78.53
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.93	7.21	7.11	7.52	7.43
PEREMPUAN						
1	Penduduk 15+	1.392	1.422	1.510	1.54	1.561
2	Angkatan Kerja					
	- Bekerja	0.577	0.53	0.550	0.628	0.665
	- Pengangguran	0.111	0.091	0.089	0.076	0.078
3	Bukan Angkatan Kerja	0.705	0.8	0.870	0.836	0.818
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK (%)	49.4	43.7	42.39	45.7	47.58
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	16.16	14.59	13.97	10.74	10.74

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

2.4.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan besarnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bidang Pemberdayaan Perempuan masih terdapat beberapa kendala, terutama disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender. Namun demikian, beberapa kemajuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dicapai antara lain telah ditetapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Saat ini juga tersedia beberapa fasilitas pendukung untuk perempuan dan anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 23 kabupaten/kota. Selain itu juga telah dibangun beberapa jaringan pelayanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Aceh bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur Aceh Nomor 260/322/2006, program tersebut juga telah dibentuk di Kabupaten Bireuen, Aceh Barat dan Nagan Raya. Selain program tersebut Pemerintah Aceh Juga telah membentuk Gugus Tugas Perhapusan Perdagangan Perempuan dan Anak melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 yang telah dilengkapi dengan Rencana Aksi Provinsi dan *Standard Operational Procedure* (SOP) PPT bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

A. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan masih terdapat beberapa kendala, terutama disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini terlihat sangat kurangnya perempuan yang menduduki posisi di lembaga legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Dari 46 posisi yang tersedia untuk kepala daerah kabupaten/kota, hanya ada 1 yang dijabat oleh perempuan. Begitu pula di lembaga DPR, dari 69 kursi hanya 4 kursi yang ditempati perempuan. Walaupun demikian persentase perempuan di lembaga pemerintah seperti Kota Banda Aceh cukup tinggi yaitu sebesar 74,7 persen.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pada umumnya perempuan yang bekerja pada lembaga swasta masih sangat rendah, misalnya persentase perempuan di lembaga swasta di Kota Banda Aceh hanya sebesar 25,28 persen. Dengan kata lain persentase pekerja di lembaga swasta didominasi oleh laki-laki.

C. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dimana korbannya sebagian besar adalah perempuan. Data tahun 2009 menunjukkan

bahwa terjadi 119 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 93 di antaranya adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di Aceh, rasio KDRT ini sebesar 1,13%. Angka ini hanya dilihat dari Kota Banda Aceh, sedangkan kabupaten lainnya tidak bisa dilihat karena KDRT tidak dilaporkan.

D. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur merupakan proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan masih belum ada perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi. Di Aceh tidak terdapat persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, hal ini karena rata-rata anak yang bekerja sifatnya hanya membantu orang tua dan bukan bekerja sendiri.

2.4.2.6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

A. Rata-Rata Jumlah Anak Per Pasangan Usia Subur

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2007), angka fertilitas di Aceh adalah 3,1. Angka fertilitas didefinisikan sebagai jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai pada akhir masa reproduksi (usia subur). Apabila kita melihat kecenderungannya maka angka fertilitas di Aceh menunjukkan tren menurun, pada tahun 1971 angka fertilitas total menurut Provinsi adalah 6, pada tahun 1990 berjumlah 4. Hal ini berarti tingkat penurunan rata-rata daripada angka fertilitas di Aceh adalah 7,42 persen.

B. Rasio Akseptor Keluarga Berencana

Gambaran mengenai Akseptor Keluarga Berencana (KB) di Aceh menunjukkan bahwa persentase perempuan berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang menjadi akseptor KB pada tahun 2005 dan 2009 mengalami kenaikan dari 23,20 persen menjadi 29,10 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung program keluarga berencana.

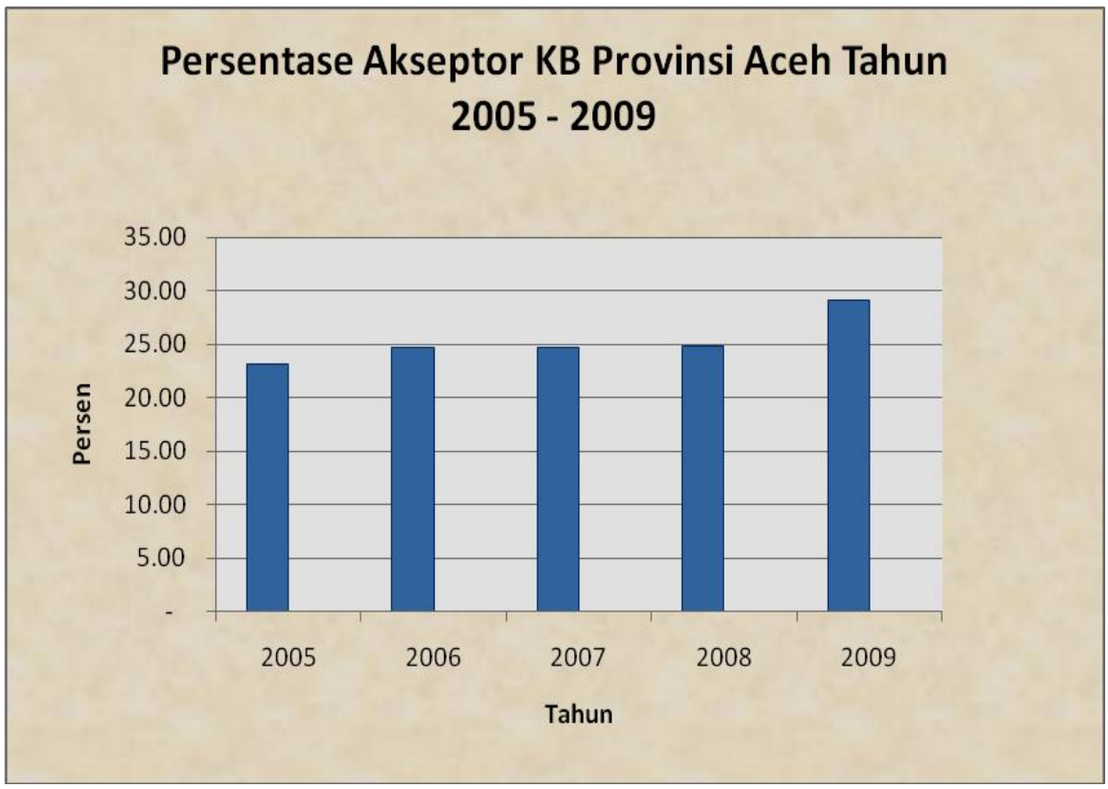

Gambar 2.3. Grafik Persentase Akseptor KB Aceh Tahun 2005-2009

2.4.2.7. Komunikasi dan Informatika

A. Jumlah Jaringan Komunikasi

Dishubkomintel (2009), di Aceh terdapat 6 operator telekomunikasi seluler yang telah beroperasi melalui tower *base transceirver station* (BTS) di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan untuk jaringan telekomunikasi yang terkoneksi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan 23 Kabupaten/kota menggunakan teknologi *Wireless* 5,8 Ghz dan jaringan VSAT. Sementera itu, pada setiap kabupaten/kota tersedia 1 Noc kabupaten, 2 remote client, 3 BTS yang memiliki *Wireless* Akses *Point* yang bisa di gunakan oleh masyarakat secara gratis, 8 unit personal komputer untuk *telecenter* bagi masyarakat, 8 unit telpon analog berbasis Voip. Jumla tower dan operator seluler secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29
Jumlah Tower dan Operator Selular

No	Kab/Kota	Jumlah Tower Operator Selular							
		PT. Hutchinson CP Telkommunications	PT. Exelcomindo Pratama Tbk	PT.Telkomsel	PT.Telkom	PT.Indosat	PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	Freen	Smart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sabang		2	7	4	2	-	-	-
2	Banda Aceh	5	14	38	1	9	-	-	3
3	Aceh Besar	-	19	67	7	25	-	8	7
4	Pidie	-	10	38	3	10	-	2	1
5	Pidie Jaya	-	5	11	1	5	2	-	-
6	Bireuen	-	11	36	1	9	2	3	1
7	Aceh Utara	-	14	35	6	11	6	-	-
8	Lhokseumawe	-	11	27	2	12	1	1	-
9	Aceh Timur	-	10	29	4	7	2	-	-
10	Langsa	-	6	11	1	3	2	-	-
11	Aceh Tamiang	-	6	11	1	5	2	-	-
12	Aceh Tengah	-	4	16	2	5	-	-	-
13	Bener Meriah	-	5	10	1	4	-	-	-
14	Gayo Lues	-	1	6	-	1	-	-	-
15	Aceh Tenggara	-	6	14	1	5	-	-	-
16	Aceh Jaya	-	4	14	6	2	-	-	-
17	Aceh Barat	-	6	23	1	5	-	-	-
19	Nagan Raya	-	5	14	2	7	-	-	-
18	Aceh Barat Daya	-	5	12	1	6	-	-	-
20	Aceh Selatan	-	9	26	-	12	-	-	-
21	Subulssalam	-	1	3	-	2	-	-	-
22	Aceh Singkil	-	5	10	-	4	-	-	-
23	Simeulue	-	1	13	-	2	-	-	-
Jumlah		5	160	471	45	153	17	14	12

Sumber : Data Dishubkomintel, 2009

Selain itu, jasa komunikasi juga dilayani melalui pelayanan pos yang sudah menjangkau ke pelosok dan daerah terpencil, namun baru mencapai 75 persen wilayah ibu kota kecamatan.

B. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Berdasarkan data BPS (2009), jumlah wartel/warnet di Aceh sebanyak 211 unit yang tersebar di kabupaten/kota. Rasio wartel/warnet terhadap 1.000 penduduk adalah 0,05. Dengan kata lain 5 wartel/warnet melayani 100.000 penduduk. Jumlah wartel/warnet ini masih terlalu rendah dibandingkan dengan jumlah pengguna.

Persentase penduduk yang menggunakan Internet masih relatif kecil yaitu sebesar 7,01%. Jika dibandingkan antara rumah tangga pengguna internet di perkotaan dengan perdesaan persentase penduduk yang menggunakan internet di perkotaan jauh lebih tinggi yaitu masing-masing untuk perkotaan (19,24%) dan untuk perdesaan (3,24%).

C. Media Cetak Nasional/Lokal

Media cetak nasional yang beredar di Aceh sampai tahun 2010 antara lain Kompas, Media Indonesia, Waspada, Analisa, Suara Pembaruan Indonesia, The Jakarta Post, Seputar Indonesia, Republika, Koran Tempo dan Bisnis Indonesia. Sedangkan media cetak lokal yang beredar di Aceh antara lain Serambi Indonesia, Harian Aceh, Harian Independen, Rakyat Aceh, Metro, Pro Haba dan Raja Post.

Secara umum media cetak nasional yang beredar di Aceh sampai ke tangan pembaca pada siang/sore hari. Hal ini disebabkan semua media cetak nasional dicetak di luar Aceh sehingga memerlukan waktu yang lama untuk sampai di Aceh. Demikian halnya terhadap beberapa media lokal Aceh di beberapa daerah mengalami keterlambatan karena jarak tempuh yang jauh dari tempat percetakan.

D. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Berdasarkan Dishubkomtel (2009), jumlah lembaga penyiaran radio di Aceh sebanyak 112 unit yang tersebar di 18 kabupaten/kota. Lembaga penyiaran radio tersebut terdiri dari Lembaga Penyiaran Publik, Swasta dan Komunitas. Kondisi lembaga penyiaran radio ini secara menyeluruh tidak dalam kondisi sempurna. Secara terperinci jumlah maupun kondisi penyiaran radio yaitu Banda Aceh 20 unit (100%), Aceh Besar 14 unit (100%), Pidie 10 unit (70%), Bireuen 18 unit (80%), Aceh Utara 9 unit (90%), Aceh Timur 6 unit (90%), Aceh Tamiang 1 unit (60%), Aceh Jaya 6 unit (40%), Aceh Barat 8 unit (70%), Nagan Raya 1 unit (50%), Aceh Selatan 13 unit (80%), Singkil 2 unit (60%), Aceh Tengah 2 unit (70%), Aceh Tenggara 2 unit (70%), Gayo Lues 2 unit (70%), Simeulue 3 unit (60%), Subulussalam 1 unit (70%).

Sementara itu, di Aceh juga terdapat Lembaga Penyiaran Televisi yang terdiri dari Lembaga Penyiaran Televisi Publik 1 unit (TVRI), swasta lokal 1 unit (AtjehTV), komunitas 1 unit (RajawaliTV) dan televisi swasta nasional yang telah membuka kantor jaringannya di Aceh diantaranya MetroTV, RCTI, MNC, TransTV dan SCTV. Stasiun Televisi ini terdapat di Aceh Besar dan direlay ke sebahagian kabupaten/kota di Aceh.

2.4.2.8. Pertanahan

A. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Aceh (September, 2010) luas lahan yang terdaftar mencapai 1.051.628,39 ha. Lahan yang terdaftar

tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis status lahan yaitu hak milik (HM) seluas 20,84 persen, Hak Guna Usaha (HGS) 50,86 persen, Hak Guna Bangunan (HGB) 0,01 persen, Hak Pakai (HP) 0,22 persen, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 28,04 persen dan wakaf 0,03 persen. Sedangkan luas lahan yang belum terdaftar mencapai 4.624.221,61 ha atau 81,47 persen dari luas Aceh (5.675.850 ha).

2.4.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Aceh mempunyai beberapa model pemberdayaan masyarakat secara langsung yang dilakukan melalui berbagai program diantaranya Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG), Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), Program Kredit Peumakmue Nanggroe (PKPN) dan berbagai program lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu pemerintah pusat juga mempunyai program dalam pemberdayaan masyarakat dan desa seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Adapun jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh tahun 2010 adalah 207 lembaga. Secara umum lembaga swadaya masyarakat ini bergerak pada bidang ekonomi, lingkungan, kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM), gender dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

2.4.2.10. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

A. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah Pemerintah Aceh. Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumberdaya manusia.

Pada tahun 2010, jumlah perpustakaan di Aceh sebanyak 1.410 unit. Perpustakaan ini tersebar pada 23 kabupaten/kota berupa perpustakaan umum di kabupaten/kota, perpustakaan di perguruan tinggi, perpustakaan sekolah (SD/MIN, SMP/MTsN, SMA/MAN dan Pesantren), perpustakaan di

instansi/lembaga, Rumah Ibadah, perpustakaan gampong/desa dan perpustakaan yang ada di puskesmas.

B. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Menurut Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh (2010), pengunjung perpustakaan merupakan pemakai perpustakaan yang berkunjung untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasarkan data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Pengunjung perpustakaan di Aceh pada tahun 2009 berjumlah 459.528 orang. Rata-rata pengunjung perpustakaan per hari sebesar 1.277 orang dan per bulan sebesar 38.294 orang. Pengunjung tersebar pada setiap ruang baca perpustakaan baik ruang baca dewasa, remaja, agama maupun ruang anak-anak (Tabel 2.30).

Tabel 2.30
Jumlah Perpustakaan di Aceh Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Perpustakaan Umum Kab/Kota	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Sekolah							Perpustakaan Instansi	Rumah Ibadah	Perpustakaan Gampong	Perpustakaan Puskesmas	Jumlah
				SD	SMP	SMA	MIN	MTsN	MAN	Pesantren					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Banda Aceh	1	51	18	14	11	4	2	4	12	25	7	31	1	181
2	Aceh Besar	1	5	4	6	5	2	1	2	7	3	2	64	1	103
3	Pidie	1	0	3	5	4	1	1	2	2	2	2	54	1	78
4	Pidie Jaya	0	0	2	4	2	2	1	1	2	1	0	27	0	42
5	Bireuen	0	1	4	5	2	2	1	1	2	1	1	53	1	74
6	Aceh Utara	1	1	6	6	3	1	1	2	3	3	3	68	1	99
7	Lhokseumawe	0	1	8	5	2	1	1	2	2	3	1	17	0	43
8	Aceh Timur	1	1	3	4	2	1	1	2	3	1	2	53	1	75
9	Langsa	1	1	6	6	2	2	2	1	1	2	1	21	0	46
10	Aceh Taming	1	0	3	6	2	2	2	2	2	1	1	44	1	67
11	Aceh Tenggara	1	0	2	3	2	1	1	1	0	1	0	42	0	54
12	Aceh Singkil	1	0	3	4	2	1	2	1	2	1	1	29	0	47
13	Subulussalam	0	0	4	3	1	1	1	1	1	0	0	16	0	28
14	Aceh Selatan	1	0	8	8	5	3	2	1	2	3	2	40	0	75
15	Aceh Barat Daya	1	0	6	6	5	2	2	1	2	2	2	42	0	71
16	Nagan Raya	1	0	2	4	2	1	1	1	1	0	0	29	0	42
17	Aceh Barat	1	0	7	6	3	3	1	2	2	2	1	47	1	76
18	Aceh Jaya	0	0	2	4	2	1	1	1	0	0	0	18	0	29
19	Sabang	1	0	4	2	1	1	1	1	0	1	1	15	1	29
20	Bener Meriah	1	0	2	2	2	2	1	1	1	1	2	29	0	44
21	Aceh Tengah	1	1	4	4	4	2	1	2	1	2	2	35	1	60
22	Gayo lues	1	0	2	2	2	0	0	1	0	0	1	17	0	26
23	Simeulue	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	16	0	21
Jumlah		**17**	**62**	**104**	**110**	**68**	**36**	**27**	**34**	**48**	**55**	**32**	**807**	**10**	**1410**

Sumber : Badan Arsip dan Perpustakaan, 2010

Tingkat pengunjung perpustakaan ini merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Semakin tinggi

pengunjung perpustakaan, maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi pendidikan.

2.4.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat umum diperlukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi Wilayatul Hisbah (Pol. WH). Satpol PP mempunyai fungsi untuk membantu menyelenggarakan ketentraman, keamanan dan menegakkan peraturan serta kebijakan Daerah. Sedangkan Pol. WH mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang Syariat Islam serta berwenang menegur, menasehati dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dibidang Syariat Islam di Aceh. Pada tahun 2009 jumlah anggota Satpol PP sebanyak 4.422 personil dan jumlah Pol. WH sebanyak 1.255 personil (Profil PP dan WH, 2010).

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk adalah 10,29 yang bermakna bahwa setiap 10 personil Satpol PP melayani 10.000 penduduk. Sedangkan rasio jumlah Pol. WH per 10.000 penduduk adalah 2,92 yang bermakna bahwa setiap 3 orang Pol. WH melayani 10.000 penduduk. Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk Aceh, Satpol PP dan Pol. WH yang ada saat ini masih kurang sehingga personil Satpol PP dan Pol. WH perlu disesuaikan dimasa yang akan datang.

B. Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Kesbangpol dan Linmas (2010), menginformasikan bahwa terdapat 19.180 anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) di Aceh. Para anggota Linmas ini bertugas menjaga ketertiban masyarakat. Peran anggota Linmas dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam menertibkan kegiatan Pemilu 2009 di Aceh. Rasio anggota Linmas terhadap per 10.000 penduduk adalah 1,9. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 2 anggota Linmas melayani 10.000 penduduk. Jumlah ini masih tergolong relatif kecil.

2.4.2.12. Pemuda dan Olah Raga

A. Organisasi Pemuda dan Olah Raga

Menurut Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh (2009), jumlah organisasi kepemudaan di Aceh sebanyak 63 organisasi yang terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Anggota organisasi kepemudaan tersebut antara lain; Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiah, Gerakan Pemuda Alwashliah, Pemuda Panca Marga, Pemuda Muslimin Indonesia dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia.

Organisasi olah raga yang terdapat di Aceh sejumlah 17 organisasi, merupakan wadah berkumpul dan beraktivitasnya para atlet diberbagai kegiatan cabang olah raga yang diminati oleh masyarakat Aceh. Organisasi tersebut merupakan cabang dari kepengurusan organisasi di pusat antara lain; Pengurus Daerah Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PD PGSI), Pengurus Daerah Federasi Olah Raga Karate-do Indonesia (PENGDA FORKI), Pengurus Daerah Keluarga Olah Raga Tarung Derajat (PENGDA KODRAT) dan Pengurus Daerah Federasi Panjat Tebing Indonesia (PENGDA FPTI).

B. Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga

Kegiatan kepemudaan pada umumnya berkaitan dengan organisasi kepemudaan terutama dalam hal olah raga, kepemimpinan dan partisipasi dalam berbagai bidang pembangunan seperti ekonomi, sosial, budaya, iptek dan politik. Selain itu kegiatan kepemudaan mempunyai tujuan untuk membentuk karakter kebangsaan (*nation building*), dan budaya prestasi dan sportifitas.

Menurut Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh (2009), kegiatan olah raga yang berkembang dalam masyarakat Aceh terhimpun di dalam berbagai kejuaraan baik tingkat Provinsi maupun Nasional. Kerjuaraan tersebut antara lain untuk tingkat daerah Pekan Olah Raga Aceh (PORDA), Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) dan untuk tingkat Nasional adalah Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olah Raga Siswa Pesantren Nasional (POSPENAS) dan Pekan Olah Raga Nasional (PON).

2.5. Daya Saing Daerah

2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 2000 tahun 2005-2008 menurut BPS (2009) sebesar 11.522,46 milyar rupiah, dengan jumlah penduduk Aceh 4.293.915 jiwa maka pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebesar 2.683.332,11 rupiah pertahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita untuk makanan (pangan) sebesar 1.726.396,54 rupiah dan untuk bukan makanan (non pangan) sebesar 956.935,57 rupiah.

2.5.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh menurut BPS (2009) bervariasi berdasarkan kelompok komoditi yang diusahakan dengan NTP gabungan rata-rata sebesar 98,68. Kelompok perkebunan rakyat memiliki NTP yang tertinggi yakni 103.50 dibandingkan dengan kelompok komoditi lainnya. Kelompok petani hortikultura memiliki NTP rata-rata 99,65, kelompok peternakan memiliki NTP 98,13 dan kelompok perikanan memiliki NTP 99,36.

2.5.1.3. Produktivitas Total Tenaga Kerja Daerah

Pada tahun 2008 produktivitas tenaga kerja paling tinggi di Aceh masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 612.235.565,82 rupiah yang disusul oleh sektor bank dan lembaga keuangan sebesar 58.387.610,06 rupiah dan sektor industri pengolahan sebesar 47.770.567,76 rupiah. Sedangkan sektor pertanian yang menampung tenaga kerja terbesar di Aceh hanya memiliki nilai produktivitas tenaga kerja sebesar 10.460.367,49 rupiah. Secara umum nilai produktivitas tenaga kerja tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2007, dimana pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 796.130.757,48 rupiah yang disusul oleh sektor bank dan lembaga keuangan sebesar 60,892,275.48 rupiah dan sektor industri pengolahan sebesar 59.248.535,85 rupiah (Tabel 2.31).

Tabel 2.31
Produktivitas Tenaga Kerja Per Sektor Ekonomi Tahun 2007 dan 2008 Berdasarkan Harga Konstan 2000

No	Sektor	Total Tenaga Kerja		PDRB Migas per Sektor				Produktivitas Tenaga Kerja per Sektor				Nilai Tambah
		2007	2008	2007		2008		2007		2008		
		Org	Org	Milyar Rupiah	%	Milyar Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertanian	780,344	786,198	8,157.60	22.67	8,223.92	24.13	10,453,851.12	1.00	10,460,367.49	1.23	6,516.37
2	Pertambangan dan Penggalian	9,162	8,660	7,294.15	20.27	5,301.96	15.55	796,130,757.48	76.09	612,235,565.82	71.93	(183,895,191.66)
3	Industri Pengolahan	75,812	86,762	4,491.75	12.48	4,144.67	12.16	59,248,535.85	5.66	47,770,567.76	5.61	(11,477,968.09)
4	Listrik dan Air Minum	2,798	2,691	82.06	0.23	92.51	0.27	29,328,091.49	2.80	34,377,554.81	4.04	5,049,463.32
5	Bangunan dan Kontruksi	104,930	103,816	2,147.33	5.97	2,129.06	6.25	20,464,404.84	1.96	20,508,014.18	2.41	43,609.34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	248,516	252,853	5,665.99	15.75	5,926.25	17.39	22,799,296.62	2.18	23,437,530.90	2.75	638,234.27
7	Pengangkutan dan Komunikasi	82,915	88,842	2,136.46	5.94	2,165.89	6.35	25,766,869.69	2.46	24,379,122.49	2.86	(1,387,747.20)
8	Bank dan Lembaga Keuangan	8,596	9,427	523.43	1.45	550.42	1.61	60,892,275.48	5.82	58,387,610.06	6.86	(2,504,665.42)
9	Jasa-jasa	257,688	282,749	5,484.32	15.24	5,550.81	16.28	21,282,791.59	2.03	19,631,581.37	2.31	(1,651,210.23)
JUMLAH		1,570,761	1,621,998	35,983.09	100.00	34,085.49	100.00	1,046,366,874.17	100	851,187,914.87	100	(195,178,959.30)

Sumber: Bappeda, 2010 (data diolah)

Penurunan produktivitas total tenaga kerja Aceh lebih disebabkan oleh berkurangnya produktivitas di sektor pertambangan dan penggalian akibat turunnya lifting atau produksi migas Aceh, dimana kontribusi sektor ini terhadap produktivitas tenaga kerja total sebesar 71,93 persen tahun 2008 dan sebesar 76,09 persen pada tahun 2007. Adapun sektor-sektor yang mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah pertanian, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran.

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang paling tinggi menampung tenaga kerja (48,5%). Namun sektor ini memiliki nilai tambah produktivitas tenaga kerja yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya. Oleh karena itu sektor pertanian harus menjadi sektor prioritas dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2.5.1.4. Produktivitas Pertanian

Produksi komoditas pangan Aceh dalam beberapa tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif. Produksi padi mengalami peningkatan sebesar 11,02 persen yaitu dari 1.402.287 juta ton pada tahun

2008 meningkat menjadi 1.556.858 ton pada tahun 2009. Komoditas pangan yang mengalami peningkatan produksi paling signifikan adalah jagung dan kedelai. Produksi jagung mengalami peningkatan 22,16 persen yaitu sebesar 112.894 ton (2008) meningkat menjadi 137.910 ton (2009). Produksi kedelai bahkan mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu sebesar 44,55 persen, dari 43.885 ton pada tahun 2008 meningkat menjadi 63.436 ton pada tahun 2009.

Dinilai dari sisi produktivitas, walaupun setiap tahunnya produktivitas tanaman pangan Aceh terus mengalami peningkatan namun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan produktivitas rata-rata nasional. Produktivitas padi di Aceh saat ini adalah 4,33 ton/ha sedangkan nasional sudah mencapai 5,00 ton/ha seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Produktivitas Padi di Aceh dan Nasional
Tahun 2005-2009

NO	URAIAN	TAHUN									
		2005		2006		2007		2008		2009	
		Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh	Nasional	Aceh
1	Luas Panen(Ha)	11,839,060	337,893	11,786,430	320,789	12,147,637	360,717	12,327,425	329,109	12,883,576	359,375
2	Produksi (Ton)	54,151,097	1,411,650	54,454,937	1,350,748	57,157,435	1,533,369	60,325,925	1,402,287	64,398,890	1,556,858
3	Produkti-vitas (Ton/Ha)	4.57	4.18	4.62	4.21	4.71	4.25	4.89	4.26	5.00	4.33

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010

Produktivitas jagung mencapai 3,30 ton/ha sedangkan nasional mencapai 4,08 ton/ha. Sementara produktivitas kedele Aceh lebih baik dari rata-rata nasional yang mencapai 1,31 ton/ha, sedangkan Aceh sudah mencapai 1,33 ton/ha dengan jumlah produksi sebesar 43.855 ton/tahun (5,66 persen) atau menduduki peringkat ke empat nasional.

Tabel 2.33
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Menurut Komoditi Di Aceh Tahun 2007 - 2009

No	Komoditi	Produksi (Ton)			Perkembangan 2007 – 2009 (%)
		2007	2008	2009	
1	Padi	1,533,369	1,402,287	1,545,769	0.27
2	Jagung	125,155	112,894	13,791	3,29
3	Kedelai	19,029	43,885	63,436	49,38
4	Kacang Tanah	7,971	6,322	5,899	-9,55
5	Kacang Hijau	3,365	1,777	1,338	-26,69
6	Ubi Kayu	41,558	38,402	49,673	6,13
7	Ubi Jalar	15,188	13,172	15,142	-0,10

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh, 2009

Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (PPL) yang tersedia sebanyak 3.119 orang yang terdiri dari 1.190 orang PNS dan 1.129 orang tenaga harian lepas, jumlah Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) yang sudah terbentuk 1.230 kelompok, yang sudah berbadan hukum 114 kelompok dan yang belum berbadan hukum 1.116 kelompok (Tabel 2.34).

Tabel 2.34
Jumlah Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) di Aceh
Tahun 2009

No	KABUPATEN	LUAS TERSIER (Ha)	JUMLAH P3A	PERKEMBANGAN P3A			PENGESAHAN AD & ART			
				B	SB	BB	KEPDES	CAMAT	BUPATI	B. HUKUM
1	ACEH BESAR	10.062,10	178	16	55	107	158	94	55	2
2	PIDIE	15.709,00	194	2	41	152	189	115	53	31
3	BIREUEN	10.021,00	139	14	34	86	134	53	47	22
4	ACEH UTARA	13.435,00	181	10	73	99	153	111	77	5
5	ACEH TAMIANG	7.304,00	35	0	0	35	35	6	4	0
6	ACEH TIMUR	12.249,65	121	15	18	88	116	60	50	27
7	ACEH TENGAH	6.775,00	51	0	0	51	51	3	2	0
8	BENER MEURIAH	2.677,00	20	0	0	20	20	10	4	0
9	GAYO LUES	213,50	10	10	0	0	10	10	10	10
10	ACEH JAYA	1.111,00	12	6	3	3	12	7	7	1
11	NAGAN RAYA	4.025,00	57	0	0	57	57	38	21	6
12	ACEH BARAT	3.061,00	25	0	4	21	23	1	1	0
13	ACEH BARAT DAYA	4.158,61	60	17	16	19	60	30	30	10
14	ACEH SELATAN	4.490,88	67	1	34	32	67	41	38	0
15	ACEH TENGGARA	11.571,00	73	0	0	73	73	27	27	0
16	SIMEULUE	100,05	7	0	0	7	7	0	0	0
JUMLAH		**106.963,79**	**1230**	**91**	**278**	**850**	**1165**	**606**	**426**	**114**

Sumber : Dinas Pengairan, 2009

Sub sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian dan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dan secara langsung ikut mengurangi pengangguran.

Luas perkebunan di Aceh sampai dengan tahun 2009 mencapai 900.080 Ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 699.401 ha (77,7%) dan perkebunan besar swasta seluas 200.679 ha (22,30%). Luas areal tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,67 persen dari tahun 2008, terutama terjadi pada areal perkebunan rakyat. Peningkatan luas areal tertinggi terjadi pada komoditas kemiri yang mengalami kenaikan sebesar 57,94 persen, kemudian diikuti oleh nilam sebesar 32,48 persen. Berdasarkan jenis komoditas, kelapa sawit masih mendominasi luas areal perkebunan, yaitu 313.813 Ha (34,86%),

yang diikuti oleh Karet 132.694 Ha (14,74%) dan kopi 121.938 Ha (13,54%) serta kelapa dalam 101.150 Ha (11,30%).

Tabel 2.35
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Di Aceh Tahun 2006-2009

NO.	KOMODITI	PRODUKSI			
		2006	2007	2008	2009
KOMODITI NASIONAL					
1	KAKAO	14.866	17.705	25.697	23.84
2	KELAPA SAWIT	589.7	622.637	670.492	175.216
3	TEBU	34.27	16.318	16.423	33.447
4	KARET	56.9	56.113	61.58	61.299
5	CENGKEH	1.475	2.114	1.949	1.921
6	JAMBU METE	13	10	5	5
7	KOPI	41.894	48.08	47.811	48.644
8	TEMBAKAU	396	230	215	217
9	KELAPA HYBRIDA	1.808	1.216	2.107	2.104
10	LADA	244	252	182	223
11	KELAPA DALAM	63.147	64.387	52.325	57.875
KOMODITI LOKAL (ACEH)					
1	JARAK	0	0	20	20
2	PALA	5.623	5.706	4.495	5.484
3	NILAM	77	118	156	588
4	PINANG	16.518	19.158	14.982	20.787
5	CASIAVERA	550	667	671	638
6	SEREWANGI	2089	2273	0	4
7	JAHE	5098	4064	2257	1.907
8	KEMIRI	19.956	18.082	11.304	12.001
9	AREN	1218	1223	740	1.03
10	GAMBIR	67	67	66	53
11	SAGU	4075	4221	2851	2,975
12	KUNYIT	2958	2117	2001	2.238
13	KAPUK/RANDU	1.251	1.234	1.162	1.135
	JUMLAH	249.547	264.32	316.491	453.651

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tahun 2009

Bila dilihat dari kondisi tanaman perkebunan rakyat bahwa dari total luas areal perkebunan rakyat (699.401 ha), didominasi oleh tanaman menghasilkan sebesar 62,60 persen, tanaman belum menghasilkan sebesar 23,30 persen dan sisanya sebesar 14,23 persen merupakan tanaman tua dan rusak.

Total produksi berbagai komoditas perkebunan pada tahun 2009 tidak mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2008. Pertumbuhan produksi tertinggi terjadi pada komoditas nilam yaitu 291,03 persen yang diikuti oleh kakao 225,51 persen dan tebu 103,34 persen, sedangkan produksi cengkeh mengalami penurunan yang sangat drastis

sebesar -61,11 persen. Produksi kelapa sawit masih merupakan yang tertinggi diantara komoditas perkebunan lainnya yaitu sebesar 311.045 ton Tandan Buah Segar (TBS) atau (46,73%), dan produksi minyak sawit sebesar 286.452 ton serta inti sawit sebesar 129.412 ton.

Secara umum produktivitas komoditas perkebunan di Aceh terutama perkebunan rakyat masih rendah seperti kelapa sawit produktivitasnya masih 2,16 ton/ha/thn sedangkan kemungkinan produksi optimal dapat mencapai 15 ton/ha/tahun. Produktivitas kopi robusta 0,5 ton/ha/tahun dan kopi arabika 0,7 ton/ha/tahun sedangkan produktivitas optimal dapat mencapai 1,5 ton/ha/tahun. Rendahnya produktivitas komoditas perkebunan tersebut diantaranya diakibatkan oleh kualitas bibit, umur tanaman, dan sistem pemeliharaan tanaman yang belum optimal.

Selama periode 2008-2009 total populasi ternak mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 total populasi ternak berjumlah 14.840.899 ekor dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 15.430.451 ekor. Pertumbuhan populasi ternak dari tahun 2008 ke tahun 2009 meningkat sebesar 3,97 persen (Tabel 2.36).

Tabel 2.36
Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis
Tahun 2008-2009

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)		Pertumbuhan 2009 (%)
		2008	2009	
1	Sapi Perah	32	35	9,37
2	Sapi Potong	641,093	688,118	7,33
3	Kerbau	280,662	299,763	6,80
4	Kuda	3,243	3,357	3,51
5	Kambing	697,426	703,593	0,93
6	Domba	157,081	184,757	17,61
7	Babi	333	321	-3,60
8	Ayam Buras	8,904,869	9,172,015	2,99
9	Ayam Ras Petelur	181,887	190,799	4,89
10	Ayam Pedaging	1,346,308	1,480,939	10,00
11	Itik	2,596,927	2,674,835	3,00
12	Puyuh	31,028	31,959	3,00
Total		**14,840,889**	**15,430,451**	**3,97**

Sumber: Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh Tahun 2010.

Konsumsi daging dan telur di Aceh juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, konsumsi daging di Aceh sebesar 3,07 kg/kapita/tahun meningkat pada tahun 2009 menjadi 3,37 kg/kapita/tahun (tumbuh sebesar 9,77%).

Begitu juga dengan telur, meningkat dari 2,27 kg/kapita/tahun (2008) menjadi 2,57 kg/kapita/tahun (2009) atau tumbuh sebesar 13,22 persen. Sedangkan konsumsi daging rata-rata nasional adalah sebesar 8,37 kg/kapita/tahun (2007) dan 7,75 kg/kapita/tahun (2008). Konsumsi telur rata-rata nasional sebesar 20,64 kg/kapita/tahun (2007) dan mengalami penurunan menjadi 17,42 kg/kapita/tahun (2008).

Produksi perikanan di Aceh selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2008 total produksi perikanan Aceh adalah sebesar 167.907,5 ton dan mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen terhadap produksi tahun 2007 yang hanya mencapai sebesar 165.396,6 ton. Pada tahun 2009 total produksi perikanan mencapai 172.962,6 ton atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,01 persen. Produksi perikanan nasional juga mengalami peningkatan, dengan jumlah produksi pada tahun 2006 dan tahun mencapai 7.490.000 ton dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 8.240.000 ton serta menjadi 8.710.000 ton pada tahun 2008 dengan kenaikan rata-rata pertahun sebesar 7,86 persen.

Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang mengalami kehancuran sangat fatal pada saat bencana tsunami. Namun pertumbuhan produksi perikanan yang terjadi selama tiga tahun terakhir walaupun tidak terlalu signifikan menandakan mulai pulihnya kembali sektor ini dari kehancuran.

Secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata produksi perikanan selama 2007-2009 adalah sebesar 3,24 persen dengan perincian pertumbuhan tahunan produksi perikanan tangkap sebesar 3,41 persen dan perikanan budidaya sebesar 4,25 persen. Produksi perikanan tangkap umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol, kembung, cakalang, selar, tenggiri dan layang. Kelompok udang dan bandeng memberi sumbangan terbesar dari subsektor budidaya perikanan.

Luas usaha budidaya perikanan di Aceh pada tahun 2007 seluas 46.412,8 ha meningkat menjadi 54.433,1 ha pada tahun 2009. Klasifikasi luas budidaya perikanan untuk masing-masing jenis dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Luas Usaha Budidaya Perikanan
Tahun 2007-2009

No	Klasifikasi	Luas Areal (Ha)		
		2007	2008	2009
1	Budidaya di Tambak	403,545.0	47,140.4	48.130,3
2	Budidaya di Kolam	3,444.5	3,675.3	3.756,1
3	Budidaya di Sawah	2,606.9	2,606.9	2.643,3
4	Budidaya di Keramba	6,9	0,2	3,4
Total		46.412,8	53.422,8	54.533,1
Pertumbuhan (%)		-1,96	1,99	2,07

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2008

Dari sisi jumlah armada perikanan sebagian besar kapal ikan bermotor yang digunakan oleh nelayan Aceh adalah kapal motor yang berukuran lebih kecil dari 5 GT sejumlah 7.135 unit (76,94%), diikuti kapal motor berukuran 5-10 GT, 10-20 GT, 20-30 GT, 30-50 dan 50-100 GT dengan masing-masing persentase 12,63 persen, 4,28 persen, 4,21 persen, 1,85 persen dan 0,10 persen dari total 9.274 unit. Hal ini mengindikasikan bahwa daya jelajah kapal ikan Aceh relatif kecil, sehingga potensi perikanan Aceh di laut lepas tidak termanfaatkan secara optimal (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2009).

Prasarana perikanan seperti pelabuhan perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebanyak 17 unit meningkat menjadi 26 unit pada tahun 2009, sementara itu fasilitas lainnya tidak mengalami peningkatan (Tabel 2.38).

Tabel 2.38
Jumlah Prasarana Perikanan Di Aceh
Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas (unit)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pelabuhan Perikanan	17	18	18	18	26
2	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	30	30	31	31	31
3	*Cold Storage*	8	8	8	8	8
4	Pabrik Es	38	40	40	40	40
5	*Hatchery*	143	143	143	143	143
6	Balai Benih Ikan (BBI)	14	17	17	17	17
Total		**250**	**256**	**257**	**257**	**257**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2009

2.5.1.5. Perbankan

Kinerja perbankan di Aceh semakin membaik sejak berkhirnya konflik dan pasca tsunami. Indikator-indikator utama perbankan seperti rasio kecukupan modal (CAR) dan rasio kredit bermasalah (NPL) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. NPL tetap terjaga dibawah 5 persen, sedangkan CAR masih berada pada level 17 persen jauh berada dibawah level minimal yang ditetapkan BI (8%). Sejalan dengan perbankan nasional perbankan Aceh juga terus menunjukkan kinerja yang positif. Walaupun mencatat pertumbuhan total aset yang negatif namun penyaluran kredit memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Total aset tahun 2009 turun 2,85 persen (Rp. 27.79 Trilyun) dibanding tahun 2008 (Rp 28.55 Trilyun). Hal ini diperkirakan karena berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Dari sisi kredit perbankan Aceh mencatat pertumbuhan sebesar 31,56 persen, meningkat dari 9,38 Trilyun menjadi 12.34 Trilyun. Peningkatan terjadi pada semua jenis kredit dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yang tumbuh 37,16 persen.

Disamping itu Kinerja Bank Syariah pun terus meningkat. Per November 2009 total aset perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari 1.74 Trilyun menjadi 1.78 Trilyun, atau tumbuh 2,15 persen, dari sisi pembiayaan juga mengalami peningkatan signifikan dari 0.54 Trilyun menjadi 0.81 Trilyun atau tumbuh 51,67 persen. Dalam mendukung pembiayaan UMKM di Aceh per November 2009 penyaluran kredit tumbuh 29,35 persen dengan porsi 63,74 persen dari total kredit yang disalurkan.

2.5.1.6. Industri, Perdagangan dan Ekspor / Impor

A. Industri

Sektor industri belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta pembentukan PDRB. Industri Aceh hanya mengandalkan kepada industri pengolahan dari migas, namun terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh. Distribusi sektor indutri migas terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 18,35 persen, 2005 sebesar 15, 86 persen, 2006 sebesar 13,56 persen, 2007 sebesar 12,50 persen dan tahun 2008 sebesar 11,90 persen. Sedangkan pada indutri non migas distribusinya terhadap pembentukan PDRB yaitu pada tahun 2004 sebesar 3,38 persen, 2005 sebesar 3,57 persen, 2006

sebesar 3,55 persen, 2007 sebesar 3,96 persen dan tahun 2008 sebesar 4,10 persen.

Berdasarkan kontribusi nilai tambah PDRB selama lima tahun terakhir di atas, harapan besar tertumpu pada pengembangan industri non migas sedangkan industri migas dalam jangka panjang tidak dapat diandalkan. Dari jenis industri, jumlah usaha industri kecil menengah sampai tahun 2008 adalah 21.267 unit atau meningkat sekitar 5,12 persen dari tahun 2007 atau sejumlah 20.231 unit, namun untuk jumlah industri besar tidak mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu sejumlah 8 unit (Tabel 2.39).

Tabel 2.39 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dibidang industri pada tahun 2007 sejumlah 75.548 orang meningkat menjadi 112.161 orang (2009). Selanjutnya, investasi mengalami peningkatan dari 146,91 triliyun rupiah (2007) menjadi 147,1 triliyun rupiah (2009). Namun peningkatan ini tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.39
Perkembangan Industri Tahun 2007 - 2009

No.	Uraian	Satuan	2007	2008	2009
1.	**Unit Usaha**	**Unit**	**20,231**	**21,267**	**35,660**
	a. Industri Kecil & Menengah	Unit	20,223	21,259	35,652
	b. Industri Besar	Unit	8	8	8
2.	**Tenaga Kerja**	**Orang**	**75,548**	**80,249**	**112,161**
	a. Industri Kecil & Menengah	Orang	70,985	75,686	107,598
	b. Industri Besar	Orang	4,563	4,563	4,563
3.	**Investasi**	**Rupiah**	**146,911,000,000,000**	**146,977,000,000,000**	**147,066,107,083,017**
	a. Industri Kecil & Menengah	Rupiah	337,000,000,000	403,000,000,000	492,107,083,017
	b. Industri Besar	Rupiah	146,574,000,000,000	146,574,000,000,000	146,574,000,000,000

B. Perdagangan

Masalah dan tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh sektor perdagangan adalah semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak lanjutan dari krisis global, yang akan berakibat pada melemahnya permintaan dunia dan aktivitas produksi global. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin ketat dan harga komoditas belum menggembirakan.

Pembentukan IMT-GT dapat dikatakan merupakan tindak lanjut dan penegembangan kerja sama di antara pengusaha-pengusaha swasta dan Indonesia, Malaysia, Thailand yang telah mempunyai hubungan historis karena

posisi wilayahnya yang berdekatan. Kerjasama IMT-GT sendiri sudah bermula sejak tahun 1991 dan diresmikan dalam pertemuan di Langkawi pada bulan Juli 1993. Kerja sama IMT-GT dilakukan untuk mengusahakan kompleksitas sumberdaya yang dimiliki ketiga negara sub-wilayah ini.

Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain seperti pemberlakuan ACFTA. Negara-negara ASEAN telah setuju mewujudkan kawasan perdagangan bebas dimana akan membuat pasar kita jadi sasaran empuk bagi negara lain. Disisi lain, daya saing produk luar sangat mendominasi beberapa tahun ini terutama China. Akibatnya, kita pun mengkhawatirkan dominasi produk luar negeri di pasar domestik. Tingginya daya saing produk luar negeri harus diantisipasi dengan peningkatan daya saing produk lokal.

Untuk mendukung ekpor/impor Indonesia wilayah barat, Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dengan undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang Badan pengelolaan Kawasan Sabang, undang-undang nomor 26 tahun 2006 tentang penataan ruang menetapkan Sabang sebagai PKSN, demikian juga dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh bahwa Sabang sebagai hubport internasional. Namun sampai saat ini pelabuhan bebas Sabang belum berkembang secara optimal.

Sejak tahun 1999 sumber daya fiskal Aceh mengalami peningkatan yang signifikan. Aceh merupakan salah satu daerah penerima manfaat desentralisasi. Selama beberapa tahun terakhir Aceh telah menerima arus masuk pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat sumber daya keuangan Aceh diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pendapatan tersebut terutama karena adanya UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2008. Melalui UU tersebut Aceh mendapat hak berupa dana tambahan bagi hasil Migas dan dana otonomi khusus. Akan tetapi hak tersebut terbatas pada masa waktu 20 tahun. Penerimaan Aceh dari dana otonomi khusus yang dimulai sejak tahun 2008 terus meningkat.

Mendorong investasi swasta merupakan salah satu prioritas utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana melalui investasi swasta lapangan pekerjaan baru dapat tercipta, demikian juga peningkatan produktivitas serta terjadinya proses "*transfer of knowledge*". Penanganan yang menyeluruh terhadap isu keamanan dan solusi yang kreatif terhadap keterbatasan terhadap pasokan

sumber daya listrik di Aceh adalah faktor penting yang dapat mendorong investasi. Akan tetapi rendahnya produktivitas tenaga kerja, minim tenaga kerja terampil dan relatif tingginya UMP masih menjadi masalah yang harus segera diatasi. Penetapan UMP Aceh 1,2 juta rupiah per bulan lebih tinggi dari nasional berdampak terhadap tingkat daya saing Aceh dalam menarik investasi di sektor formal.

C. Ekspor / Impor

Kinerja ekspor Aceh secara umum cenderung mengalami peningkatan. Setelah mengalami kejatuhan pada tahun 2001, nilai ekspor Aceh mengalami perkembangan yang positif walaupun peningkatannya sedikit fluktuatif. Tahun 2007 nilai ekspor hanya mencapai USD 1.854,23 Juta, kemudian tahun 2008 meningkat menjadi USD 2.234,13 juta. Nilai ekspor non migas juga mengalami perkembangan yang menggembirakan, walau pun belum signifikan pengaruhnya terhadap total nilai ekspor.

Ekspor non migas termasuk komoditas pertanian terus mengalami perkembangan yang menggembirakan. Setelah meningkat 5 kali lipat pada tahun 2007, ekspor non migas meningkat tajam sampai 80 persen pada tahun 2008, meski dalam tahun tersebut terjadi krisis finansial global. Pupuk merupakan komoditas ekspor non-migas yang mengalami peningkatan tertinggi. Ekspor komoditas kopi dan kakao juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai ekspor kopi mencapai USD 22,66 juta. Namun demikian bila dibandingkan dengan nilai ekspor keseluruhan, nilai ekspor non-migas terutama komoditas pertanian masih sangat rendah.

Sama halnya dengan ekspor, kondisi impor Aceh juga mengalami peningkatan. Tahun 2007 dan tahun 2008 nilai impor meningkat tajam dari USD 30,65 juta menjadi 384,24 pada tahun 2008. Peningkatan nilai impor tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya impor barang-barang konsumsi rumah tangga, bahan makanan dan barang produk industri lainnya. Sedangkan impor barang modal masih sangat kecil. Kondisi ini tidak sehat dalam mendorong pengembangan industri daerah.

Seiring dengan nilai ekspor dan impor yang sama-sama menunjukkan kecenderungan meningkat, surplus neraca perdagangan luar negeri Aceh juga mengalami peningkatan. Tahun 2007 neraca perdagangan Aceh surplus sebesar USD 1.823,59 juta dan tahun 2008 meningkat menjadi USD 1.849,89 juta.

Negara tujuan ekspor utama Aceh masih didominasi oleh negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, Korea serta negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Begitu juga dengan impor, 87,25 persen berasal dari negara Asia Timur dan ASEAN. Sisanya 12,75 persen berasal dari negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Swiss dan Jerman serta dari Amerika Serikat. Selanjutnya realisasi ekspor di Aceh per komoditas periode 2005-2009 ditampilkan pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Realisasi Ekspor Aceh Per Negara Tujuan
Periode 2005 - 2009

No	NEGARA TUJUAN	NILAI PER TAHUN (US$)					JUMLAH (US$)
		2005	2006	2007	2008	2009	
	NON MIGAS						
	ASIA TIMUR						
1	Taiwan	8,349,030.37	199,800.00	404,220.00	768,222.62	2,422,971.50	12,144,244.49
2	Jepang	3,093,605.78	860,132.20	780,018.74	-	240,660.00	4,974,416.72
3	Korea	-	-	239,315.33	105,100.00	1,784,341.00	2,128,756.33
4	Cina	54,900.00	43,200.00	55,450.00	-	127,800.00	281,350.00
	ASIA SELATAN						
5	India	1,854,148.83	47,400.00	32,449,950.00	29,783,353.00	9,804,626.93	73,939,478.76
6	Banglades	-	-	2,510,000.00	-	1,596,000.00	4,106,000.00
7	Srilangka	-	-	2,895,010.00	28,000.00	42,125,524.00	45,048,534.00
	ASEAN						
8	Malaysia	9,268,876.21	3,784,290.68	7,201,525.98	19,736,729.99	6,334,039.90	46,325,462.76
9	Vietnam	1,665,672.77	837,200.00	-	-	10,343,126.98	12,845,999.75
10	Thailand	13,073,053.00	2,351,960.50	1,577,169.38	28,069,780.95	9,952,559.88	55,024,523.71
11	Myanmar	-	-	-	-	2,577,893.56	2,577,893.56
12	Philipina	5,943,150.55	195,980.00	10,158,758.76	7,704,986.75	19,076,830.78	43,079,706.84
13	Singapura	2,655,290.00	334,680.00	388,350.00	90,600.00	5,807,448.67	9,276,368.67
	AMERIKA						
14	Amerika Serikat	6,146,397.87	9,923,669.01	12,760,453.10	18,856,311.19	17,021,130.13	64,707,961.30
15	Kanada	846,560.00	2,217,066.00	1,380,453.00	1,912,721.86	2,348,517.02	8,705,317.88
16	Meksiko	-	425,977.32	400,052.40	1,294,093.92	418,277.97	2,538,401.61
17	Columbia	-	-	-	12,504,186.36	-	12,504,186.36
	AUSTRALIA & OCEANIA						
18	Australia	182,970.00	265,225.00	-	193,260.00	64,128.00	705,583.00
19	Selandia Baru	-	89,340.00	162,744.46	126,171.36	508,247.20	886,503.02
	EROPA						
20	Belgia	60,705.00	52,650.00	145,008.00	435,600.00	133,620.00	827,583.00
21	Jerman	640,320.00	976,920.00	1,287,501.00	133,315.67	908,842.74	3,946,899.41
22	Norwegia	-	-	57,600.00	238,230.00	232,740.00	528,570.00
23	Belanda	209,700.00	740,120.00	-	-	-	949,820.00
24	Inggris	572,985.00	1,272,950.00	150,942.00	66,336.00	134,112.00	2,197,325.00
25	Irlandia	-	-	53,550.00	-	-	53,550.00
26	Swedia	-	-	-	430,021.00	-	430,021.00
27	Auburn	-	-	-	694,449.00	-	694,449.00
	AFRIKA						
28	Maroko	-	90,000.00	-	65,250.00	-	155,250.00
	Jumlah Non Migas	***54,617,365.38***	***24,708,560.71***	***75,058,072.15***	***123,236,719.67***	***133,963,438.26***	***411,584,156.17***
	MIGAS						
1	Jepang	653,990,360.00	450,713,915.00	429,429,915.10	609,643,002.40	306,053,399.17	2,449,830,591.67
2	Cina	-	-	-	-	9,928,447.13	9,928,447.13
3	Korea	2,447,092,065.00	2,533,282,800.00	2,239,715,468.25	1,523,756,365.95	596,958,049.96	9,340,804,749.16
4	Singapura	92,206,750.00	60,400,500.00	79,990.00	76,001,609.65	17,250,752.64	245,939,602.29
	Jumlah Migas	***3,193,289,175.00***	***3,044,397,215.00***	***2,669,225,373.35***	***2,209,400,978.00***	***930,190,648.90***	***12,046,503,390.25***
						Jumlah Non Migas + Migas	***12,458,087,546.42***

Sumber : Bappeda Aceh, 2010 (Data diolah)

Tabel 2.41
Realisasi Ekspor Aceh Per Komoditi
Periode 2005 - 2009

No	KOMODITI	NILAI PER TAHUN (US$)					JUMLAH (US$)
		2005	2006	2007	2008	2009	
	NON MIGAS						
	A. Hasil Non Industri						
1	Kopi Arabica	10,368,258.87	16,898,569.53	18,064,022.70	26,609,432.18	22,666,034.82	94,606,318.10
2	Kopi Robusta	126,350.00	593,160.00	-	-	-	719,510.00
3	Getah Alam	-	-	-	17,726.04	266,666.00	284,392.04
4	Pinang	25,500.00	37,000.00	1,975.00	4.05	-	64,479.05
5	Blangkas	10,600.00	-	-	-	-	10,600.00
6	Magnesium Karbonat Alam				6,982.00		
7	Tempurung Kelapa Sawit				1,800.00		
8	Damar	-	10,400.00	16,700.00	48,815.00	-	75,915.00
9	Madu				72.57	-	72.57
	B. Hasil Industri						
10	Pasir Besi Curah	-	-	-	-	1,278,000.00	1,278,000.00
11	Sabut Kelapa	3,900.00	9,100.00	-	120,000.00	-	133,000.00
12	Arang kayu	32,280.00	2,800.00	-	-	-	35,080.00
13	Akar Tongkat Ali dan M. Nilam				4,563.94	-	4,563.94
14	Amoniak	11,563,249.57	4,813,170.68	2,791,262.76	3,334,990.42	2,988,411.62	25,491,085.05
15	Pupuk Urea	26,798,307.94	-	53,972,631.36	94,114,282.57	65,784,581.82	240,669,803.69
16	Pupuk Magnesium	-	-	11,820.00	17,040.00	-	28,860.00
17	Urea Formaldehyde	5,688,919.00	2,342,860.50	-	-	-	8,031,779.50
18	Tras Curah	-	-	-	66,501.48	42,125,524.00	42,192,025.48
19	Sapu/Sikat Ijuk	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
20	Kulit Kayu Manis	-	-	-	-	4,420.00	4,420.00
21	Kertas	-	-	513,206.35	113,459.48	-	626,665.83
	Jumlah Non Migas	**54,617,365.38**	**24,708,560.71**	**75,371,618.17**	**124,455,669.73**	**135,113,638.26**	**414,266,852.25**
	MIGAS						
1	LNG	2,946,480,750.00	2,809,417,965.00	2,536,366,202.51	1,972,761,512.04	825,499,625.15	11,090,526,054.70
2	A. Condensate	246,808,425.00	234,979,250.00	212,769,180.84	231,226,879.08	104,691,023.75	1,030,474,758.67
3	Kerosene	-	-	-	3,227,305.60	-	3,227,305.60
4	Naphtha	-	-	-	2,185,281.28	-	2,185,281.28
	Jumlah Migas	**3,193,289,175.00**	**3,044,397,215.00**	**2,749,135,383.35**	**2,209,400,978.00**	**930,190,648.90**	**12,126,413,400.25**
					Jumlah Non Migas + Migas		**12,540,680,252.50**

**) Ekspor Komoditi yang tercatat di Disperindagkop UKM*
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh, 2005-2009

2.5.1.7. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pembangunan Aceh yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus yang sesuai dengan UUPA, dan lain-lain pendapatan yang sah harus dimanfaatkan secara optimal dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Secara khusus Pemerintah Aceh harus memanfaatkan ketersediaan dana pembangunan yang berasal dari TDBH Migas dan dana Otsus secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) UUPA Pemerintah Aceh mendapat Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TDBH Migas) sebesar 55 persen (55%) untuk minyak dan 40 persen (40%) untuk pertambangan-gas bumi. Selain mendapat TDBH Migas, berdasarkan Pasal 183 ayat (2) UU PA, Pemerintah Aceh juga mendapat dana otonomi khusus setara

dua persen (2%) pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 dan setara 1 persen (1%) pagu DAU Nasional untuk tahun 2023 sampai dengan 2027.

Penggunaan sumber dana pembangunan Aceh yang berasal dari TDBH migas dan dana Otsus tersebut diatas dijabarkan dalam rencana induk bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh yang sesuai amanah Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Masing-masing rencana induk ini harus berpedoman dan mengacu kepada RPJP Aceh 2005-2025.

Kedua sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan antara Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh. Secara rinci berbagai sumber pendanaan pembangunan Aceh ditampilkan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Perkembangan Sumber Pendanaan Pembangunan Aceh
Tahun 2007 - 2009

NO	SUMBER DANA	TAHUN (Rp. Juta)			TOTAL (Rp. Juta)
		2007	2008	2009	
1	DAK	800,688	1,005,049	1,040,297	2,846,034
2	DAU	5,666,371	6,348,755	6,833,513	18,848,639
3	DBH	1,694,561	1,777,896	1,241,551	4,714,008
4	PAD	1,207,555	721,708	743,562	2,672,825
5	APBN	18,378,249	12,706,525	8,852,773	39,937,547
6	Dana Otonomi Khusus	-	3,590,142	3,728,282	7,318,424
TOTAL		**27,747,424**	**26,150,075**	**22,439,978**	**76,337,477**

Sumber : Bappeda Aceh, 2009 (Data diolah)

2.5.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.5.2.1. Aksesibilitas Daerah

A. Fasilitas Perhubungan

Aksesibilitas daerah dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di Aceh dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

Apabila dilihat dari pelayanan transportasi jalan, terdapat kesenjangan antara pelayanan transportasi. Indeks pelayanan transportasi jalan pada tahun 2006 menunjukkan lintas timur mempunyai tingkat pelayanan lebih baik (43,43%) diikuti lintas barat (35,49%) dan lintas tengah 30,92 persen (Buku Rencana Induk Otsus Migas, 2010).

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh (2009), jumlah jembatan pada lintasan jalan nasional sebanyak 916 buah dengan total panjang 21.763 m. Jembatan nasional pada saat ini kondisi baik (jembatan baru) sebanyak 178 unit (3.743 m), kondisi baik sebanyak 310 unit (5.348 m), kondisi rusak ringan 116 unit (3.998 m), kondisi rusak sedang sebanyak 298 unit (8.542 m), sementara jembatan yang masih rusak sebanyak 14 unit sepanjang 132 m.

Jaringan jalan kereta api Aceh merupakan bagian dari rencana pembangunan kereta api Sumatera lintas Timur (Sumatera *Railways*) yang menghubungi mulai dari Banda Aceh sampai dengan Lampung. Untuk Aceh, jaringan kereta api ini menghubungkan antara Banda Aceh dan Batas Sumatera Utara yang direncanakan sepanjang 486 km. Hingga tahun 2009, pembangunan jaringan kereta api Aceh baru mencapai 14,7 km atau tiga persen dari total yang direncanakan yang menghubungkan Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukuh.

Angkutan perairan darat telah difungsikan oleh masyarakat pada aliran sungai Tamiang, sungai Simpang Kiri dan Simpang Kanan di Singkil, Krueng Meureubo dan Suak Seumaseh di Aceh Barat. Prasarana pelabuhan pada sungai-sungai tersebut belum dibangun. Saat ini hanya ditangani oleh fasilitas yang dibangun masyarakat dengan alat angkut yang tidak memadai. Demikian juga dengan angkutan danau di Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Jaringan angkutan penyeberangan yang saat ini beroperasi di Aceh terdiri dari 4 rute lintas penyeberangan, yaitu: Lintasan Balohan (Kota Sabang) – Ulee Lheue (Kota Banda Aceh), Lintasan Lamteng (Aceh Besar) – Ulee Lheue (Kota Banda Aceh), Lintasan Labuhan Haji (Aceh Selatan) – Sinabang (Simeulue), Lintasan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil) – Pulo Banyak (Kabupaten Aceh Singkil) – Sinabang (Kabupaten Simeulue).

Beberapa prasarana penyeberangan pernah hancur oleh bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tahun 2004, sebagian telah diperbaiki dan pada saat ini telah berfungsi dengan baik. Namun masih diperlukan pembangunan terhadap dermaga penyeberangan di Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Singkil, dan Pulau Banyak.

Pelabuhan yang tersedia di Aceh terdiri dari pelabuhan yang diusahakan dan dikelola oleh PT Pelindo (BUMN) dan pelabuhan yang tidak diusahakan dan dikelola oleh Kantor Pelabuhan (Kanpel) UPT Kementerian Perhubungan. Pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) di Aceh antara lain : pelabuhan laut Malahayati di Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar, pelabuhan Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat; pelabuhan Kuala Langsa di Kota Langsa, pelabuhan Sabang dan pelabuhan Balohan di Kota Sabang dan pelabuhan Krueng Geukeuh di Kota Lhokseumawe**.**

Pelabuhan yang dikelola oleh kantor pelabuhan (Kanpel) adalah pelabuhan Singkil di Pulo Sarok, Kabupaten Aceh Singkil, pelabuhan Susoh di Kabupaten Aceh Barat Daya, pelabuhan Sinabang di Kabupaten Simeulue, pelabuhan Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya, pelabuhan Idi di Kabupaten Aceh Timur, pelabuhan Tapak Tuan di Kabupaten Aceh Selatan.

Hampir seluruh pelabuhan laut tersebut belum berfungsi secara optimal. Ini terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana. Beberapa pelabuhan yang telah memiliki fasilitas *crain* adalah pelabuhan Malahayati, pelabuhan Krueng Geukuh dan pelabuhan Sabang untuk mendukung kegiatan ekspor-impor. Namun kegiatan ekspor-impor ini tidak didukung oleh ketersediaan komoditas ekspor dengan skala ekonomi yang memadai sehingga terjadi *trade imbalance* di provinsi ini.

Sementara itu, untuk pelabuhan Sabang, Malahayati, Krueng Geukuh, dan Kuala Langsa dibutuhkan pengerukan sedimentasi yang berkelanjutan dan fasilitas sisi laut seperti : perpanjangan dermaga, dolphin dan berthing dolphin

untuk kebutuhan tangker, peralatan keselamatan, dan peralatan navigasi, sedangkan fasilitas sisi darat seperti : lapangan penumpukan, tangki penyimpanan, gudang, dan perkantoran.

Bandar udara Sultan Iskandar Muda dengan panjang landasan 3.000 m sudah dapat melayani pesawat jenis Airbus seri 340 dan telah dapat melayani penerbangan jemaah haji embarkasi Aceh dan sebagai bandara transit untuk penerbangan jemaah haji wilayah timur Indonesia serta penerbangan ke luar negeri lainnya. Sementara itu, bandara lain pada umumnya hanya mampu melayani pesawat udara jenis CN-212.

B. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Kendaraan Umum Melalui Dermaga/Bandara.

Secara keseluruhan jumlah orang yang terangkut melalui pelayanan kendaraan umum yang terdata (2009) sejumlah 1.549.629 orang dan jumlah barang yang terangkut 4.211.327 ton. Menurut WFP (2009), jumlah orang yang terangkut melalui dermaga di Aceh sejumlah 902.853 orang dan barang 803.741 ton.

Dishubkomintel 2009, jumlah orang yang terangkut melalui bandara sebesar 646.776 orang dan barang 3.407.586 ton. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah orang yang terangkut melalui dermaga lebih besar dari bandara, demikian halnya terhadap barang yang diangkut. Dengan kata lain, pengangkutan orang maupun barang lebih banyak menggunakan jasa pelayanan melalui dermaga.

2.5.2.2. Penataan Wilayah

Penataan wilayah di Aceh difokuskan pada penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan jenis dan fungsinya kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Aceh diperuntukkan sebagai Hutan Suaka Alam (HSA), Hutan Pelestarian Alam (HPA), Taman Buru (TB), Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (KLDK).

Kawasan lindung yang memiliki nilai strategis di Aceh antara lain adalah Taman Nasional Gunung Leuser (623.987 ha) yang secara administratif wilayahnya termasuk di dalam Kabupaten Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Tenggara; Taman Lingge Isak (80.000 ha) di Kabupaten Aceh Tengah; Cagar Alam Jantho (16.640 ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan (6.220 ha) di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie; Suaka Marga Satwa Rawa Singkil (102.500 ha) di Kabupaten Aceh Selatan dan

Aceh Singkil; Taman Laut Pulau Weh Sabang (2.600 ha) di Kota Sabang (BPS, 2009).

Sedangkan penggunaan lahan untuk budidaya dan penggunaan lainnya adalah terdiri dari perkampungan (117.582 ha), industri (3.928 ha), pertambangan (115.049 ha), persawahan (311.849 ha), pertanian lahan kering semusim (137.665 ha), kebun (305.591 ha), perkebunan besar (691.050 ha), perkebunan kecil (51.461 ha), padang (padang rumput, alang-alang, semak) seluas 229.726 ha, hutan (lebat, belukar, sejenis) seluas 3.523.925 ha, perairan darat (kolam air tawar, tambak, penggaraman, waduk, danau, rawa) seluas 204.292 ha dan tanah terbuka (tandus, rusak, *land clearing*) seluas 44.439 ha. Data ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan hutan masih mendominasi yaitu 61,43 persen dibandingkan dengan jenis penggunaan lahan lainnya (BPS, 2009).

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2010-2030 (tahap finalisasi) menunjukkan bahwa luas kawasan lindung 3.690.244,13 ha ditambah dengan kawasan hutan produksi 173.376,89 ha, maka luas total hutan di Aceh adalah 3.688.872,73 ha, atau sebesar 68,62 persen dari luas wilayah Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya strategis Aceh seluas 353.946,81 ha yang terdiri dari hutan produksi (173.378,81 ha) dan pertanian pangan lahan basah (180.568,00 ha).

2.5.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Jumlah bank di Aceh tahun 2010 sebesar 38 bank yang terdiri dari 13 bank umum konvensional, 5 bank umum syariah, 5 BPR dan 10 BPRS, untuk jumlah kantor bank sebanyak 404 unit yang terdiri dari 1 kantor wilayah bank umum konvensional, 1 kantor pusat bank pemerintah daerah, 15 kantor pusat BPR/S, 78 kantor cabang, 135 kantor kas serta 6 kantor fungsional. Sementera itu, jumlah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah 275 unit.

2.5.2.4. Ketersediaan Air Bersih

Sumber air rumah tangga terdiri dari dua kelompok yaitu sumber air terlindung (air kemasan, ledeng, pompa dan sumur terlindung) dan sumber air tidak terlindung (sumur tidak terlindung, mata air tak terlindung, air sungai). Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air terlindung sebesar 66,6 persen dari total rumah tangga. Penggunaan sumur gali merupakan sumber air

terbesar (60%) yang digunakan oleh rumah tangga di Aceh. Sisanya menggunakan sumber air Ledeng (23,6%), pompa (4%), air hujan (3,35%), air kemasan (3,2%), dan lainnya (Profil Kesehatan Aceh, 2009).

Sampai saat ini, pembangunan sarana dan prasarana air bersih telah ada di 23 kabupaten/kota, dengan kapasitas terpasang 3.406 liter/detik yang terdiri dari: sarana dan prasarana air bersih perkotaan dengan kapasitas 1.927 l/dtk; ibu kota kecamatan (63 IKK) dengan kapasitas 757 l/dtk; dan perdesaan (135 desa) dengan kapasitas 722 L/dtk. Sedangkan sarana dan prasarana air bersih yang beroperasi 2.037 l/dtk, yaitu: air bersih perkotaan 1.507 l/dtk, air bersih IKK 450,5 l/dtk, dan air bersih perdesaan 79,5 l/dtk. Selanjutnya, instalasi yang tidak beroperasi berkapasitas 676 l/dtk, yaitu: 476 l/dtk rusak, 200 l/dtk dalam tahap pembangunan, dan 693 l/dtk tidak diketahui operasionalnya. Cakupan sarana air bersih perpipaan di kawasan perkotaan Aceh tahun 2008 sebesar 23,10 persen sedangkan di kawasan pedesaan baru mencapai 4,7 persen. Pada tinggkat nasional target MDGs (2015) perkotaan sebesar 67,7 persen dan perdesaan 52,8 persen.

2.5.2.5. Fasilitas Listrik dan Telepon

A. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Pada umumnya pelayanan listrik Aceh dilakukan oleh PT. PLN. Pemerintah Aceh hanya memfokuskan melakukan usaha pelayanan pada daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh PT PLN. Sistem distribusi saat ini telah mampu mendistribusikan energi listrik sampai pelosok Aceh dengan rasio elektrifikasi sampai Desember 2008 sebesar 87,21 persen.

B. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik didominasi di perkotaan. Selanjutnya rasio rumah tangga yang menggunakan listrik paling kecil di provinsi Aceh terdapat di Kabupaten Gayo Lues sebesar 92,44 persen, sedangkan rasio desa berlistrik paling kecil terdapat di Kabupaten Simeulue sebesar 79,56 persen. Secara rinci persentase rumah tangga dan desa yang menggunakan listrik di Aceh ditampilkan pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Rasio Rumah Tangga dan Desa yang Menggunakan Listrik Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH RT	Rumah Tangga Berlistrik	Rumah Tangga Belum Berlistrik	Rasio Rumah Tangga (%)	Jumlah Desa	Desa Berlistrik	Desa Belum Berlistrik	Rasio Desa Berlistrik (%)
I	CABANG BANDA ACEH								
	1. Kota Banda Aceh	54.480	54.480	-	100	90	90	-	100
	2. Kabupaten Aceh Besar	77.527	77.215	312	99,60	604	600	4	99,34
	3. Kota Sabang	7.305	7.305	-	100	18	18	-	100
II	CABANG LHOKSEUMAWE								
	1. Kota Lhoksemawe	39.690	39.690	-	100	68	68	-	100
	2. Kabupaten Aceh Utara	129.435	128.329	1.106	99,15	852	840	12	98,59
	3. Kabupaten Bireuen	89.391	89.280	111	99,88	609	607	2	99,67
	4. Kabupaten Aceh Tengah	45.633	45.212	421	99,08	268	258	10	96,27
	5. Kabupaten Bener Meriah	28.137	27.106	1.031	96,34	232	208	24	89,66
III	CABANG LANGSA								
	1. Kota Langsa	35.067	35.067	-	100	66	66	-	100
	2. Kabupaten Aceh Timur	83.229	83.187	42	99,95	511	511	-	100
	3. Kabupaten Aceh Tamiang	59.975	59.975	-	100	213	213	-	100
	4. Kabupaten Aceh Tenggara	43.875	43.012	863	98,03	385	362	23	94,03
	5. Kabupaten Gayo Lues	18.699	17.286	1.413	92,44	136	126	10	92,65
IV	CABANG MEULABOH								
	1. Kabupaten Aceh Barat	38.350	37.150	1.200	96,87	321	299	22	93,15
	2. Kabupaten Seumeulue	20.448	19.229	1.219	94,04	137	109	28	79,56
	3. Kabupaten Nagan Raya	31.085	30.107	978	96,85	222	208	14	93,69
	4. Kabupaten Aceh Jaya	18.899	17.654	1.245	93,41	172	149	23	86,63
V	CABANG SUBULUSSALAM								
	1. Kota Subulussalam	16.064	15.521	543	96,62	74	66	8	89,19
	2. Kabupaten Aceh Singkil	25.066	24.532	534	97,87	116	110	6	94,83
	3. Kabupaten Aceh Selatan	52.528	51.732	796	98,48	248	241	7	97,18
	4. Kabupaten ABDYA	30.775	30.019	756	97,54	132	132	-	100
VI	CABANG SIGLI								
	1. Kabupaten Pidie	95.096	94.726	370	99,61	727	727	-	100
	2. Kabupaten Pidie Jaya	32.727	32.010	717	97,81	222	222	-	100
ACEH		**995.441**	**807.214**	**188.227**	**81**	**6.423**	**6.230**	**193**	**97**

Sumber : PT.PLN Wilayah I Banda Aceh, 2010

C. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP dan Telepon

Secara keseluruhan persentase jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2008 adalah 55,29 persen dan meningkat menjadi 64,63 persen pada tahun 2009. Persentase pengguna HP di perkotaan pada tahun 2008 sebesar 74,94 persen (3.198.537 jiwa), tahun 2009 sebesar 81,53 persen (3.557.543 jiwa). Sedangkan untuk pengguna HP di perdesaan tahun 2008 sebesar 40,45 persen (1.736.889 jiwa), dan tahun 2009 sebesar 51,88 persen (2.263.772 jiwa). Jumlah pengguna telepon di perkotaan pada tahun 2008 sebesar 13,50 persen (579.679 jiwa) dan di perkotaan pada tahun 2009 sebesar 11,27 persen (491.764 jiwa). Menurunnya pengguna Telepon di perkotaan disebabkan oleh beralihnya penggunaan alat komunikasi telepon ke HP.

Sementara itu, pengguna telepon di perdesaan tahun 2008 sebesar 1,77 pesen (76.002 jiwa) dan tahun 2009 sebesar 1,96 persen (85.524 jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna HP/Telepon di perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perdesaan. Meskipun pengguna HP/Telepon di

daerah perdesaan cenderung meningkat, namun persentase peningkatannya masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi ini menggambarkan penduduk perdesaan relatif lebih lambat mengakses arus informasi (Tabel 2.44).

Tabel 2.44
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2008-2009

No	Uraian	2008	2009
1	2	3	4
1	Penduduk yang Memiliki HP	2,117,830	2,580,214
2	Penduduk yang Memiliki Telepon PSTN	217,527	194,944
3	Total Jumlah Penduduk yang Memiliki HP/Telepon	2,335,357	2,775,157
4	Jumlah Penduduk	4,223,833	4,293,915
5	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	55.29	64.63

Sumber : Bappeda, 2010 (Data Diolah)

2.5.2.6. Ketersediaan Restoran

A. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Menurut SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 73/PW 105/MPPT-85 menjelaskan bahwa Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum. Restoran adalah salah satu jenis usaha bidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman untuk umum. Sedangkan cafe adalah restoran lain yang mengutamakan penjualan makanan ringan seperti kue, kopi dan teh.

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Berdasarkan Disbudpar Aceh (2010), jumlah restoran, rumah makan dan cafe di Aceh sejumlah 648 unit yang terdiri dari restoran 92 unit (14,2%), rumah makan 413 unit (63,7%) dan cafe 143 unit (22,1%). Restoran, rumah makan dan cafe tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Aceh. Adapun ketersediaan restoran yang paling tinggi terdapat di Banda Aceh dan Kota Langsa. Rumah

makan hampir merata terdapat di seluruh kabupaten/kota dengan angka tertinggin di Aceh Tengah dan Aceh Jaya. Sedangkan cafe umumnya terdapat di kota seperti Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Aceh Tengah dan Kota Langsa.

2.5.2.7. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Semakin banyaknya kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung dengan ketersediaan penginapan.

A. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan adalah perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum, termasuk dalam pengertian rumah penginapan adalah hotel, gubuk pariwisata (*cottage*), motel (*motorist hotel*), losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), pondok pariwisata (*home stay*), penginapan remaja (*young hostel*).

Berdasarkan Disbudpar Aceh (2010), di Aceh terdapat 202 penginapan yang terdiri dari 19 unit hotel berbintang dan 183 unit hotel non bintang. Penginapan tersebut tersebar pada 21 kabupaten/kota di Aceh. Kabupaten/kota yang memiliki hotel berbintang dan non bintang yang paling banyak adalah Kota Banda Aceh (38 unit), Kota Sabang (26 unit) dan Kota Langsa (19 unit) jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Demikian juga dengan jumlah *travel* yang terbanyak terdapat di Kota Banda Aceh (37 unit).

2.5.3. Iklim Berinvestasi

2.5.3.1. Keamanan

Sejak penandatanganan MoU *Helsinki* (RI dan GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005, tingkat kekerasan di Aceh secara konstan terus menurun hingga tahun 2009. Tingkat kekerasan di Aceh bahkan lebih rendah daripada daerah-daerah pasca konflk lainnya di Indonesia. Periode setelah MoU *Helsinki* karakteristik kekerasan di Aceh berubah, dimana insiden hampir tidak pernah terjadi. Namun demikian bentuk baru daripada kekerasan meningkat terutama pada akhir paruh kedua 2008 dimana sekitar 100 orang tewas dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2005-2009) yang disebabkan oleh kekerasan yang

berhubungan dengan kriminalitas, persoalan pribadi dan sebab-sebab tidak jelas lainnya.

Berdasarkan laporan Polda Aceh (2010) terdapat 3 jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara. Kejahatan tersebut berupa pencurian, premanisme, tindakan asusila, narkotika, terorisme, korupsi dan *illegal logging* dengan total angka kriminal 7.573 dan angka kriminal yang dapat diselesaikan sebesar 4.250. Sehingga rasio angka kriminal total (*crime total*) dengan jumlah penduduk per 10.000 sebesar 17,63. Sementara itu, rasio angka kriminal yang dapat diselesaikan (*crime clearent*) per 10.000 penduduk sebesar 9,90. Sementara itu, dalam kurun satu tahun terakhir tercatat kegiatan unjuk rasa secara damai sebanyak 81 kasus.

2.5.3.2. Kemudahan Perizinan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayaanan Perizinan Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan berkisar antara 5 sampai 30 hari kerja dibidang sumber daya alam sedangkan proses perizinan dibidang non sumber daya alam 3 sampai 21 hari kerja.

Dalam proses perizinan Pemerintah Aceh telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang melayani perizinan diantaranya pendaftaran penanaman modal, izin usaha, persetujuan pemanfaatan ruang dan hak atas tanah. Kesemua perizinan tersebut dapat dilayani secara satu pintu (*one stop service*).

2.5.3.3. Pengenaan Pajak Daerah

Aceh memiliki beberapa sumber penerimaan pajak yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPB-KB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Pada tahun 2009 total realisasi pendapatan pajak sejumlah 462.151.772.869 rupiah yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar 147.822.881.917 rupiah, bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 170.153.892.154 rupiah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 138.630.865.529 rupiah, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

sebesar 1.526.190.829 rupiah dan pajak pemanfaatan air permukaan sebesar 4.017.942.430 rupiah.

Realisasi pendapatan pajak tahun 2009 tersebut tidak berbeda nyata (sedikit lebih rendah) dengan realisasi pajak tahun 2008 (464.317.354.502 rupiah). Penurunan pendapatan pajak tahun 2009 hanya sebesar 2.165.581.633 rupiah (0,47%).

Pemerintah Aceh memiliki beberapa sumber pendapatan retribusi yaitu retribusi jasa umum, restribusi jasa usaha dan restribusi perizinan tertentu. Realiasi pendapatan dari sumber retribusi tersebut pada tahun 2009 sebesar 9.392.739.434 rupiah (jasa umum), 2.299.170.479 rupiah (jasa usaha) dan 348.453.000 rupiah (perizinan tertentu), sehingga total pendapatan retribusi Aceh tahun 2009 sebesar 12.040.362.913 rupiah.

Pendapatan asli Aceh tahun 2009 terdiri atas penerimaan pajak Aceh (462.151.772.869 rupiah), retribusi Aceh (12.040.362.913 rupiah), hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal Aceh (75.104.468.183 rupiah), zakat (22.649.354.923 rupiah) dan lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah (171.260.019.137 rupiah), sehingga total pendapatan asli Aceh sejumlah 743.205.978.025 rupiah (Tabel 2.45).

Tabel 2.45
Jumlah Pajak dan Restribusi Aceh

No	Jenis Pajak	Jumlah
1	2	3
1	Penerimaan Pajak Aceh	**462,151,772,859**
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	147,822,881,917
	- Pajak Bea Balik Nama (BBN-KB)	170,153,892,154
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	138,630,865,529
	- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1,526,190,829
	- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	4,017,942,430
2	Pajak Restribusi	**12,040,362,913**
	- Pajak Restribusi Jasa Umum	9,392,739,434
	- Pajak Restribusi Jasa Usaha	2,299,170,479
	- Pajak Perizinan Tertentu	348,453,000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh	**75,104,468,183**
4	Zakat	**22,649,354,923**
5	Pendapatan Asli Aceh yg sah	**171,260,019,025**
Total		743,205,977,903

Sumber : Bappeda 2010 (Data diolah)

2.5.3.4.Qanun (Peraturan Daerah)

Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mengamanatkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupten/Kota melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya izin usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lain sesuai dengan kewanangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 167 UUPA, khusus untuk kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pemerintah Aceh juga berwenang memberikan izin terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri dan asing di bidang eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum, alih fungsi kawasan hutan, penangkapan ikan sejauh 12 mil dan lain-lain sebagaimana tersebut dalam UUPA.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peraturan-peraturan yang bersifat lebih operasional untuk menjalankan amanat UUPA, yaitu penciptaan iklim kondusif bagi investasi. Beberapa Qanun Aceh (Peraturan Daerah) dan Peraturan Gubernur yang telah selesai disusun disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur yang Mendukung Investasi

No	Qanun/Pergub	Tentang
1	2	3
1	Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009	Penanaman Modal
2	Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008	Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3	Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008	Pelayanan Publik
4	Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2007	Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Aceh Kepada Dewan Kawasan Sabang
5	Qanun Prov. NAD Nomor 04 Tahun 2004	Tata Niaga Pemasukan dan Pengeluaran Barang melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6	Qanun Nomor 8 Tahun 2002	Bantuan Luar Negeri dan Pinjaman Provinsi
7	Qanun Nomor 9 Tahun 2002	Pernyetaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pihak Ketiga
8	Qanun Prov. NAD Nomor 12 Tahun 2002	Pertambangan Umum Minyak Bumi dan Gas Alam
9	Qanun 13 Tahun 2002	Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10	Qanun Prov. NAD Nomor 15 Tahun 2002	Perizinan Kehutanan
11	Qanun Prov. NAD Nomor 16 Tahun 2002	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
12	Qanun Prov. NAD Nomor 17 Tahun 2002	Izin Usaha Perikanan
13	Qanun Prov. NAD Nomor 21 Tahun 2002	Pengelolaan Sumber Daya Alam
14	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2009	Standar Operasional Prosedur Pelayaanan Perizinan Bidang Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam
15	Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010	Pedoman Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sumber : Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda Aceh (2010).

2.5.4. Sumberdaya Manusia

2.5.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari rasio penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. Rasio penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) mengalami peningkatan dari 4,74 persen (2008) menjadi 4,88 persen tahun 2009. Namun, berdasarkan tempat tinggal, rasio penduduk yang dapat menamatkan pendidikan perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) cukup tinggi mengalami ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan yaitu sebesar 12,45 persen di daerah perkotaan dan hanya sebesar 4,16 persen di daerah pedesaan.

2.5.4.2. Rasio Ketergantungan Hidup

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Pada tahun 2008 angka rasio ketergantungan hidup mencapai 54,89 persen dan meningkat menjadi 55,59 persen pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 56 penduduk usia tidak produktif.

2.5.4.3. Aparatur Pemerintah

Pemerintah Aceh mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelayanan publik secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Aceh akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan sumber daya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang ada. Jumlah sumberdaya aparatur daerah/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Aceh pada tahun 2009 adalah 8.723 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.606 orang dan perempuan sebanyak 3.117 orang. Bila dilihat dari tingkat kepangkatan/golongan aparatur pada Pemerintah Aceh adalah golongan IV sebanyak 707 orang, golongan III sebanyak 5.039 orang, golongan II sebanyak

2.822 orang dan golongan I sebanyak 155 orang serta pejabat fungsional sebanyak 734 orang atau sebesar 8,41 persen.

Berdasarkan karakteristik eselon aparatur Pemerintah Aceh terdiri dari eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 53 orang, eselon III sebanyak 234 orang, serta eselon IV sebanyak 604 orang. Sedangkan berdasarkan karakteristik pendidikan jumlah pegawai yang berpendidikan S-3 sebanyak 4 orang, S-2 sebanyak 667 orang, S-1 sebanyak 3.869 orang, DIV sebanyak 17 orang, DIII sebanyak 1.097 orang, SLTA sederajat sebanyak 2.801 orang, SLTP sebanyak 177 orang, serta SD sebanyak 60 orang, namun secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai.

2.5.5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Secara umum, kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu ditunjukkan antara lain oleh masih rendahnya sumbangan IPTEK di sektor produksi dan nilai tambah, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya IPTEK di masyarakat dan terbatasnya sumber daya IPTEK.

Pengembangan IPTEK sangat erat kaitannya dengan peran Perguruan Tinggi (PT) dan Lembaga Riset dalam menghasilkan IPTEK yang bermanfaat dan memiliki daya saing. Aceh mempunyai 10 PT, yang terdiri dari 3 (tiga) PT negeri dan 7 (tujuh) PT swasta, 23 Sekolah Tinggi dan 11 Akademi, yang tersebar di kabupaten/kota se Aceh.

Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi belum dapat dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah tergolong masih sangat rendah, khususnya publikasi ilmiah pada tingkat internasional.

Menurut Ristek (2009), kolaborasi riset universitas dengan perusahaan di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. Demikian juga halnya dengan Aceh, kolaborasi riset antara universitas dengan perusahaan masih belum berjalan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengembangan ilmu dan teknologi di Aceh masih belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas maupun oleh perusahaan-perusahaan. Paten yang dihasilkan oleh intelektual Aceh masih terbatas. Hal ini juga terjadi secara nasional, dimana Indonesia menduduki ranking terendah

dalam menghasilkan paten dibandingkan dengan negara Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

2.5.6. Sumberdaya Energi dan Mineral

2.5.6.1. Sumberdaya Energi

Kebutuhan energi listrik Aceh saat ini di suplai dari beberapa sistem dengan porsi, yaitu: Sistem Transmisi 150 kV Sumut-Aceh sebesar 70,12 persen, PLTD Isolated sebesar 26,62 persen, Sistem Distribusi 20 kV dari wilayah Sumut sebesar 3,26 persen, PLTMH Isolated sebesar 0,75 persen.

Kondisi kelistrikan yang tersambung dalam sistem 150 kV Sumut-Aceh masih mengalami defisit. Untuk mengatasi defisit tersebut sering harus dilakukan penurunan tegangan (*brown out*) dan dalam kondisi tertentu terpaksa dilakukan pemadaman bergilir.

Daerah *isolated* yang masih mengalami defisit adalah daerah Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Untuk mengatasi defisit pada kedua daerah tersebut ditempuh kebijakan dengan memanfaatkan suplai 20 kV dari Gardu Induk yang terdekat jaraknya jauh dari pusat beban. Hal ini menyebabkan tegangan yang diterima pada kedua daerah tersebut pada saat beban puncak *drop* menjadi 16,5-8 kV.

Kapasitas terpasang, pembangkit di Aceh saat ini sebesar 146,5 MW dengan daya mampu rata-rata 98 MW. Sebagian dari pembangkit tersebut merupakan *isolated* murni dan sebagian lagi tersambung ke sistem transmisi 150 kV melalui jaringan distribusi 20 kV. Pembangkit tersebut, sebagian besar (99 persen) adalah jenis PLTD dengan menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Defisit energi di Aceh hingga tahun 2009 adalah sebesar 36,11 MW.

Adapun kualitas tegangan jaringan distribusi untuk beberapa lokasi masih di bawah standar akibat jaringan tegangan menengah (JTM) yang terlalu panjang sampai 165 km dari Pusat Pembangkit/Gardu Induk sehingga tegangan pada sisi SUTM mencapai 16,5 kV dan pada sisi pelanggan mencapai 170 volt.

Gardu Induk yang telah beroperasi sebanyak 7 (tujuh) unit Gardu Induk yang berada di sepanjang pantai timur yang disuplai dari sistem Transmisi 150/20 kV Sumut-Aceh. Namun pada kenyataannya adalah sebesar 130/19,5 kV s.d. 125/19 kV. Beban puncak total PLN wilayah Aceh pada tahun 2008 sebesar 255 MW dengan produksi sebesar 1.365 GWh, dimana 70persen dari produksi tersebut diterima dari system intekoneksi 150 KVa Sumut-Aceh.

Penyaluran energi listrik dalam wilayah Aceh juga mengalami kehilangan arus (susut distribusi), yaitu kehilangan energi listrik pada saat penyaluran dari pembangkit ke pelanggan yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebab kehilangan arus adalah faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis adalah kehilangan energi listrik yang disebabkan oleh kondisi peralatan yang digunakan, sedangkan faktor non teknis disebabkan dari kesalahan administrasi dan pemakaian listrik secara illegal.

Pelayanan listrik pada daerah terpencil yang belum terjangkau oleh PT.PLN dalam jangka pendek telah dilakukan beberapa upaya antara lain pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Jumlah PLTS yang telah disebar pada 11 Kabupaten/Kota sampai akhir tahun 2004 berjumlah 880 buah (50-120 WP). Ditinjau dari kondisinya, lebih dari 80 persen diantaranya telah mengalami kerusakan. PLTMH yang telah dibangun dibeberapa Kabupaten seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Utara dan Aceh Timur hampir seluruhnya telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi lagi. Hal ini disebabkan oleh keadaan konflik sehingga lokasi di pedalaman tidak mungkin dijangkau untuk pemantauan.

Penggunaan energi untuk pembangkitan tenaga listrik saat ini masih bertumpu pada Bahan Bakar Minyak, kecuali sebagian kecil saja yang memanfaatkan energi alternatif. Usaha pemanfaatan sumber energi Non BBM dalam skala besar seperti Power Plant Nagan Raya 2 x 100 MW sedang dalam proses pelaksanaan, PLTA Peusangan 2 x 43 MW dilanjutkan kembali pembangunannya setelah beberapa tahun terhenti. PLTP Jaboi 1 x 50 MW dalam tahap pembangunan, PLTP Seulawah Agam 1 x 180 MW dalam tahap eksplorasi dan PLTU Krueng Raya 1 x 100 MW sedang dalam tahap pembuatan *Feasibility Study*.

Sampai saat ini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Inventarisasi Lokasi Pengembangan Energi, Survey Pendahuluan Geothermal Seulawah Agam, Penyusunan Rancangan Qanun Kelistrikan, Pembangunan PLTMH untuk Pengembangan Listrik Pedesaan. Potensi energi Geothermal terdapat di beberapa Kabupaten/Kota yaitu : Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Gayo Lues.

Pengembangan sistem prasarana energi listrik di Aceh terutama dengan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara yang didukung dengan sistem

setempat (*isolated*) pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau sistem interkoneksi. Dengan pengembangan demikian ini diharapkan dapat dilayani kebutuhan energi listrik sampai ke perdesaan di Aceh.

2.5.6.2. Sumberdaya Mineral

Potensi pertambangan di wilayah Aceh mencakup semua bahan tambang, yaitu: mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, dan air tanah. Potensi pertambangan yang telah teridentifikasi, berdasarkan klasifikasi dahulu atau sebelumnya dikenal dengan bahan tambang strategis (golongan A), bahan tambang vital (golongan B), dan bahan tambang golongan C (bahan galian).

Potensi bahan tambang golongan A dan B berupa migas, panas bumi, *Batubara, Emas (Au), Tembaga (Cu), Perak (Ag), Seng (Zn), Timah Hitam (Pb), Molibdenum (Mo), Besi/Pasir Besi (Fe), Kromium (Cr), Nikel (Ni), Timah Putih (Sn), Mangan (Mn), Platina (Pt), Belerang (S) dan Air Raksa (Hg)* menyebar di 10 (sepuluh) Kabupaten. Sedangkan potensi Mineral Galian Golongan C menyebar hampir di seluruh Aceh yaitu : *Sirtu sungai, Sirtu darat, Pasir Kuarsa, Sirtu Kerikil, Batu Pasir, Batu Gunung, Batu Apung, Tanah Urug, Tanah Liat, Mika, Lempung, Kalsit, Batu Gamping, Serpentinit Berurat Magnesit, Magnesit, Serpentinit, Tufa Gampingan, Phosphat, Trass* dan *Marmer* menyebar di 10 (sepuluh) Kabupaten. Potensi batubara terdapat di Kabupaten Aceh Barat.

Jumlah usaha pertambangan di Aceh tahun 2006, jumlah Kuasa Pertambangan (KP) sebanyak 25 KP, terdiri atas 11 Pertambangan Batubara, 8 Pertambangan Emas, 2 Pertambangan Timah Hitam, 2 Pertambangan Bijih Besi, 1 Pertambangan Pasir Besi dan 1 Kontrak Karya Pertambangan Emas dan Mineral pengikutnya.

Pemanfaatan potensi sumber bahan galian di Aceh melalui usaha pertambangan umum telah dimulai pada tahun 1985 dengan bahan galian timah hitam di Lokop Aceh Timur, pasir besi di Lampahan/Leungah Aceh Besar, emas dan Batubara di Aceh Barat (Tabel 2.47).

Tabel 2.47
Potensi Sumberdaya Mineral Di Aceh
Tahun 2010

No	Sumberdaya Mineral	POTENSI													Keterangan
		Sabang	Pidie	Aceh Timur	Aceh Tamiang	Aceh Tengah	Gayo Lues	Aceh Singkil	Subulussalam	Aceh Selatan	Aceh Barat Daya	Nagan Raya	Aceh Barat	Aceh Jaya	
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	
1	Emas		0.4 -2.4 gr/ton									6,400 ton	0.2 – 4 ppm (gr/ton)	0.2 – 4 ppm	Placer (Aceh Jaya), Endapan Skunder (Pidie), Placer (Aceh Barat)
2	Timah Hitam			400,000 ton	2,400,000 ton		1,200,000 ton								Primer, Belum ditambang (Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues)
3	Tembaga		8 - 40 gr/ton												Primer Belum ditambang (Aceh Pidie)
4	Puzolan/Tras	9,000,000 ton	65,000,000 ton												Belum ditambang (Sabang, Pidie)
5	Posfat				400,000 ton	140,000 ton							3,400 ton	77,000 ton	Belum ditambang (Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Aceh Barat)
6	Pasir Kwarsa							5,250,000 ton						255,000,000,000 ton	Kadar SiO2 86 – 94% (Aceh Jaya)
7	Panas Bumi	74,144 Mwe													Tipe C (Sabang)
8	Marmer						400,000,000 ton			160,750,000 ton	3,431,000 ton	120,000 ton	200,000,000 ton	900,000,000 ton	Belum ditambang (Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan nagan Raya), Abu-abu kristalin (Gayo Lues, Aceh Selatan dan Aceh Barat)
9	Mangan									4,200,000 ton					Endapan Primer (Aceh Selatan)
10	Magnetit/Supermitit										3,600,000 ton				Belum ditambang (Aceh Barat Daya)
11	Kaolin	32,800,000 ton													Belum ditambang (Sabang)
12	Granit			900,000,000 ton											Primer, Belum ditambang (Aceh Timur)
13	Gambut							11,800,000 ton							Belum ditambang (Aceh Singkil)
14	Galena/Timah hitam								4,000,000 ton						Belum ditambang (Subulussalam)
15	Emas, Perak Tembaga		4 -12 ppm (gr/ton)												Endapan Primer (Pidie)
16	Dolomit				1,190,000,000 ton							32,800,000 ton	800,000,000 ton		Belum ditambang (Nagan Raya), Kadar MgO 4 – 14% (Aceh Barat dan Aceh Tamiang)
17	Diatome	120,000 ton	1,400,000 ton												Belum ditambang (Sabang dan Pidie)
18	Bijih Besi Magnetit			22,000,000 ton			22,000,000 ton		20,000,000 ton	1,200,000 ton	12,900,000 ton				Primer, Belum ditambang (Aceh Timur, Gayo Lues, Subulussalam, Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya)
19	Bijih Besi		10,000 ton												Endapan Sungai (Pidie)
20	Belerang	6,400 ton													Belum ditambang (Sabang)
21	Batugamping													5,350,000,000 ton	Belum ditambang (Aceh Jaya)
22	Batubara											9,000,000 ton	350,900,000 ton	2,400 ton	Belum ditambang (Nagan Raya, Aceh Jaya), Kalori 4.200 – 5.600 (Aceh Barat)
23	Andesit	930,000,000 ton												670,000,000 ton	Belum ditambang (Sabang dan Aceh Jaya)

Sumber : Bappeda Aceh, 2010 (Data diolah)

2.6. Perdamaian

2.6.1. Politik dan Reintegrasi

Konflik yang terjadi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah menyisakan berbagai catatan kelam. Kehilangan, kerusakan dan kehancuran kemudian menjadi ruang tuntutan baru pemulihan pasca konflik selain tuntutan kewenangan dan kekhususan secara politik dan ekonomi. Menurut *Multi Stakeholder Review* (MSR, 2010) kerugian akibat konflik diperkirakan mencapai 107.4 triliun rupiah (USD 10,7 miliyar). Angka kerugian tersebut hampir mencapai dua kali lipat angka kerugian akibat tsunami 26 Desember 2004. Sektor produktif merupakan sektor yang paling besar menderita kerugian (64%), diikuti oleh sektor pemerintahan dan administrasi (24 %), infrastruktur dan perumahan (9%) dan sektor sosial sebesar (3%).

Setelah konflik berkepanjangan lebih dari 30 tahun terakhir, situasi di Aceh terlihat mulai mengalami perubahan. Pada tahun 2004, pemerintahan baru yang terpilih secara demokratis dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pada saat yang bersamaan, pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik lebih digalakkan, termasuk melaksanakan pertemuan terbatas dan memperkuat koneksi lain antara Pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga lahirlah sebuah kesepahaman bersama yang disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Nota Kesepahaman ini memberikan Aceh nuansa politik yang baru dan berbeda dengan perpolitikan daerah lainnya di Indonesia karena nota ini mengamanatkan pendekatan-pendekatan baru dalam relasi Indonesia dan Aceh seperti DDR (Demobilisasi – Pemulangan pasukan TNI non-organik, Disarmament – pelucutan senjata, dan Reintegrasi), amnesti bagi para pejuang GAM; pembebasan tahanan-tahanan politik; mengizinkan partai-partai politik berbasis Aceh untuk mengikuti pemilu; dan proposal kesetaraan hubungan ekonomi yang dramatis antara Aceh dan pemerintah pusat, yang memungkinkan Aceh membangun kembali ekonominya setelah hampir selama 30 tahun mengalami pertumbuhan negatif.

Proses reintegrasi politik pasca konflik di Aceh menujukkan hasil yang positif. Angka partisipasi pada pemilu baik di tingkat lokal maupun nasional menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pemilu legislatif tahun 2009 dan pemilihan gubernur tahun 2006 mencatat angka partisipasi

pemilih hingga 75 persen dan 80 persen. Hal ini berarti lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 60,8 persen dan 65 persen.

Selain politik, reintegrasi sosial juga sangat penting untuk menjamin kelestarian perdamaian. Mantan kombatan dan pengungsi konflik telah kembali ke rumah dan diterima kembali dalam masyarakat. Walaupun begitu beberapa indikator menunjukkan bahwa reintegrasi sosial masih belum sepenuhnya terimplementasikan. Masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara masyarakat dan mantan kombatan dalam beberapa kegiatan ekonomi maupun dalam berbagai organisasi masyarakat.

Pasca MoU Helsinki dan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, masih terdapat beberapa turunan produk hukum setingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden dan qanun yang masih dalam perdebatan baik di tingkat nasional maupun lokal. Keberadaan peraturan-peraturan tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka implementasi kesepakatan damai seperti diamanahkan dalam MOU Helsinki dan undang-undang. Untuk mewujudkan berbagai turunan produk hukum memerlukan peran aktif seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam partai politik maupun yang duduk di badan legislatif yang mempunyai fungsi utama *legislator*, *budgeting* dan *controlling.*

Sampai saat ini, ada tiga peta jalan utama pasca Nota Kesepahaman untuk proses perdamaian Aceh, yaitu Instruksi Presiden No. 15 (November 2005), Renstra BRA atau Rencana Strategis (November 2007), dan Rencana Tindakan Komprehensif BRA (Maret 2009).

2.6.2. Hukum dan HAM

Permasalahan penegakan hukum dan HAM adalah hal yang sangat penting dalam pembangunan Aceh. Bahkan penegakan Hukum dan HAM ini menjadi salah satu prasyarat bagi perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Selain itu penegakan hukum dan HAM di Aceh sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama dunia usaha dan industri, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi.

Permasalahan hukum lainnya yang masih dihadapi dalam pembangunan hukum Aceh adalah terkait penetapan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan

Presiden (Perpres) sebagai implementasi UUPA, yang sampai saat ini belum semuanya dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Disamping itu terkait dengan materi Qanun belum sepenuhya sesuai dengan ruh otonomi khusus Aceh sebagaimana amanat UUPA dan MoU Helsinki. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya inventarisasi Qanun-Qanun yang telah disahkan dan diundangkan sebelum pemberlakuan otonomi khusus kemudian dilakukan revisi atau dicabut dengan Qanun baru serta percepatan penyusunan dan pembahasan Qanun pelaksanaan UUPA yang masih tersisa.

Lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan kurangnya kepatuhan terhadap hukum tidak saja di tingkat kehidupan masyarakat, tetapi juga melanda di lingkungan aparat penyelengaraan Pemerintah Aceh.

Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah ditetapkan baik kepada masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintah Aceh, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dan aparatur penyelenggara, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum menjadi hilang.

MoU Helsinki dan UUPA menyebutkan bahwa sebagai bagian dari penataan hukum dan HAM di Aceh perlu dibentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai bagian dari KKR Nasional guna memperkuat perdamaian di Aceh. Selain itu, praktek-praktek pelanggaran hak-hak sipil yang dilakukan personel militer akan diadili di pengadilan sipil di Aceh.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Aceh untuk waktu 20 (dua puluh) Tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2012-2032.

3.1. Permasalahan dan Tantangan Di Aceh

Konteks kekinian dari Aceh tidak terlepas dari dua peristiwa besar yaitu konflik dan bencana gempa bumi dan tsunami, kedua peristiwa ini mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Aceh. Berbagai indikator pembangunan menunjukkan kecenderungan memburuk akibat dari kedua peristiwa tersebut. Aceh menjadi satu-satunya Provinsi di Indonesia yang terus-menerus mengalami tingkat pertumbuhan yang rendah atau negatif. Bencana alam melengkapi penderitaan dengan banyaknya korban nyawa selain kerusakan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial pada skala masif.

Tahun 2005 merupakan babak baru kehidupan masyarakat Aceh yang ditandai dengan berlangsungnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan kesepakatan damai melalui penandatanganan *MoU Helsinki* pada tanggal 15 Agustus 2005. Namun, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang didukung oleh berbagai lembaga nasional dan internasional hanya bersifat sementara (2005-2009). Demikian juga dengan perdamaian di Aceh masih sangat muda sehingga berbagai struktur sosial ekonomi yang rusak akibat konflik belum sepenuhnya pulih, hal ini dapat menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan Aceh ke depan.

Sejak tahun 2001, Aceh telah mendeklarasikan pelaksanaan Syariat Islam. Namun, Nilai-nilai Islami belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam masih belum sempurna. Demikian juga dengan adat istiadat dan budaya telah mengalami pergeseran. Hal ini menjadi tantangan masyarakat Aceh untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat

yang islami. Ketahanan dan kecerdasan ini perlu ditingkatkan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Aceh memasuki masa transisi ekonomi dimana kegiatan ekonomi sekunder mulai mengalami peningkatan. Proses transisi ini memberikan dampak pada alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman, perkantoran, pertokoan dan pusat-pusat komersial lainnya. Demikian juga halnya dengan fungsi lahan hutan yang mengalami perubahan menjadi lahan perkebunan dan penggunaan lainnya yang tidak sesuai dengan RTRW Aceh.

Meningkatnya kegiatan eksploitasi sumberdaya alam seperti kegiatan penambangan liar dan alih fungsi lahan hutan menyebabkan degradasi lingkungan yang dicirikan semakin luasnya lahan kritis dan lahan terlantar. Hal ini juga dipicu dengan adanya kebijakan dan implementasinya yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Selanjutnya, Aceh juga merupakan salah satu daerah rawan bencana terutama gempa bumi dan tsunami, banjir dan longsor karena terletak pada lintasan pertemuan lempeng *Indo-Australia* dan *Euro Asia* serta dipengaruhi oleh iklim tropis dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan.

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) Aceh mengalami kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dikomparasikan dengan pencapaian rata-rata nasional, kualitas SDM Aceh yang direpresentasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) masih lebih rendah dari IPM nasional. Selanjutnya, kualitas SDM sangat menentukan untuk dapat bersaing dalam era globalisasi. Daya saing SDM Aceh masih tergolong rendah yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan SDM kejuruan yang memiliki keterampilan (*skill*), jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi masih rendah dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi.

Berdasarkan angka rata-rata nasional, penduduk miskin Aceh masih tergolong tinggi. Demikian juga halnya dengan ketimpangan antar wilayah masih tergolong tinggi dan daerah tertinggal di Aceh masih banyak, termasuk didalamnya daerah-daerah perbatasan dengan provinsi dan negara tetangga. Usia harapan hidup masyarakat Aceh berada di bawah rata-rata nasional. Penyebab kematian utama di Aceh dikarenakan oleh penyakit non infeksi

seperti strok, hipertensi dan diabetes mellitus. Selain itu daerah Aceh dikenal sebagai daerah endemik penyakit menular seperti DBD, malaria dan diare.

Aceh memasuki fase transisi kependudukan dimana terdapat peningkatan rasio ketergantungan hidup yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan akibat beban tanggungan hidup yang meningkat. Hal ini juga menyebabkan penurunan tabungan dan investasi yang dimiliki masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan menjadi terbatas.

Sesuai dengan RTRW Nasional dan RTRW Aceh, beberapa kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan strategis. Namun pengembangan wilayah ini masih belum terlaksana seperti yang diharapkan. Sehingga masih terlihat ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota. Demikian juga dengan posisi strategis Aceh yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga dan didukung dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan aturan Pelaksanaannya dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga/Badan di Luar Negeri pada hakikatnya menjadi peluang untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang yang mendukung pembangunan Aceh. Namun peluang ini masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Pembiayaan pembangunan Aceh juga masih tertumpu pada pendanaan yang bersumber dari Pemerintah sehingga kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jumlah besar seperti infrastruktur tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam konteks ini, peran dunia usaha untuk mendukung pendanaan pembangunan masih belum memungkinkan karena belum adanya regulasi yang mengatur peran dunia usaha dalam pendanaan pembangunan Aceh.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Aceh mendapatkan bantuan dana otsus selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2008-2027 yang setara dengan 2 persen dari DAU nasional untuk jangka waktu 15 tahun pertama dan 1 persen untuk 5 tahun terakhir. Mengingat waktu pengelolaan dana yang terbatas maka perlu dikelola dengan lebih optimal dan profesional.

Kondisi saat ini produksi migas Aceh semakin menurun dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2014 sehingga mempengaruhi sumber pendanaan pembangunan dari sektor migas. Permasalahan ini akan

berdampak pada pertumbuhan ekonomi Aceh. Seiring dengan menurunnya cadangan migas Aceh, maka sektor pertanian menjadi andalan yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh dan penyerapan tenaga kerja. Namun sektor pertanian ini belum didukung dengan peningkatan nilai tambah komoditi andalan masing-masing wilayah melalui perbaikan mutu dan pengolahan komoditas untuk mendorong peningkatan nilai tambah daerah. Demikian juga halnya terhadap sektor kelautan dan perikanan masih belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan karena sebagian besar nelayan Aceh merupakan nelayan tradisional.

Infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk mempercepat pergerakan penumpang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain masih sangat minim, demikian juga dengan pengelolaan sumber daya air (pengairan dan air minum) yang belum optimal. Demikian juga dibidang kelistrikan mengalami defisit energi yang sangat besar, yang selama ini kebutuhan itu masih dipasok dari Sumatera Utara sehingga mengalami kehilangan arus dalam proses pendistribusiannya. Sehingga kebutuhan energi untuk daerah-daerah terpencil masih belum terjangkau.

Disamping itu, permasalahan defisit energi karena belum dimanfaatkannya sumber energi alternatif seperti energi panas bumi, energi air, tenaga angin serta sumber energi alternatif lainnya. Pemanfaatan sumberdaya mineral untuk mendukung pembangunan Aceh masih belum optimal, karena potensi ini masih belum dapat dimanfaatkan oleh investor akibat kurangnya informasi, promosi dan regulasi yang mendukung investasi.

Pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals*) merupakan permasalahan dan tantangan global yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Aceh. Tujuan pembangunan milenium memiliki 8 (delapan) indikator yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) Mewujudkan pendidikan dasar, (3) Meningkatkan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, (4) Mengurangi angka kematian bayi, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan (8) Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Kesepakatan kerja sama IMT-GT di tandatangani pada tahun 1993 dan kerjasama China-AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) akan dimulai oleh masyarakat ekonomi ASEAN dengan China pada tahun 2011. Hal ini menuntut perlunya

kerjasama yang semakin efektif di tingkat regional sebagai basis penting dalam mendukung peningkatan ketahanan nasional. Selain itu juga menjadi peluang pasar bagi produk unggulan daerah untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi regional.

Untuk mendukung ekspor/impor Indonesia wilayah barat, Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas, namun sampai saat ini pelabuhan bebas Sabang belum berkembang secara optimal.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memiliki peran yang sangat penting untuk dapat bersaing di era globalisasi dan mendukung pembangunan Aceh. Dalam konteks ini, Aceh masih memiliki beberapa permasalahan antara lain: terbatasnya penguasaan IPTEK, rendahnya pemanfaatan hasil IPTEK oleh masyarakat dan dunia usaha dan belum terjalinnya kolaborasi riset antara universitas dengan dunia usaha yang didukung oleh pemerintah.

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan masih merupakan permasalahan yang harus dihadapi karena berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Belum adanya upaya-upaya pencegahan dan adaptasi yang dilakukan secara optimal sehingga menyebabkan semakin menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan.

3.2. Analisis Isu-isu Strategis

Kondisi Aceh yang baru lepas dari bencana tsunami dan konflik memberikan sebuah peluang sekaligus tantangan yang sangat besar bagi pembangunan Aceh.

3.2.1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi melalui komitmen pendanaan yang sangat besar dari Pemerintah Indonesia dan Lembaga Donor Internasional diharapkan dapat membangun kembali Aceh secara lebih baik. Kucuran dana dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan pergerakan ekonomi yang lebih baik. Namun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dibatasi oleh pendanaan dan waktu yang terbatas (2005-2009) sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dituntaskan dan memfungsionalkan hasil-hasil yang telah dicapai.

3.2.2. Kerentanan Perdamaian

Perdamaian di Aceh memberikan ruang ideal bagi tumbuhnya kesejahteraan. Proses reintegrasi pihak-pihak yang bertikai harus berjalan secara hati-hati dan sempurna. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang baru selesai dari konflik kembali terjebak kepada kekerasan karena proses reintegrasi berjalan timpang, sektoral dan tidak adil. Pelestarian perdamaian yang merupakan prasyarat bagi efektifitas pembangunan di Aceh harus dipastikan dengan program pembangunan yang terpadu dan menyentuh segala lapisan dan golongan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

3.2.3. Pemantapan Syariat Islam dan Ketahanan Budaya

Nilai-nilai Islami belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam masih belum sempurna. Makin terbukanya Aceh pasca tsunami dan konflik serta derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi merupakan faktor eksternal. Hal ini menjadi tantangan masyarakat Aceh untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang islami. Selama ini pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung merusak jati diri Aceh. Karenanya perlu dilakukan pemantapan akidah dan pemahaman Syariat untuk meningkatkan ketahanan (*resilience*) budaya dan kecerdasan masyarakat Aceh terhadap infiltrasi budaya asing yang dapat merusak akidah. Ketahanan dan kecerdasan ini perlu ditingkatkan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

3.2.4. Integrasi Dana Pembangunan belum Optimal

Sumber pendanaan untuk pembangunan Aceh yang berasal dari Pendapatan Asli Aceh (PAA dan PAK), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus yang sesuai dengan UUPA, dan lain-lain pendapatan yang sah selama ini belum terintegrasi secara strategis dan optimal.

3.2.5. Penurunan Sumber Penerimaan Daerah dari Migas

Era hidro-karbon di Aceh terus menurun yang ditandai dengan terus berkurangnya produksi minyak dan gas. Sedangkan sumber-sumber minyak dan gas baru belum ditemukan. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir,

kontribusi sektor minyak dan gas tidak lagi dominan terhadap perekonomian Aceh dan telah diganti oleh sektor pertanian. Kondisi ini mengharuskan perubahan fokus pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Aceh dari non migas.

3.2.6. Alih Fungsi Lahan Semakin Meluas

Alih fungsi lahan yang dapat menyebabkan kecendrungan perubahan fungsi suatu lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya semakin meluas di Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

3.2.7. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Aceh masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Nasional. Demikian juga dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota masih tinggi, dimana IPM di perkotaan pada umumnya lebih tinggi dari perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yang masih rendah sehingga harus ditingkatkan.

3.2.8. Pemanasan Global dan Tingkat Pencemaran Lingkungan

Pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan, sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud daripada perubahan iklim. Demikian juga dengan tingkat pencemaran lingkungan yang harus diwaspadai. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan adaptasi dari pemanasan global dan tingkat pencemaran lingkungan ini sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terpelihara.

3.2.9. Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana

Pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara tidak terkendali dapat menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari eksploitasi sumberdaya alam seperti hutan secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan fungsi hutan secara proporsional dan kegiatan penambangan yang tidak terkendali sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang dapat menimbulkan bencana. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan secara terkendali dan meningkatkan nilai tambah produk sumberdaya alam. Disamping itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus berorientasi kepada

pemanfaatan sumberdaya alam terbaharukan dan jasa lingkungan seperti wisata lingkungan, perdagangan karbon dan pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu.

Aceh terletak pada lintasan pertemuan lempeng *Indo-Australia* dan *Euro Asia* serta dipengaruhi oleh iklim tropis. Kenyataan ini membuat bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar.

3.2.10. Pertanian Menjadi Sektor Harapan

Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Aceh menempati urutan pertama dari segi Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDRB non migas). Sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Aceh. Namun sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Hal ini diindikasikan dengan masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan rata-rata yaitu sebesar 98,68 persen yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas komoditi, jumlah dan kualitas SDM di bidang pertanian masih terbatas, kurang sarana dan prasarana pendukung lainnya serta masih lemahnya jaringan pasar.

3.2.11. Peningkatan Nilai Tambah Daerah

Tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian sebagai produksi utama Aceh masih rendah karena belum tersedia sarana dan prasarana pendukung dan SDM yang memadai. Sebagian besar ekspor yang dilakukan berupa bahan mentah sehingga pengolahan komoditas pertanian menjadi penting untuk memberi nilai tambah, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan pasar terhadap komoditas. Karena itu, perubahan paradigma pembangunan sektor pertanian mutlak diperlukan dengan prioritas peningkatan nilai manfaat dari produk-produk pertanian Aceh.

3.2.12. Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum Optimal

Aceh memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang diantaranya terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal yang berkaitan dengan ketersediaan benih, penanganan penyakit, penanganan pasca panen, infrastruktur pertambakan dan pemasaran.

Perikanan tangkap masih menghadapi beberapa hambatan seperti terbatasnya armada yang berjelajah tinggi, rendahnya teknologi penangkapan, belum memadainya teknologi pengolahan, kapasitas SDM yang rendah. Sehingga nelayan Aceh kalah bersaing dengan nelayan-nelayan internasional lainnya. Sebagian besar nelayan Aceh merupakan nelayan tradisional yang memiliki sarana dan teknologi tangkap yang minim serta daya jelajah yang terbatas. Kondisi ini tidak ideal karena wilayah laut teritorital (12 mil) dan Zona Ekonomi Ekslusive (200 mil) belum termanfaatkan secara optimal.

3.2.13. Tingginya Beban Tanggungan Hidup Penduduk

Rasio ketergantungan hidup merupakan perbandingan jumlah penduduk usia produktif (15-55 tahun) berbanding jumlah penduduk usia non produktif (<15 tahun dan >55 tahun). Rasio ketergantungan hidup di Aceh cenderung meningkat sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan karena beban tanggungan hidup yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas, rendahnya kesempatan kerja dan belum terkendalinya pertumbuhan penduduk.

3.2.14. Pengembangan Wilayah Strategis

Secara geografis, Aceh memiliki peluang untuk berkembang karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan lautan Hindia. Demikian juga dengan telah ditetapkannya Sabang sebagai PKSN dalam tata ruang nasional, UU Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Sebagai Pelabuhan Bebas demikian juga dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menetapkan Pelabuhan Sabang sebagai *Hubport* yang berfungsi sebagai Pelabuhan Ekspor/Impor Internasional dan Pelabuhan Transit yang berpeluang untuk dikembangkan. Namun, pertumbuhan kawasan tersebut masih belum berkembang seperti yang diharapkan karana sarana dan prasarana belum memadai. Disamping itu, pengembangan wilayah Kabupaten/Kota yang belum seimbang dan terintegrasi antara wilayah barat, tengah dan wilayah timur.

3.2.15. Rendahnya Daya Saing

Daya saing sumberdaya manusia (SDM) Aceh masih tergolong rendah. Hal ini tergambar dari rasio tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dengan jumlah penduduk masih kecil dan jumlah lulusan sekolah kejuruan yang

menguasai ketrampilan masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Disisi lain, kualitas SDM masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat. Demikian juga rasio ketergantungan hidup penduduk usia produktif Aceh masih tinggi, sehingga produktivitasnya terbatas. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan daya saing SDM tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah tetapi juga terhadap peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan (kurikulum, tenaga pengajar dan fasilitas), peningkatan kerjasama dengan dunia usaha serta memperluas kesempatan magang, pelatihan dan studi lanjut.

Dalam skala yang lebih luas, tumbuhnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India, perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan perekonomian Aceh. Oleh karena itu, daya saing SDM merupakan indikator kunci agar Aceh dapat menghadapi persaingan global.

3.2.16. Rendahnya Peran Dunia Usaha dalam Pembangunan

Pembangunan dalam rangka peningkatan ekonomi Aceh membutuhkan dukungan dari dunia usaha yang selama ini masih belum berperan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang belum memihak kepada dunia usaha, reformasi di sektor keuangan yang masih terbatas, jumlah tenaga kerja profesional yang masih terbatas dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dengan demikian, peran asosiasi dunia usaha sangat diperlukan dalam meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan.

3.2.17. Pengembangan Sumberdaya Energi dan Mineral

Kapasitas listrik di Aceh hingga kini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, usaha, umum dan industri. Kondisi saat ini baru 60% (enam puluh persen) yang terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga yang sebagian besar dipasok dari Sumatera Utara. Sementara itu, untuk kebutuhan energi listrik untuk mendukung dunia usaha dan industri masih belum tersedia. Diperkirakan untuk 5 (lima) tahun kedepan Aceh membutuhkan pasokan listrik sekitar 500 MW. Pada tahun 2025 diperkirakan kebutuhan energi listrik sebesar 7.131 MW.

Untuk mengatasi kendala kebutuhan energi listrik difokuskan pada energi terbaharukan (non fosil) antara lain; energi panas bumi, energi air, tenaga angin dan tenaga surya. Beberapa sumber energi terbarukan tersebut sudah mulai dikembangkan seperti energi panas bumi Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar, energi tenaga air Krueng Peusangan dan energi tenaga angin Kluet Selatan di Aceh Selatan. Sementara itu, sumber energi terbarukan lainnya masih pada tahap pengkajian dan perlu ditindaklanjuti sebagai prioritas pembangunan jangka panjang.

Aceh memiliki sumberdaya mineral yang cukup potensial, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bebarapa potensi pertambangan di wilayah Aceh mencakup semua bahan tambang, yaitu: mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, dan air tanah. Potensi pertambangan yang telah teridentifikasi terdiri dari; bahan tambang strategis (golongan A), bahan tambang vital (golongan B), dan bahan tambang golongan C (bahan galian). Potensi ini masih belum dimanfaatkan oleh investor dari dalam dan luar Aceh akibat kurangnya informasi, promosi dan regulasi yang mendukung investasi.

3.2.18. Kemiskinan,Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Wilayah

Persentase penduduk miskin di Aceh masih tergolong tinggi (21,80%) yang melebihi angka rata-rata Nasional (14,20%) bahkan pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Aceh berada pada urutan ke tujuh tertinggi di Indonesia. Penduduk miskin umumnya berada di perdesaan pada 17 Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Hal ini mengindikasikan permasalahan kemiskinan di Aceh merupakan hal mendasar yang harus ditangani secara menyeluruh dan berkesinambungan. Demikian juga dengan indeks ketimpangan wilayah Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan nilai indeks ketimpangan rata-rata Indonesia. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan antar wilayah di Aceh perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

3.2.19. Beban Ganda Kesehatan

Penyebab kematian utama di Aceh adalah penyakit tidak menular seperti *Stroke*, Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Sementara itu, pada saat yang sama prevalensi penyakit infeksi menular juga masih menjadi permasalahan kesehatan di Aceh seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, typhus, malaria dan hepatitis. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa Aceh menghadapi beban ganda pembiayaan kesehatan.

3.2.20. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Aceh masih terbatas dalam penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang mendukung pembangunan. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi iptek di sektor produksi dan nilai tambah, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek serta hak intelektual (paten) yang dihasilkan masih terbatas. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi belum dapat dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Kolaborasi riset antara universitas dengan dunia usaha dan pemerintah masih belum sinergis.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012 - 2032

Berdasarkan kondisi Aceh saat ini dan skenario yang dihadapi dalam 20 Tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, visi pembangunan Aceh Tahun 2012-2032 adalah:

ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA

Visi pembangunan Aceh tahun 2012 - 2032 adalah kondisi Aceh yang diharapkan lebih Islami, Maju, Damai dan Sejahtera sebagaimana tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Islami adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki karakter dan akhlak mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Masyarakat Aceh yang Islami dicirikan dengan terlaksananya pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah dalam semua sendi kehidupan dan terciptanya kerukunan hidup beragama.

Maju adalah kondisi masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kondisi ini dicerminkan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, mantapnya ekonomi, kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial dan politik.

Damai adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan baik serta memiliki rasa aman. Damai merupakan kondisi dalam masyarakat yang tidak mengalami konflik pada komunitasnya dan hidup secara selaras serasi seimbang.

Sejahtera adalah sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha

dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.

Selain memiliki berbagai indikator ekonomi, sosial dan spritual yang lebih baik, masyarakat yang sejahtera juga harus memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk kepastian hukum. Lembaga politik dan kemasyarakatan berfungsi sesuai konstitusi yang ditetapkan oleh rakyatnya. Masyarakat yang sejahtera juga ditandai dengan adanya peran serta secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami** adalah membangun sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki landasan spiritual, moral, dan etika, berpendidikan, memiliki daya saing, memelihara kerukunan antar umat beragama, serta menjunjung tinggi nilai luhur agama dan budaya.
2. **Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual** adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara optimal dalam rangka membangun masyarakat mandiri; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif; membangun, memelihara dan mengembangkan aneka ragam kekayaan budaya dalam masyarakat; memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antar individu, keluarga, masyarakat serta lingkungan.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan budaya demokrasi dalam masyarakat; memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil; menjamin kebebasan media secara bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.

4. **Mewujudkan Aceh yang aman**, **damai**, **dan bersatu** adalah melestarikan perdamaian secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan; menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek; dan melaksanakan pembangunan yang berbasis peka konflik; serta menjaga keutuhan wilayah Aceh.

5. **Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk semua; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengembangan, penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan dalam skala lokal, regional dan internasional; mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat kelompok dan kabupaten/kota yang masih lemah; dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

6. **Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana** adalah melaksanakan pembangunan Aceh dengan prinsip berkelanjutan dan keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengelola dan memanfaatkan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya; melakukan upaya perlindungan dan pemulihan kawasan kritis untuk memperbaiki kualitas daya dukung lingkungan; dan meningkatkan upaya pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagai modal dasar pembangunan; serta mengubah paradigma penanganan terhadap bencana yang cenderung masih bersifat tanggap darurat menjadi kesiapsiagaan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 adalah mewujudkan Aceh yang Islami, maju, damai dan sejahtera. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

5.1. Sasaran Pokok Pembangunan

5.1.1. Terwujudnya masyarakat Aceh yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami

ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Terwujudnya masyarakat Aceh berkualitas, memiliki karakter Islami yang dicirikan dengan sehat jasmani, rohani dan sosial, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki moral dan etika yang baik, rajin, tangguh, cerdas dan memiliki kompetensi dan daya saing, toleransi tinggi, berbudi luhur, peduli lingkungan, patuh pada hukum, serta mencintai perdamaian.
b. Terwujudnya kerukunan hidup antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar umat beragama.
c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*).
d. Terwujudnya kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

5.1.2. Terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya ketersediaan dan keamanan pangan masyarakat Aceh.
b. Tersedianya penunjang pertumbuhan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.
c. Terlaksananya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Aceh, terutama koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta tumbuhnya wirausaha baru.

d. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara atau lebih dari rata-rata nasional yang berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
e. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan kualitas kesehatan, akses, mutu dan relevansi pendidikan formal/informal melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
f. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dalam masyarakat.
g. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai islami dan nilai luhur budaya Aceh dalam kehidupan bermasyarakat.

5.1.3. Terwujudnya Aceh yang demokratis dan berlandaskan hukum

ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia secara non-diskriminatif.
b. Tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai kearifan lokal, adat istiadat dan budaya Aceh.
c. Terwujudnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik dan kegiatan pembangunan.
d. Terwujudnya penguatan sistem kelembagaan yang memiliki nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kemitraan.
e. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

5.1.4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Aceh

ditandai oleh hal-hal berikut:

a. Terjaminnya rasa aman dan damai masyarakat dalam menjalani kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama.
b. Terwujudnya keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah.
c. Terwujudnya keutuhan wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat yang tidak terpisahkan dalam satu bingkai Aceh.
d. Terbangunnya struktur masyarakat yang memiliki ketahanan dan kemampuan dalam menangani potensi konflik sosial yang berbasis pada kearifan dan nilai-nilai lokal.

5.1.5. Terwujudnya pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata.

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut**:**

a. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Terlaksananya peningkatan pelayanan dasar yang integratif dan komprehensif, berkualitas secara adil dan merata serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelompok masyarakat, status ekonomi, sosial dan gender.
c. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
d. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di setiap wilayah. Sektor pertanian dan industri menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang mempunyai nilai tambah dan berkualitas; industri manufaktur yang mendukung sektor pertanian berdaya saing global merupakan motor penggerak perekonomian. Sektor jasa dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dapat meningkatkan daya saing sehingga dapat menjadi daya tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
e. Meningkatnya optimasi pemanfaatan ruang untuk aktivitas ekonomi didukung dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, infrastruktur pengelolaan sumberdaya

air yang berkelanjutan, infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan modern, pasokan energi yang handal dan efisien, serta sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas.

f. Terwujudnya pengembangan kawasan tertinggal dan terpencil sehingga dapat tumbuh, berkembang dan mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain. Terciptanya sinergisitas kegiatan ekonomi antara kawasan terpencil dan tertinggal dengan kawasan cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi;
g. Meningkatnya sinergisitas kegiatan ekonomi dari tahap awal produksi sampai tahap konsumsi serta meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa antar wilayah Aceh dengan dukungan regulasi yang efektif.

5.1.6. Terwujudnya Aceh yang lestari dan tanggap terhadap bencana

yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Terciptanya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang seimbang dan berdaya guna sesuai dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekologis.
b. Meningkatnya perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan di masa mendatang dengan memperhatikan prinsip keselarasan dan perubahan global melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.
c. Terciptanya komitmen bersama yang kuat untuk menjadikan Aceh tanggap dan siap menghadapi bencana serta adanya perubahan paradigma masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana yang lebih bersifat kesiapsiagaan kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya kelompok rentan, dengan memperhatikan aspek gender (*gender mainstreaming*).

5.2. Arah Kebijakan

5.2.1. Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Berakhlak Mulia sesuai dengan Nilai-nilai Islami

Pembangunan masyarakat Aceh yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islami diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran masyarakat dalam pembangunan dengan landasan moral dan etika sehingga menjadi kekuatan pendorong utama untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

Sistem Pendidikan Islami merupakan sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam (*Islamic value-based education*), yang di dalamnya juga mengandung komponen-komponen pendidikan umum lainnya, seperti kurikulum, pengajaran, guru, siswa, manajemen, dan fasilitas.

Tujuan dari pendidikan Islami adalah untuk pembinaan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta pembentukan akhlak mulia, penyadaran manusia akan pentingnya ilmu pengetahuan serta pengembangan manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

A. Membangun sumberdaya manusia yang Islami

1. Pembangunan dan pemantapan karakter Islami dilakukan dengan pengembangan konsep pendidikan Islami melalui institusi pendidikan formal dan non formal, dengan tujuan membentuk generasi penerus yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan memiliki daya saing.

2. Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan yang berbasis nilai islami yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya percepatan implementasi sistem pendidikan Islami juga dikuatkan dengan tersedianya landasan hukum dan prosedur operasi standar yang dapat menjadi pedoman dalam sistem pendidikan.

3. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan dilakukan melalui peningkatan jumlah dan kualitas guru mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam mata pelajaran keilmuan lainnya, peningkatan kapasitas penyelenggara pendidikan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

4. Penguatan dan pemantapan peran keluarga, masyarakat, lingkungan sosial kemasyarakatan, ulama dan umara dalam membentuk karakter masyarakat yang Islami.

B. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup dalam masyarakat

1. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat perlu dikembangkan secara berkelanjutan sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang damai dan harmoni dengan memelihara kerukunan antar individu, kelompok, dan umat beragama; interaksi antar budaya serta nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan.
2. Pemantapan kapasitas dan kredibilitas pemerintah, lembaga-lembaga politik dan demokrasi, pranata-pranata lokal/adat serta media massa, dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator atau mediator untuk menanggulangi dan mencegah konflik.
3. Pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui cara-cara damai, peningkatan dialog dan koordinasi antar umat beragama dan antar instansi/lembaga pemerintah, melakukan penyempurnaan dan penegakan hukum serta peraturan perundangan.

C. Pembangunan Pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*)

1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah berdasarkan nilai-nilai Islami, penegakan hukum dan tertib sosial yang konsisten melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat termasuk kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui lembaga perwakilan. Selain itu adanya *rule of law* yaitu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan yang harus dipatuhi secara utuh yang menjamin keadilan untuk semua warga masyarakat.

D. Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama diarahkan pada peningkatan dan pengelolaan fungsi sarana ibadah, peningkatan mutu pengelolaan dan pelayanan dana sosial keagamaan (zakat, infaq, dan sedekah), serta peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan.

2. Penguatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dibidang keagamaan, dayah, pesantren, balee seumeubeut dan lembaga pendidikan Islam lainnya.
3. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh sesuai qanun yang telah ada secara konsisten dan tersedianya peraturan perundangan (qanun) baru sesuai dengan kebutuhan.
4. Pengembangan dan pemantapan peran Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan hukum Islam di Aceh untuk menciptakan pelayanan hukum sesuai azas peradilan yang tepat, cepat, sederhana dan biaya ringan.
5. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan terutama dalam pelaksanaan hukum, pendidikan, kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, tatanan politik, pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik dan informasi media massa harus sesuai dengan tuntunan Islam.

5.2.2. Mewujudkan Masyarakat yang Mampu Memenuhi Kehidupan secara Ekonomi, Sosial dan Spiritual

Masyarakat yang mampu memenuhi kehidupan secara ekonomi, sosial dan spiritual adalah merupakan kunci kesejahteraan Aceh. Kesejahteraan harus tercermin pada setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh, artinya semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapat pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, menunaikan ibadah, dan mendapat perlindungan secara hukum.

A. Terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya ketersediaan pangan masyarakat Aceh melalui:
   1. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan pangan, terutama dari produksi dalam daerah, dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaedah kesehatan dan gizi seimbang serta mengembangkan kemampuan dalam pemupukan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
   2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui peningkatan daya beli, produktifitas pangan dan menghilangkan hambatan distribusi antar daerah.

3. Pengembangan teknologi pengolahan, pemasaran dan kelembagaan pangan untuk menjaga kualitas produk dan mendorong peningkatan nilai tambah.
4. Peningkatan produksi dan kualitas komoditas andalan wilayah, pengembangan teknologi pengolahan, pemasaran dan kelembagaan pangan yang mendorong peningkatan nilai tambah.
5. Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan skema distribusi pangan kepada kelompok masyarakat tertentu yang mengalami kerawanan pangan.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang yang menjamin pemenuhan asupan pangan bagi setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dan halal dikonsumsi dan bergizi seimbang; mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan; mengembangkan program perbaikan gizi yang *e*fisien, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program diversifikasi pangan dan program suplementasi gizi; mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi; dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan kepada masyarakat golongan miskin terutama anak-anak dan ibu hamil yang bergizi kurang.
7. Peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya preventif, promotif dan pelayanan gizi kesehatan kepada masyarakat miskin dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang yang diprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak yaitu ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya; meningkatkan upaya preventif, promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan pada kelompok masyarakat dewasa dan usia lanjut dalam rangka mengurangi laju peningkatan prevalensi penyakit bukan infeksi yang terkait dengan gizi; meningkatkan kemampuan riset di bidang pangan dan gizi untuk menunjang upaya penyusunan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi kegiatan pangan dan gizi; meningkatkan profesionalisme tenaga gizi dari berbagai tingkatan melalui pendidikan dan pelatihan yang teratur dan berkelanjutan; meningkatkan efektivitas fungsi

koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di bidang pangan dan gizi sehingga terjaminnya keterpaduan kebijakan.

8. Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen, importir, distributor dan ritel terhadap keamanan pangan; meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan dan mengembangkan teknologi bahan makanan yang aman dan memenuhi syarat kesehatan serta terjangkau oleh usaha kecil dan menengah produsen.
9. Perbaikan pola hidup sehat untuk mendukung akses dan pelayanan yang seluas-luasnya pada masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat; meningkatkan komitmen dan peran serta pemangku kepentingan dalam mendukung program pola hidup sehat; meningkatkan fungsi dan kapasitas sektor-sektor terkait dalam pengembangan pola hidup sehat; melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pelaksanaan program pola hidup sehat; mengembangkan progam Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

B. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Aceh, terutama koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta tumbuhnya wirausaha baru.

1. Pengembangan koperasi secara luas sesuai kebutuhan dengan iklim usaha kondusif bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembaga-lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan meminimalkan berbagai hambatan untuk perkembangan usaha koperasi sehingga menjadi wahana yang efektif dan efisien secara kolektif untuk para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi yang menjadi gerakan ekonomi berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Pemberdayaan usaha mikro yang strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui

peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha dengan pengembangan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang berdaya saing baik di pasar domestik maupun manca negara serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan dan pembinaan usaha di Aceh.

3. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi pelaku ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perubahan struktur untuk memperkuat perekonomian regional; pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar, penerapan hasil inovasi dan teknologi dalam iklim usaha yang sehat; pengembangan UKM yang terintegrasi dalam bentuk agribisnis untuk mendukung ketahanan pangan serta penguatan basis produksi dan daya saing industri.

C. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara atau lebih dari provinsi lain yang berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

1. Menjamin kondisi keamanan yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
2. Menjamin peluang yang seluas-luasnya kepada investor untuk berivestasi dengan regulasi yang efektif.
3. Menjamin kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat ekonomi lemah dengan penyediaan sumber pembiayaan lunak.
4. Menjamin peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Menetapkan zakat, infaq dan shadaqah sebagai sumber alternatif pendanaan pembangunan.

D. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui :

1. Pemerataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat di jalur formal, informal, dan non formal dengan memperhatikan kondisi wilayah dan kelompok rentan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan yang diarahkan pada pada pengurangan angka putus sekolah dan angka tinggal kelas;
3. Pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien dengan pencitraan publik yang akuntabel dan profesional;
4. Pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan sebagai dasar peningkatan daya saing nasional dan internasional;
5. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang akurat, tepat waktu dan transparan bagi pengelola dan pengguna jasa pendidikan untuk dijadikan bahan bagi peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan;
6. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada: peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan agar mampu berperan seimbang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan yang relevan; penurunan jumlah tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan; pemberian jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan; penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan statistik gender dan anak;
7. Pembangunan perlindungan anak diarahkan pada pemenuhan hak anak dalam pendidikan, kesehatan, hak sipil dan hak sosial lainnya seiring tumbuh kembang anak; peningkatan perlindungan anak dari berbagai tindak perlakuan yang tidak patut, termasuk tindak diskriminasi, kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi;
8. Peningkatan pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan dalam rangka meniadakan kesenjangan antar wilayah, gender, status sosial dan kelompok masyarakat;

9. Peningkatan pelayanan kesehatan yang terpadu, holistik, berkesinambungan dan berkualitas bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat rentan;
10. Peningkatan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan pelayanan medik;
11. Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan produksi pangan, pengolahan, distribusi hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang serta terjamin keamanan gizi yang baik;
12. Peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau;
13. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan peranserta masyarakat dalam setiap program kesehatan sebagai upaya memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya. Masyarakat juga terlibat aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pembiayaan pelayanan kesehatan; peningkatan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara seimbang; peningkatan kualitas sumberdaya manusia sejak dini melalui peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak dibawah dua tahun (baduta) diantaranya dengan promosi dan intervensi paket gizi sejak remaja (untuk pencegahan anemia dan infeksi pada masa kehamilan); peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, advokasi inisiasi menyusu dini, rawat gabung, pemberian ASI eksklusif dan ASI lanjutan hingga usia dua tahun dan pemberian makanan pendamping ASI lokal yang sesuai jumlah dan kualitasnya dari usia enam bulan sampai usia dua puluh empat bulan; peningkatan peran dan kerjasama lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan dan gizi (sarana prasarana jalan, air bersih, pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta lingkungan); reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi; penyediaan sumberdaya kesehatan baik kuantitas maupun kualitas meliputi sumberdaya manusia, pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan, obat dan alat kesehatan serta ilmu pengetahuan dan

penelitian; pembangunan yang berwawasan kesehatan; dan penanggulangan bencana serta kedaruratan kesehatan;

14. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk : menciptakan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; menciptakan kualitas hidup PMKS sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; membentuk kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; menciptakan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial; menjamin bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial;

E. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup masyarakat yang bersih dan sehat melalui:
   1. Peningkatan pemahaman tentang nilai dan etika lingkungan bagi kehidupan masyarakat termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua lapisan masyarakat.
   2. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial, budaya lokal, jumlah penduduk dan lingkungan hidup secara berimbang dan terpadu.

F. Terwujudnya masyarakat yang berperilaku cerdas:
   1. Peningkatan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, kerukunan hidup umat beragama, rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat islami yang menjadi kekuatan untuk mencapai kemajuan pembangunan.
   2. Peningkatan pembangunan keagamaan diarahkan untuk menciptakan kondisi terbaik bagi kelangsungan kehidupan masyarakat melalui pengkajian dan aplikasi ajaran keagamaan, secara fungsional dan proporsional sehingga mampu memfilter arus informasi dan pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media massa.

3. Pemantapan ketahanan budaya yang islami masyarakat Aceh diarahkan untuk mendorong pelestarian, pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat islami yang memiliki jatidiri dan berketahanan budaya yang mampu mendorong pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan.

5.2.3. Mewujudkan Aceh yang Demokratis Berlandaskan Hukum

Demokrasi yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang sejahtera, damai dan islami. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, demokrasi yang dikembangkan di Aceh harus berlandaskan hukum agar demokratisasi Aceh dapat memunculkan aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua rakyat secara non-diskriminatif.

Mewujudkan Aceh yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* bisa berjalan dan menumbuhkan masyarakat aktif (*active community)* serta mendorong pemerintah responsif (*responsive government*) yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*); menjamin kebebasan media yang bertanggung jawab dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; mengembangkan hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

1. Pemantapan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dilakukan dengan: mempromosikan dan menyosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah regulasi yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan masyarakat sipil dalam kegiatan pembangunan; menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat secara formal dan informal; meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik; dan menciptakan pelembagaan demokrasi lebih

lanjut untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

2. Penguatan peran masyarakat sipil dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat menuju masyarakat madani yang kuat. Di samping itu, penataan peran masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata sosial kemasyarakatan, kearifan lokal, dan lembaga adat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan. Dalam ranah politik, penguatan peran masyarakat diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik.
3. Peningkatan kualitas peran dan kebebasan media yang bertanggung jawab diarah untuk: mencerdaskan masyarakat dalam pembangunan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan berlandaskan hukum; meningkatkan jangkauan dan pemerataan informasi dengan mendorong munculnya media massa daerah yang independen; menciptakan jaringan dan teknologi informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik dalam menciptakan dan mensosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas; meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.
4. Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang berkeadilan yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits serta sumber-sumber hukum nasional dan daerah yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum. Pembangunan materi hukum dilaksanakan melalui proses penelitian dan pengembangan guna menjamin bahwa produk hukum beserta peraturan pelaksanaannya mengikuti perkembangan dan dinamika serta aspirasi masyarakat sehingga dapat diaplikasikan secara efektif.

Selanjutnya pembangunan struktur hukum ditujukan untuk memaksimalkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum dan badan peradilan sehingga aparatur hukum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional, jujur dan adil.

5. Perwujudan masyarakat yang berbudaya hukum dilaksanakan melalui pendidikan secara formal dan informal; pengkondisian lingkungan yang inspiratif dan apresiatif terhadap ketaatan hukum; dan pemberian akses kepada masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan akses terhadap proses pengambilan keputusan sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya.
6. Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan dengan tidak memandang suku, agama, ras dan antar golongan berdasarkan hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran. Dalam rangka menjaga perdamaian, tindak kekerasan terhadap kemanusiaan pada masa konflik harus dapat diselesaikan secara tuntas baik melalui cara yang berkeadilan dan bermartabat. Penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) secara konsisten dan non-diskriminatif juga ditujukan agar terdapat kepastian hukum di Aceh untuk menjamin kedudukan yang sama dihadapan hukum dan memberikan iklim yang kondusif bagi investasi.

5.2.4. Mewujudkan Aceh yang Aman, Damai dan Bersatu

Umur perdamaian di Aceh yang masih muda memberikan potensi ancaman baru bagi Aceh aman, damai dan bersatu. Contoh empiris dari negara yang baru selesai dari konflik kembali terjebak dalam kondisi yang menyebabkan konflik baru. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

Arah pembangunan yang berbasis perdamaian diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evalui pembangunan yang mendorong kohesi social, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, inklusi, akuntabilitas serta keberpihakan pada masyarakat rentan.

1. Keamanan dan perdamaian di Aceh diwujudkan melalui keterpaduan penegakan hukum yang adil, tegas dan bijaksana dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan budaya lokalita.

2. Pembangunan perdamaian yang berkelanjutan dilaksanakan dengan merekatkan kembali struktur masyarakat sehingga kohesi sosial, ekonomi dan politik terjadi secara baik. Proses reintegrasi harus didukung dan menjadi tanggung jawab oleh semua pihak agar warisan perpecahan selama konflik berkepanjangan tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya perdamaian yang abadi di Aceh.
3. Peningkatan kapasitas dalam pembangunan perdamaian di Aceh diarahkan pada pemahaman dan pelaksanaan pendekatan peka konflik (*conflict sensitiviy approach*) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan. Selain itu, institusi non-pemerintah yang berada dalam masyarakat harus didorong untuk mengelola potensi konflik yang timbul melalui pendeteksian dini dan proses resolusi sehingga potensi tersebut tidak menjadi ancaman terhadap perdamaian, termasuk melibatkan kelompok rentan.
4. Persatuan Aceh diwujudkan melalui sinergisitas pembangunan yang saling mendukung berdasarkan potensi wilayah, pengurangan disparitas serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.
5. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perdamaian secara berkelanjutan melalui kesiapsiagaan terhadap isu-isu konflik, pendeteksian dini, pengelolaan konflik serta penanganan pasca konflik.
6. Penerapan konsep pencegahan dan mitigasi dalam manajemen konflik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
7. Peningkatan kapasitas pemerintah dan aparaturnya dalam penerapan pembangunan pasca konflik melalui kebijakan, strategi, informasi dan data, serta fakta (*evidence based*) dalam mengelola dan mengurangi resiko konflik akibat pelaksanaan pembangunan.
8. Pembangunan peka konflik sebagai salah satu arah pembangunan di Aceh harus dirumuskan secara komprehensif, lintas wilayah dan lintas sektor dengan berbagai indikator dan capaian yang terukur sehingga dapat membawa penguatan perdamaian.

5.2.5. Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas, Maju, Adil dan Merata

Pembangunan yang berkualitas, adil dan merata merupakan perwujudan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung atas partisipasi seluruh rakyat, yang berarti

pembangunan harus dilaksanakan dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat. Hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh merata sehingga akan mengurangi gangguan keamanan dan konflik sosial untuk mencapai Aceh yang Islami, Maju Damai dan Sejahtera.

1. Pembangunan sumberdaya manusia harus mengarah pada peningkatan kualitas manusia sebagai subjek pembangunan bukan objek pembangunan, sehingga dapat dibangun kualitas kehidupan yang makin baik. Untuk itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia difokuskan kepada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lingkungan serta didukung kondisi sosial, politik dan keamanan yang tertib, aman, nyaman dan demokratis.
2. Peningkatan kualitas pendidikan diarahkan agar sumberdaya manusia menguasai ilmu pengetahuan dan tekonologi yang tinggi serta berakhlak mulia berdasar nilai-nilai islami yang kaffah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berharkat, bermartabat dan mampu bersaing di era global. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pemerataan akses pendidikan, penambahan jumlah dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional dan internasional, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik pada jalur pendidikan formal, informal maupun non formal di berbagai tingkatan hingga menjangkau semua lapisan masyarakat terutama dari kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah, terkena dampak konflik dan bencana, masyarakat di daerah pedesaan yang tertinggal dan terpencil, serta anak-anak dengan bakat istimewa dan anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat mengakses layanan pendidikan tanpa terkecuali.
3. Pembangunan kesehatan harus dapat membangun sistem kesehatan daerah yang berfungsi secara efektif dan efisien baik dalam kondisi normal atapun darurat, dengan meningkatkan peran dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada seluruh masyarakat Aceh dengan memperhatikan kelompok miskin, kelompok rentan seperti wanita, janda dan anak-anak termasuk anak yatim, korban tsunami, dan konflik; melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap program kesehatan sebagai upaya memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya sendiri dan lingkungannya;

mengurangi disparitas pelayanan kesehatan antar daerah dengan mencukupi sumberdaya kesehatan, melakukan revitalisasi/reformasi dan peningkatan fasilitas layanan kesehatan dasar dan tertier pada seluruh fasilitas kesehatan sesuai karakteristik tiap daerah.

4. Pembangunan pemuda diarahkan kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kepemimpinan sehingga dapat berpartipasi diberbagai bidang pembangunan terutama bidang ekonomi, sosial politik, budaya, olahraga secara adil dan merata sesuai dengan tingkatan dan kemampuan yang dimiliki tanpa diskriminasi. Sedangkan pemberdayaan perempuan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan mengurangi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
5. Pembangunan ekonomi Aceh diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth),* menciptakan lapangan kerja *(pro-job)* dan mengurangi tingkat kemiskinan (*pro-poor*) secara adil dan merata dengan paradigma "Pembangunan untuk Semua" sehingga memperkecil ketimpangan pembangunan antara kawasan timur, barat-selatan, tengah dan kepulauan. Pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui peningkatan investasi dan perdagangan regional, nasional dan internasional. Pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dengan menggerakan sektor riil yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan perdesaan.
6. Pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan modal sosial (*social capital*) dan modal manusia (*human capital*) yang belum tergali potensi khususnya di kawasan perdesaan, sehingga tidak semata-mata mengandalkan sumberdaya alamnya saja; dan intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian.
7. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk penguatan struktur perekonomian dengan menempatkan sektor industri sebagai penggerak utama untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian dengan

pengembangan sektor komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produktifitas sub sektor perkebunan, menghidupkan usaha perternakan dari hulu ke hilir, memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan serta pengelolaan hutan secara lestari dengan mengoptimalkan manfaat hutan sesuai fungsinya, dengan berorientasi kepada penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK;

8. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, energi listrik, air dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya; menumbuh kembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menyerap tenaga kerja terutama di wilayah perdesaan; Pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
9. Pembangunan ekonomi yang berdasarkan pendekatan kebutuhan (*demand driven*) dengan penekanan pada keunggulan komparatif Aceh serta ekspor ke pasar di luar Aceh. Hal ini merupakan kunci bagi peningkatan penjualan, pendapatan serta penyerapan tenaga kerja; membuat kebijakan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang ada dan memperbaiki lingkungan usaha (bussines environment) untuk memfasilitasi kegiatan investasi, produksi dan perdagangan dalam dan di luar Aceh;
10. Meningkatnya produksi dan kualitas komoditas andalan wilayah untuk mendorong penumbuhan usaha rakyat pada peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produksi dan kualitas komoditas andalan wilayah; pengembangan teknologi pengolahan yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah; dan pengembangan kelembagaan, pemasaran dan infrastruktur pendukung yang mendorong daya saing komoditas andalan di pasar nasional dan internasional.
11. Mengembangkan sektor keuangan agar mampu memberikan kontribusi melalui lembaga jasa keuangan bank dan non bank serta swasta dalam pendanaan pembangunan secara adil dan merata bagi seluruh wilayah di Aceh; mendukung peningkatan kelembagaan jasa non perbankan sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha bagi seluruh lapisan masyarakat.

12. Pengembangan kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong pembangunan ekonomi melalui pencitraan Aceh yang bernuansa islami dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam, adat, budaya lokalita,situs islami, situs tsunami dan nuansa kehidupan Aceh yang bersyariat islam dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
13. Pengembangan infrastruktur harus mendukung pengembangan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Setiap pembangunan infrastruktur yang ingin dikembangkan harus membuka isolasi wilayah, meningkatkan indeks pelayanan transportasi khususnya di wilayah perdesaan, tertinggal dan terpencil, dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi pertanian dan industri dengan kawasan koleksi dan distribusi serta meningkatkan aksebilitas informasi, aktifitas perdagangan barang maupun jasa secara lokal, regional dan internasional.
14. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; perencanaan dan pembuatan kebijakan berbasis pada fakta dan realita (*evidence-based*); dan pengembangan teknologi tepat guna. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan peta jalan (*road map*) dan agenda riset yang selaras dengan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut diatas dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi daerah melalui kemitraan pemerintah, akademisi dan dunia industri (*triple helix*) guna mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
15. Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh diarahkan untuk menjadi acuan kebijakan pembangunan spasial untuk lintas sektor dan wilayah sehingga meningkatnya fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh sesuai dengan hierarki dan fungsi ; meningkatnya akses pelayanan secara merata dan berhierarki dalam dan luar wilayah Aceh baik dalam lingkup nasional maupun

internasional.

16. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktifitas ekonomi, pariwisata dan jasa perdagangan lainnya dalam skala nasional dan manca Negara.
17. Meningkatkan pembangunan di perdesaan terutama daerah–daerah kantong kemiskinan, daerah-daerah pemukiman baru bagi masyarakat transmigrasi lokal dengan mengembangkan agroindustri dan jasa sesuai dengan potensi sumberdaya yang berbasis pertanian, perikanan dan jasa lainnya. Pembangunan daerah perdesaan dan daerah pemukiman baru diarahkan agar dapat memenuhi kebutuhan perkotaan sehingga menjadi satu kesatuan wilayah ekonomi yang saling mendukung dan berkaitan.
18. Pemenuhan perumahan dan prasarana pendukung bagi masyarakat kurang mampu dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan bagi semua wilayah Aceh. Pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dilakukan secara memadai, berkualitas, berkelanjutan dan tepat sasaran; dan mampu membangkitkan potensi pembiayaan dari masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan yang memperhatikan kearifan local, fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
19. Pembangunan investasi diarahkan dengan memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing daerah Aceh untuk mendorong tumbuhnya ekonomi secara tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan membangun infrastruktur yang handal dan regulasi yang mendukung sehingga dapat menarik penanaman modal dalam negeri dan asing. Investasi yang akan di kembangkan harus berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat Aceh.
20. Peningkatan kerjasama antar kabupaten di Aceh dengan memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap kabupaten melalui sistem jejaring antar kabupaten yang saling menguntungkan serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
21. Pengembangan kerjasama ekonomi antar wilayah di Aceh dengan wilayah-wilayah provinsi lain dalam kawasan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya dan Perdagangan luar negeri harus lebih memaksimalkan manfaat bagi perekonomian Aceh secara keseluruhan dengan mengurangi efek negatif dari proses perdagangan internasional; Pengembangan

investasi dan aktivitas perdagangan harus mampu mendorong distribusi barang dan jasa serta memberikan insentif bagi pengembangan produk-produk unggulan lokal yang berpihak kepada petani, pedagang/wirausahawan lokal.

22. Peningkatan kapasitas pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur, kelembagaan pemerintah, kelembagaan legeslatif daerah dan kelembagaan keuangan pemerintah melalui peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan sehingga professional dalam melaksanakan pelayan publik.

5.2.6. Mewujudkan Aceh yang Lestari dan Tanggap terhadap Bencana

Ketersediaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari memegang peranan penting dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera, damai dan islami diperlukan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan tangguh terhadap bencana di masa mendatang yang diarahkan kepada hal-hal berikut:

1. Pengelolaan sumberdaya alam diarahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan. Sumberdaya alam yang terbarukan meliputi air, udara, tanah, tumbuhan dan hewan harus dijaga kelestariannya agar tidak merusak ekosistem dan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan lebih difokuskan kepada penyediaan jasa lingkungan dan energi alternatif; Pemenuhan kebutuhan energi diarahkan dengan memanfaatkan energi yang terbarukan seperti panas bumi, bahan bakar nabati (*biofuel*), aliran sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan nilai tambah dan nilai jualnya untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

   Sedangkan untuk sumberdaya alam yang tidak terbarukan yang meliputi aneka hasil tambang dan bahan galian diarahkan pemanfaatannya seefisien mungkin dan dikendalikan dengan penerapan sistem regulasi yang menjamin kelestariannya. Pemanfaatan sumberdaya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat dan mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian, serta mencari lokasi sumber-sumber energi yang baru, setiap pemanfaatan Sumberdaya Air (SDA) harus

memeperhatikan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit perencanaan dan pengelolaan;

2. Mengelola dan melakukan konservasi potensi sumberdaya air

   Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dengan mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumberdaya air harus dilakukan secara optimal untuk menjamin ketersediaan air melalui pengelolaan secara holistik dan terintegrasi antar sektor dan wilayah serta memperhatikan prinsip hidro-orologi dalam kerangka pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); memperkuat struktur kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya air; melibatkan semua pihak dalam setiap tahap pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya air dari tahap perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaan; Penerapan konsep imbal jasa lingkungan terhadap air baku juga dapat dikembangkan dalam rangka menjaga potensi sumberdaya air; dan memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan;

3. Memanfaatkan dan mengelola struktur dan pola ruang yang serasi
   Mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang; menentukan dan mengatur hubungan yang serasi dan seimbang antara orang dan ruang; menyusun, menetapkan dan mensahkan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan aspek waktu, modal, dan optimasi terhadap penggunaan bumi, air, angkasa dan keseimbangan serta daya dukung lingkungan; membuat rencana pemanfaatan ruang agar dapat berfungsi sesuai dengan rencana tata ruang; mengendalikan pelaksanaan rencana tata ruang meliputi pengaturan, pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, untuk mencapai tujuan penataan ruang yang berbasis pada ekosistem;
4. Pelestarian fungsi dan potensi keanekaragaman hayati sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan mengintegrasikan aktivitas pembangunan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumberdaya alam; meningkatkan nilai dan fungsi keanekaragaman hayati melalui upaya konservasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa lingkungan; meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat seperti *panglima laot*, *pawang uteuen*, *petua seuneubok, keujruenblang* dan budaya lokalita dalam

pelestarian keanekaragaman hayati;

5. Penurunan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam terbarukan dan tidak terbarukan; menegakkan hukum secara adil dan konsisten bagi pelaku pelanggaran yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada masyarakat secara bertahap terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pendekatan budaya, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi; dan menetapkan kawasan konservasi yang baru dengan tetap memelihara kawasan konservasi yang sudah ada;
6. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan permasalahan lingkungan; dan peningkatan kapasitas masyarakat terutama generasi muda agar tanggap terhadap isu-isu lingkungan yang sedang berkembang sebagai bekal menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di masa mendatang;
7. Penerapan konsep mitigasi dalam manajemen penanganan bencana dilaksanakan dengan menata pola dan struktur ruang yang tepat dengan memperhatikan kawasan rawan bencana; menerapkan sistem peringatan dini melalui penyebaran informasi yang efektif kepada masyarakat; meminimalkan resiko bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; menciptakan dan memperkuat sistem kebijakan dan regulasi yang mendukung penanganan bencana di Aceh; dan mengintegrasikan mitigasi bencana dalam proses pembangunan melalui sinkronisasi kondisi sosial, budaya, serta ekonomi wilayah Aceh;
8. Mempersiapkan peralatan kebencanaan yang dapat di installl pada daerah rawan gempa; Mempersiapkan peta geologi, wilayah sungai, *multi hazard*, dan skenario resiko bencana (berdasarkan sejarah dan prediksinya); Melakukan provisi rute evakuasi, penempatan logistik, dan SOP (Prosedur Standar Operasi) sesuai dengan jenis bencana dan pemukiman yang terkini; Melakukan provisi rambu-rambu evakuasi dan pemasangan billboard evakuasi ditempat rawan bencana dan kawasan wisata; Mengoptimalkan sistem pusdalop (*crisis center*) dan melengkapi dengan

peralatan pendeteksian bencana; Pelaksanaan *drill* kebencanaan secara berkala; Intalasi dan tata kelola peralatan mitigasi bencana seperti sirine dan perlu melakukan rekayasa industri; Merencanakan dan membangun shelter dan bangunan penyelamatan; Menyelaraskan aspek kebencanaan pada perencanaan spasial; dan Menyelaraskan pendidikan kebencanaan secara non formal, formal dan masuk pada kurikulum lokal;

9. Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat bersama pemerintah untuk siap dan tanggap menghadapi bencana yang berbasis pada pengurangan risiko bencana dengan memberdayakan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana yang berbasis masyarakat; meningkatkan peran dan kapasitas aparatur pemerintah sebagai pengayom masyarakat untuk lebih giat dan aktif dalam menyosialisasikan upaya pengurangan risiko bencana; dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat (*public awareness*) dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

5.3. Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Untuk mencapai visi, misi dan sasaran sebagaimana dimaksud sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diseleksi kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

5.3.1. Tahapan Pembangunan Ke-1 (2012 – 2017)

Konflik dan bencana gempa bumi disertai tsunami 26 Desember 2004 yang melanda Aceh telah menghancurkan semua sendi kehidupan masyarakat Aceh. Bencana ini tidak hanya menghancurkan fisik bangunan, tetapi juga

menelan ratusan ribu nyawa serta lumpuhnya pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, pada tahap ini penekanan adalah merehabilitasi dan merekonstruksi kehidupan masyarakat Aceh untuk semua bidang yakni infrastruktur, ekonomi, sosial, agama dan kelembagaan. Pada akhir tahapan pembangunan pertama, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas diharapkan mencapai 5 – 6 persen, tingkat kemiskinan menjadi 17 – 18 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 8 persen. Tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 9 (sembilan) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia. Untuk mencapai target atau indikator pembangunan yang diharapkan, diperlukan strategi penggunaan pendanaan yang optimal dari berbagai sumber pendanaan yang sah sesuai dengan rencana induk pemanfaatan masing-masing sumber pendanaan. Hal ini diperlukan mengingat kontribusi sektor migas untuk pertumbuhan ekonomi Aceh semakin menurun, maka diperlukan upaya dalam pengembangan penerimaan dari sektor non migas.

Tercapainya kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki telah memberikan kondisi ideal bagi pembangunan Aceh. Tahapan ini memprioritaskan pada proses reintegrasi dan konsolidasi perdamaian yang diwujudkan melalui pelaksanaan hasil nota kesepahaman Helsinki. Diharapkan pada akhir periode tahapan pembangunan kesatu, faktor kerentanan (*vulnerability*) terhadap konflik dapat diminimalkan yang ditandai dengan terwujudnya kohesi (rekatan) ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat.

Pembangunan ekonomi difokuskan untuk memulihkan kapasitas dan produktifitas perekonomian Aceh yang lumpuh akibat konflik dan tsunami. Untuk memulihkan kapasitas perekonomian Aceh dilaksanakan melalui rehabilitasi lahan yang terkena dampak tsunami, pemanfaatan kembali lahan terlantar selama konflik, penyediaan sarana penangkapan ikan bagi nelayan, penyediaan modal keuangan, pelatihan keterampilan serta sarana dan prasarana produksi lainnya.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia merupakan modal utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, iklim usaha yang kondusif, serta membaiknya upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Peningkatan daya saing daerah memerlukan percepatan

pembangunan infrastruktur yang didorong dengan adanya regulasi dan reformasi, terutama pada sektor transportasi, energi listrik, air dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi sekaligus mendukung kemajuan sosial dan budaya.

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada upaya pemulihan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan, sistem jaringan air bersih dan sanitasi, sistem transportasi, infrastruktur sumber daya air dan sistem komunikasi serta sarana pos dan telekomunikasi. Dalam rangka mendukung seluruh aktifitas tersebut maka perlu dilakukan pencadangan sumber energi yang cukup serta mulai memikirkan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang dapat menjadi alternatif pengganti minyak dan gas, seperti panas bumi (*geothermal*), tenaga air, angin, uap, dan gelombang laut.

Rehabilitasi dalam rangka peningkatan fungsi, potensi, dan daya dukung lingkungan serta sumberdaya alam dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana dan penataan kembali agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan normal. Untuk pemulihan kawasan pesisir yang hancur akibat bencana tsunami, sebagian kawasan telah dilakukan berbagai upaya pemulihan melalui restorasi kawasan ekosistem pesisir, penanaman kembali ekosistem *mangrove*, hutan pantai, pelestarian kawasan budidaya perikanan, dan terumbu karang. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan penyangga (*buffer zone*) dan keanekaragaman hayati yang dimiliki sebagai salah satu sumber kekayaan laut tropis di Aceh; meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak; mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah pesisir, laut, perairan tawar; dan mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir untuk meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tanggap terhadap bencana diwujudkan dalam rencana pembangunan Aceh melalui pengaturan tata guna lahan (*land use management*), pemulihan fungsi hutan, pengelolaan energi terbarukan, pemberdayaan masyarakat (*community development*), pengendalian pencemaran lingkungan hidup, menjaga kawasan konservasi secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara aktif. Hal ini dilakukan sejalan dengan *Aceh Green Vision*.

Penataan ruang Aceh ditetapkan dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang mengatur pola ruang dan struktur ruang. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam tata ruang dapat menimbulkan terjadinya alih fungsi lahan yang berdampak terhadap lingkungan.

Selain itu, upaya mitigasi bencana dilakukan secara simultan dan berkelanjutan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasan global. Menyusun dan menetapkan peraturan dan regulasi menyangkut dengan upaya penanggulangan bencana merupakan fokus utama perencanaan pada tahapan ini, disamping melahirkan beberapa rencana aksi daerah terkait dengan pengurangan risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana termasuk prosedur operasi standar. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat juga merupakan salah satu upaya pendekatan agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Kebijakan menetapkan pola ruang dan struktur ruang yang tepat untuk menghindari timbulnya kerusakan lingkungan dan bencana merupakan langkah penting yang perlu diambil untuk mewujudkan Aceh yang lestari dan tanggap terhadap bencana.

Selanjutnya, penegakan hukum dan hak asasi manusia di Aceh pada tahap pembangunan ini dititikberatkan pada penginternalisasian dan pelembagaan nilai-nilai islami, demokrasi dan hak asasi manusia guna mendorong proses pembangunan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dan menjadikan perdamaian Aceh sebagai pembelajaran (*lesson learned*) bagi masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun internasional melalui memorisasi dan catatan sejarah.

Pembangunan sektor pendidikan difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar untuk pendidikan dasar dan menengah (12 tahun) yang didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan sistem pendidikan yang baik. Selanjutnya, implementasi sistem pendidikan islami dilakukan dengan menyediakan landasan hukum dan prosedur operasi standar dalam rangka pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada akhir periode ini diharapkan komposisi penduduk Aceh yang menamatkan pendidikan D-I/II/III dan D-IV/S1 sebesar 8 persen.

Prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar yang dapat diakses seluruh masyarakat melalui penyediaan tenaga medis, peralatan medis, obat-obatan yang memadai dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI). Dalam periode ini pembangunan kesehatan juga ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs) yaitu yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; pencegahan penyakit menular, khususnya HIV-AIDS dan malaria; serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada penyelenggaraan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, peningkatan pemahamanan semua pihak tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penyediaan data terpilah yang mendukung.

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diprioritaskan pada identifikasi dan inventarisasi permasalahan kesejahteraan sosial, pengembangan data base yang handal, peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial yang lebih adil, peningkatan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah. Sedangkan pembangunan budaya ditekankan pada upaya untuk menumbuhkan kembali khazanah budaya, adat-istiadat, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional Aceh sebagai sebuah warisan luhur yang harus dilestarikan.

Prioritas pembangunan bidang keagamaan adalah penguatan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan pengembangan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sejak pemberlakuan syariat Islam secara legal formal, beberapa instrumen pelaksanaan telah dilengkapi seperti pendirian beberapa lembaga/dinas/badan dan penetapan peraturan daerah atau qanun. Lembaga pemerintahan Aceh terkait dengan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh dibentuk antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama, Mahkamah Syar'iyah, Baitul Mal, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Pembentukan lembaga-lembaga ini diharapkan

mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan mempercepat pencapaian visi menuju Aceh yang Islami.

5.3.2. Tahapan Pembangunan Ke-2 (2018 – 2022)

Sebagai keberlanjutan tahapan pembangunan pertama Aceh, periode kedua pembangunan ini difokuskan untuk mencapai target-target tujuan pembangunan millenium dan mendukung pengembangan agroindustri di Aceh. Berkembangnya industri berbasis pertanian melalui intensifikasi untuk peningkatan produksi dan kualitas komoditas andalan yang memberikan nilai tambah produk pertanian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan beban tanggungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs), menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan wilayah serta pengembangan wilayah strategis sesuai dengan potensi.

Pada akhir tahapan pembangunan kedua, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan mencapai 7 – 8 persen, tingkat kemiskinan menjadi 14 - 15 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 7 persen. Tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 14 (empat belas) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

Penekanan pembangunan infrastruktur dalam periode kedua adalah peningkatan sistem transportasi dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, peningkatan akses jaringan air bersih dan sanitasi, dan pemantapan di sektor perumahan yang mengedepankan penyediaan rumah layak huni secara mandiri yang memenuhi standar kesehatan.

Pembangunan di bidang transportasi darat, udara, dan laut yang didukung oleh sistem dan jaringan komunikasi dan informasi diarahkan untuk memperlancar pergerakan barang, penumpang dan jasa yang lancar dan merata antar daerah serta dapat mendorong transaksi perdagangan yang saling menguntungkan dengan membangun jaringan pelayanan yang menerus antar moda angkutan.

Bidang sumberdaya air, pengembangan infrastruktur diarahkan pada pelaksanaan konservasi sebagai upaya mempertahankan ketersediaan air secara berkelanjutan, pendayagunaan sumberdaya air secara terpadu dan berkesinambungan untuk keperluan pertanian, industri, konsumsi rumah

tangga, pembangkit listrik, dan pengendalian daya rusak air sebagai upaya untuk menangani bencana yang disebabkan oleh air melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pembangunan infrastruktur secara proporsional diharapkan adanya dukungan dari dunia usaha dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas lingkungan dititik-beratkan pada pembangunan berwawasan lingkungan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan serta penyediaan informasi kondisi lingkungan. Sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan dan menjalankan rencana penataan ruang yang sudah ditetapkan.

Pembangunan Aceh di bidang kebencanaan difokuskan pada peningkatan peran masyarakat, kelembagaan masyarakat dan pemerintah guna memaksimalkan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan pemahaman dan penilaian bahaya, peringatan dini, persiapan menghadapi bencana dan pasca bencana.

Pengelolaan sumber daya hutan diarahkan pada pengembangan wana tani (agroforestry) dan pemanfaatan jasa lingkungan seperti pariwisata alam (eco-tourism), hasil hutan non-kayu dan perdagangan karbon. Penyusunan sejumlah aturan dan regulasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian hutan.

Strategi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan pada tahap pembangunan ini diarahkan pada pengembangan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya yang didukung oleh fasilitas yang memadai seperti pelabuhan perikanan samudera dan nusantara; pengaturan administrasi dan perizinan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang efisien; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dipaduserasikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang sesuai dengan kewenangan masing-masing; pemeliharaan hukum adat laot dan meningkatkan peran panglima laot untuk ikut membantu menjaga keamanan dan lingkungan laut.

Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada pencapaian tujuan pembanguan millenium yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua,

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular serta menurunkan beban ganda kesehatan. Pada akhir periode ini diharapkan Aceh dapat meningkatkan peringkat IPM ke posisi 5 (lima) terbaik di Sumatera. Penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menjadi prioritas pada tahun 2015 semua anak Aceh baik laki-laki dan perempuan harus dapat menempuh jenjang pendidikan dasar. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan pada berbagai jenjang juga dilakukan dengan mengupayakan penyempurnaan kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana pendukung pendidikan (pustaka, laboratorium, mushalla dan sanitasi), peningkatan kompetensi/profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik, meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholders pendidikan serta upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Prioritas pendidikan menengah melalui pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan sesuai dengan kebutuhan dan realitas dunia usaha. Pengembangan Lembaga PAUD pada periode ini diprioritaskan pada target tertampungnya semua anak usia 0–6 tahun pada lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun non formal. Pada akhir periode ini diharapkan komposisi penduduk Aceh yang menamatkan pendidikan D-I/II/III dan D-IV/S1 sebesar 12 persen.

Pelaksanaan konsep pendidikan Islami di seluruh institusi pendidikan dengan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan yang berbasis nilai Islami serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lokal, nasional dan global. Upaya percepatan implementasi sistem pendidikan Islami juga telah dikuatkan dengan tersedianya landasan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi sekolah dan institusi terkait serta peningkatan kuantitas dan kualitas guru yang dapat mengimpelementasikan nilai Islami dalam mata pelajaran.

Mendorong peningkatan kualitas dan peran pendidikan tinggi terhadap pembangunan; mendorong terciptanya pemerataan kesempatan dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi; mendorong terciptanya kerjasama yang sinergis antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan dunia usaha sehingga hasil kajian dan riset dapat dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan daerah.

Prioritas kesehatan ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh SDM dan fasilitas kesehatan yang berkualitas

sesuai dengan standar pelayanan minimum serta tersebar secara merata dan proporsional. Selain itu, upaya pencapaian tujuan pembangunan millenium/MDGs yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; pencegahan penyakit menular; serta masalah kesehatan lingkungan tetap menjadi prioritas. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, pengembangan sistem kesehatan, peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta tersedianya kesinambungan jaminan kesehatan yang terjangkau.

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk peningkatan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak, peningkatan peran serta dan kesetaraan *gender* dalam pembangunan.

Pembangunan di bidang sosial dan budaya diarahkan untuk meningkatkan modal sosial (*social capital*) dalam masyarakat untuk mendukung industrialiasi pertanian berbasis perdesaan. Rasa saling percaya dalam masyarakat harus dibangun melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan menghidupkan kembali kearifan sosial dan budaya Aceh melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas (*community-based*), sehingga proses industrialisasi mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Modal sosial yang kuat dalam masyarakat juga membentuk iklim investasi yang baik. Demikian juga pembangunan sosial dan budaya diarahkan dapat menjamin hak-hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pembangunan perdamaian ditekankan pada penguatan institusi dan tata kelola pemerintahan untuk melanjutkan perdamaian yang sudah mulai terkonsolidasi pada tahapan pembangunan pertama. Hal ini ditandai dengan pendekatan sensitif konflik yang mulai dielaborasikan dalam kegiatan pembangunan. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum sehingga terciptanya konsolidasi penegakan supremasi hukum.

Dalam bidang syariat Islam, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan peran lembaga-lembaga pelaksana Syariat Islam di Aceh seperti Mahkamah Syar'iah, Baitul Maal, dan Wilayatul Hisbah.

Meningkatkan implementasi Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan menuju masyarakat Aceh yang islami juga ditandai dengan tercapainya tertib sosial dan budaya, kerukunan dan harmonisasi dalam masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, meningkatnya profesionalisme aparatur, serta peningkatan pelayanan publik untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

5.3.3. Tahapan Pembangunan Ke-3 (2023 – 2027)

Sebagai kelanjutan dari tahapan pembangunan kedua, tahapan ini memfokuskan pada pemantapan basis pengembangan industri manufaktur yang sejalan dengan berkembangnya agroindustri. Prioritas pendidikan kejuruan pada tahap sebelumnya menyediakan sumber daya manusia terampil yang mendukung berkembangnya industri manufaktur. Pada akhir tahapan pembangunan ketiga, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas diharapkan mencapai 8 – 9 persen, tingkat kemiskinan menjadi 9 – 10 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 6 persen. Tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 18 (delapan belas) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi perdamaian yang makin kondusif dan supremasi hukum yang berjalan secara adil, tindak kekerasan dan kriminalitas semakin menurun. Konflik sosial yang terjadi dapat diselesaikan melalui institusi-institusi yang berjalan secara efektif di kalangan masyarakat. Kondisi ini memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi berlanjutnya proses pembangunan sehingga proses industrialisasi Aceh dapat berjalan seperti yang direncanakan.

Pemantapan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara untuk mendukung aktifitas ekonomi berbasis industri/manufaktur diarahkan untuk memperlancar arus pergerakan orang, barang, dan jasa. Penguatan sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika melalui pengembangan iptek dan peningkatan daya saing perlu dilakukan untuk mendukung aktifitas perekonomian dan dunia usaha. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sudah membaik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, penyediaan

sarana air baku untuk mendukung industri dan pertanian dengan tetap memperhatikan upaya pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Aktifitas ekonomi yang berbasis pada industri manufaktur dijalankan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan melalui penerapan imbal jasa lingkungan dan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pengrusakan lingkungan. Pengembangan industri kelautan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan menunjang pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan diarahkan melalui penguatan iptek, peningkatan riset dan pengembangan teknologi kelautan. Peningkatan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral lepas pantai dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk lebih memantapkan pengembangan industri manufaktur yang berbasis kepada keunggulan sumberdaya alam yang tersedia dan teknologi yang semakin berkembang. Industri dan perdagangan diupayakan untuk meningkatkan konsolidasi dan jejaring (*networking*), melalui peningkatan peran sektor industri kecil dan menengah dalam struktur industri, peningkatan kemitraaan antar industri dan peningkatan tumbuhnya industri masa depan Aceh sebagai kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi Aceh semakin kompetitif dengan semakin terpadunya antara industri manufaktur dengan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang handal.

Industri manufaktur yang dikembangkan harus diikuti dengan pemantapan mutu untuk merespons setiap tuntutan konsumen, pada tahap ini diperlukan: pengelolaan kualitas rantai produksi (*supply chain management*) yang efektif dan efisien; budaya mutu dan merk; sertifikasi dan standisasi produk; respons terhadap upaya mencapai kepuasan konsumen; kelembagaan penunjang yang efisien; membangun kemitraan untuk membuka jejaring perdagangan nasional dan internasional.

Pembangunan bidang pendidikan telah semakin baik yang antara lain ditandai oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; serta meningkatnya kemampuan Iptek.

Pada periode ini diprioritaskan pengembangan institusi pendidikan yang memiliki standar internasional sehingga dapat bersaing secara global.

Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi juga diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa berskala nasional dan internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan kurikulum internasional. Pada akhir periode ini diharapkan komposisi penduduk Aceh yang menamatkan pendidikan D-I/II/III dan D-IV/S1sebesar 16 persen. Selanjutnya, pada tahap pembangunan ini diharapkan Aceh dapat meningkatkan peringkat IPM ke posisi tiga terbaik di Sumatera.

Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Hal ini membuka peluang pemasukan devisa daerah melalui pariwisata medis *(medical tourism)*.

Dalam bidang pelaksanaan syariat Islam, seluruh komponen masyarakat telah mampu mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat sehingga menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

5.3.4. Tahapan Pembangunan Ke-4 (2028 – 2032)

Tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.
Prioritas pembangunan pada periode ini diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan wilayah. Pada akhir tahapan ini, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 9 – 10 persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen. Tingkat kemiskinan Aceh diharapkan turun ke peringkat 22 (dua puluh dua) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Aceh, membangun kolaborasi regional menuju ekonomi berbasis infrastruktur dan jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan memantapkan infrastruktur yang mendukung kelancaran transportasi produk melalui darat, laut dan udara dari dan ke wilayah Aceh.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan mengembangkan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah mempunyai nilai tambah (*added values*) yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung kemitraan UKM, Swasta Nasional dan Asing dalam pemasaran produk unggulan di tingkat nasional dan internasional serta mengembangkan *cluster* agro industri dan industri manufaktur.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang mempunyai daya saing, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami dalam rangka mendukung pengembangan industri kreatif. Pembangunan sumberdaya manusia akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mewujudkan generasi penerus Aceh yang memiliki akhlak mulia, cerdas dan mampu bersaing di dunia internasional. Pada akhir periode ini diharapkan komposisi penduduk Aceh yang menamatkan pendidikan D-I/II/III dan D-IV/S1 sebesar 20 persen.

Bidang pemerintahan, prioritas pembangunan pada tahap ini diarahkan pada pembuatan kebijakan dan regulasi yang efektif yang dapat menstimulasi investasi, menciptakan dan mengembangkan *e-government* sebagai sarana peningkatan layanan publik.

Pembangunan perdamaian, hukum dan HAM diarahkan pada terciptanya kelembagaan politik dan hukum yang kuat, terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat Aceh. Bidang keagamaan, pembangunan diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan pemantapan sikap rukun dan harmonis antar individu dan antar kelompok masyarakat serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap ini, kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat sudah semakin meningkat. Pembangunan kesehatan ditekankan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kesehatan dan pelayanan yang handal sehingga dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. Aceh diharapkan memiliki angka IPM yang tertinggi di Sumatera.

Langkah dan upaya yang di tempuh diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, kelompok ataupun komunitas masyarakat. Pada tahap ini kelompok penyandang masalah sosial yang rentan karena keterbatasan fisik dan mental harus menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh untuk membina dan memberikan kehidupan layak sesuai dengan azas kemanusiaan yang dijamin undang-undang dan *Qanun* di Aceh.

Pembangunan budaya dilakukan melalui aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Aceh sebagai bagian unsur utama pembentuk identitas dan jati diri yang menjadi karakter yang tangguh. Keberhasilan dalam membentuk karakter budaya ke-Acehan ini ditandai dengan semakin meningkatnya budaya santun, jujur, ramah, memiliki rasa malu, sadar lingkungan dan budaya menjaga kebersihan sebagai bagian yang terintegrasi dari budaya Aceh.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

6.1. Prinsip Kaidah Pelaksanaan

RPJP Aceh merupakan pedoman pembangunan Aceh yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJP Aceh merupakan acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJP Kabupaten/Kota. Selain itu RPJP Aceh merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Aceh dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Aceh dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJP Aceh. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus mempedomani RPJP Aceh dalam menyusun visi dan misi daerah.
2. Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh perlu menyebarluaskan dokumen RPJP Aceh kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur melalui Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan partai-partai politik di wilayah Aceh sehingga sasaran pembangunan 20 (dua puluh) tahun dapat dilaksanakan dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
3. Gubernur dan wakil Gubernur Aceh terpilih dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berpedoman pada RPJP Aceh.
4. RPJP Aceh menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun RPJM kabupaten/kota. Untuk menjamin konsistensi antara RPJP Aceh dengan RPJP Kabupaten/Kota, Bappeda Aceh berkewajiban melakukan evaluasi terhadap rancangan akhir RPJP Kabupaten/Kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan yang termaktub dalam RPJP Aceh dengan sebaik-baiknya.

6. Dalam rangka implementasi RPJP Aceh, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh berkewajiban untuk melakukan penjabaran RPJP Aceh ke dalam RPJM Aceh.

6.2. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

6.2.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh

Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Aceh meliputi:

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Aceh mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Aceh.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Aceh.
3. Pemantauan dan supervisi RPJP Aceh harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Aceh.
4. Hasil pemantauan dan supervisi RPJP Aceh digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh, telah dilaksanakan melalui RPJM Aceh.
5. Kepala Bappeda Aceh melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi RPJP Aceh ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Aceh melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
6. Kepala Bappeda Aceh melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Aceh kepada Gubernur Aceh.

6.2.2.Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh

Mekanisme evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh meliputi:

1. Evaluasi terhadap hasil RPJP Aceh mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJP Aceh.
3. Penilaian digunakan untuk mengetahui;

a. Realisasi antara sasaran pokok RPJP Aceh dengan capaian sasaran RPJM Aceh.
b. Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJP Aceh dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
5. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJM Aceh.
6. Kepala Bappeda Aceh melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJP Aceh. Dalam hal evaluasi jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Aceh melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
7. Hasil evaluasi RPJP Aceh digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJP Aceh untuk periode berikutnya.
8. Kepala Bappeda Aceh melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJP Aceh kepada Gubernur Aceh.
9. Gubernur Aceh menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

PENUTUP

RPJP Aceh yang memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJP Aceh ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Aceh 20 tahun, menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota dan pedoman bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKP Aceh).

Keberhasilan pembangunan Aceh dalam mewujudkan visi **Aceh yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan Aceh yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

GUBERNUR ACEH

ZAINI ABDULLAH